

INTEGRASI NASIONAL INDONESIA DI ACEH (1930-1945)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AZWAR

Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora

Prodi Sejarah Kebudayaan Islam

NIM: 180501123



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM/BANDA ACEH
1446 H/2025 M**

INTEGRASI NASIONAL INDONESIA DI ACEH (1930-1945)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Studi Sejarah Dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD AZWAR

Mahasiswa Fakultas Adab Dan Humaniora
Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam
NIM. 180501123

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Dra. Munawiah, M.Hum.
NIP. 196806181995032003

Pembimbing II

Asmanidar, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197712312007102001

Mengetahui,
Ketua Prodi Sejarah Kebudayaan Islam

Ruhamah, M.Ag
NIP. 197412242006042002

INTEGRASI NASIONAL INDONESIA DI ACEH (1930-1945)

SKRIPSI

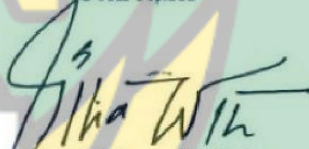
Telah diuji oleh panitia ujian skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan dinyatakan lulus serta diterima
sebagai salah satu beban studi program sarjana (S1)
dalam ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam
Pada Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
27 Dzulhijjah 1446 H
Di Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Asmanidar, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197712312007102001

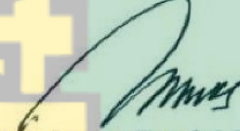
Sekretaris


Hamdina Wahyuni, M.Ag.
NIPPPK. 198712202025212008

Penguji I


Muhammad Yunus Ahmad,
S.Hum., M.U.
NIP : 197704222009121002

Penguji II


Drs. Anwar Daud, M.Hum.,
NIP : 196212311991011002

Mengetahui Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Syahrudin, M.Ag., Ph.D.
NIP. 197001011997031005

PERNNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Azwar

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjong, 6 Februari 1997

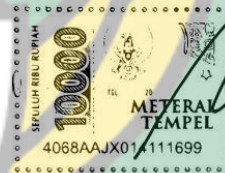
NIM : 180501123

Program Studi : Sejarah Kebudayaan Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali dengan mencantumkan sumber tulisan tersebut.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Muhammad Azwar

NIM. 180501123

ABSTRAK

Selama lebih dari empat abad, Kesultanan Aceh Darussalam menjadi pusat ilmu pengetahuan, kekuatan maritim, militer, dan politik di Asia Tenggara. Saat bangsa-bangsa lain di Asia dan Afrika jatuh di bawah kolonisasi Eropa pada kurun abad ke-16 hingga ke-19, Aceh tetap berdiri sebagai negara berdaulat seperti layaknya negara-negara berdaulat di dunia hari ini. Di sisi lain rakyat Aceh juga memiliki identitas nasional yang kuat sebagai sebuah bangsa. Ketika Belanda telah menguasai sebagian besar Asia Maritim, bangsa Aceh terus berjuang mempertahankan kemerdekaannya hingga akhirnya ditaklukkan secara militer. Namun, ketika bangsa-bangsa bekas jajahan Eropa di Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaannya pasca Perang Dunia II, para elit sosial Aceh memilih untuk bergabung dengan republik yang baru lahir, Indonesia. Sebuah keputusan yang tampaknya bertentangan dengan sejarah panjang kemandiriannya. Oleh karena itu penelitian ini ditulis untuk menjelaskan kondisi sosial, budaya, paradigma dan aspek ideologis rakyat Aceh sebelum terjadinya proses integrasi nasional Indonesia di Aceh; kemudian untuk mendeskripsikan Konsep Integrasi Nasional Indonesia; serta untuk mendeskripsikan proses integrasi nasional Indonesia di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi berarti penyatuan paradigma dan aspek ideologis berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam satu kesatuan wilayah dan identitas nasional. Identitas nasional Indonesia pada dasarnya merupakan warisan dari identitas dan struktur kolonial Hindia Belanda, yang terbentuk melalui proses panjang dominasi politik, militer, dan administratif sejak abad ke-19. Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 sebenarnya merupakan kelanjutan dari sistem administrasi kolonial yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, integrasi nasional Indonesia pada dasarnya adalah kelanjutan dari integrasi kolonial atas wilayah Hindia Belanda. Bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Untuk wilayah yang membentang dari Sumatera Utara hingga Papua, proses integrasi ini sepenuhnya tercapai pada dekade kedua abad ke-20. Sementara di wilayah Aceh, proses integrasi baru mulai berlangsung pada tahun 1930 sebagai dampak dari kebijakan pasifikasi Aceh dan peran aktif kaum pergerakan nasional di wilayah tersebut. Kedua faktor ini berperan dalam membangun lembaga-lembaga pendidikan baru yang melahirkan generasi baru Aceh dengan paradigma baru yang telah kehilangan identitas nasionalnya sebagai bangsa Aceh.

Kata Kunci: *Integrasi Nasional Indonesia, Aceh, Nasionalisme, Identitas Keacehan, Sejarah Sosial, Pasifikasi Aceh.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin, syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kepada saya. Dan dengan Qudrah dan Iradah-Nya jua skripsi yang berjudul "INTEGRASI NASIONAL INDONESIA DI ACEH (1930-1945)" dapat diselesaikan. Maksud dan tujuan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas akhir kuliah dan melengkapi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Terimakasih saya ucapkan kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Bapak Syarifuddin, M.Ag., Ph.D. dan kepada Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI), Ibu Ruhamah, M.Ag., beserta seluruh jajaran dosen dan staf di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Kemudian dengan rasa hormat kepada Ibu Dra. Munawiah, M.Hum., pembimbing I, yang dengan kesabaran tanpa lelah terus mengingatkan, membimbing, dan mendorong saya hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Ibu Asmanidar, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, dan membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Bapak Putra Hidayatullah, dosen SKI yang telah berfikir dengan adil di ruang seminar ketika saya mempertahankan judul saya. Tak lupa, saya menghaturkan penghargaan kepada Kakak Khairatun Munawwarah, M.Ag.,

Operator Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, yang selalu setia duduk di sudut ruang kantor prodi, mengurus segala keperluan mahasiswa dengan ketulusan yang seringkali luput dari perhatian.

Namun di atas semua itu, dengan sepenuh jiwa, saya mempersembahkan karya ini untuk sosok istimewa dalam hidup saya, Ibu, Ibu, dan Ibu. Ibu Nurul Aini Nurdin yang telah mengandung dan mengasuh saya. Kepada Ibu, yang dalam setiap hembusan nafasnya selalu terselip doa, yang dalam peluknya saya menemukan ketenangan yang tak tergantikan. Ibu, yang matanya berkaca-kaca setiap kali membicarakan harapan dan kebahagiaan saya, yang tanpa lelah menjadi cahaya dalam setiap gelap langkah ini. Terima kasih untuk cinta yang selalu ada, untuk doa yang diam-diam menyertai perjalanan ini. Tidak ada kalimat yang cukup untuk menggambarkan cinta dan pengorbananmu.

Juga kepada Bapak Muhammad Salem, Ayah kandung saya, yang karenanya juga alasan saya mengambil judul ini. Dia adalah seorang pejuang untuk bangsanya dan seorang pemimpin, figur terbesar dalam hidup saya setelah Nabi Muhammad SAW. Ayah tempat saya belajar segala hal, mulai dari bagaimana benda-benda bekerja sampai bagaimana dunia bekerja. Yang menanamkan pada saya prinsip hidup, marwah, ideologi, dignity, dan nilai-nilai yang saya bawa hingga hari ini. Kebijaksanaannya melekat kuat dan menjadi kompas dalam perjalanan hidup saya.

Tak lupa salam hangat saya ucapkan kepada teman-teman saya di Kedai Kopi Dekmi, Kantin Smea Lampineung, dan Tekkomdik. Kepada Haekal Afifa

yang mau membuka lemari arsipnya untuk saya, kepada Syah Reza yang membantu memberi pandangan tentang paradigma Islam, kepada Ahsanul Khalis kawan diskusi yang menjadi tempat saya menguji tulisan saya, terakhir kepada Teungku Miswari dan Teungku Rudi pembaca setia yang menanti tulisan saya.

Patut disadari bahwa tentu saja terdapat banyak sekali kekurangan dan kesilapan, itu karena saya hanya seorang manusia yang lumrah dengan kelemahan dan ketidaksempurnaan. Namun, seperti kata teman saya di kedai kopi Dekmi, “bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.” Oleh karena itu beginilah adanya naskah skripsi saya. Dan dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian kecil yang berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Akhir kata, mari kita bershalawat semoga Allah SWT memberikan rahmat dan salam kepada kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, dan juga memberikan balasan yang baik kepada semua pihak yang terlibat dalam proses perkembangan Skripsi ini.

Banda Aceh, 23 Juni 2025

Penulis

Muhammad Azwar

DAFTAR ISI

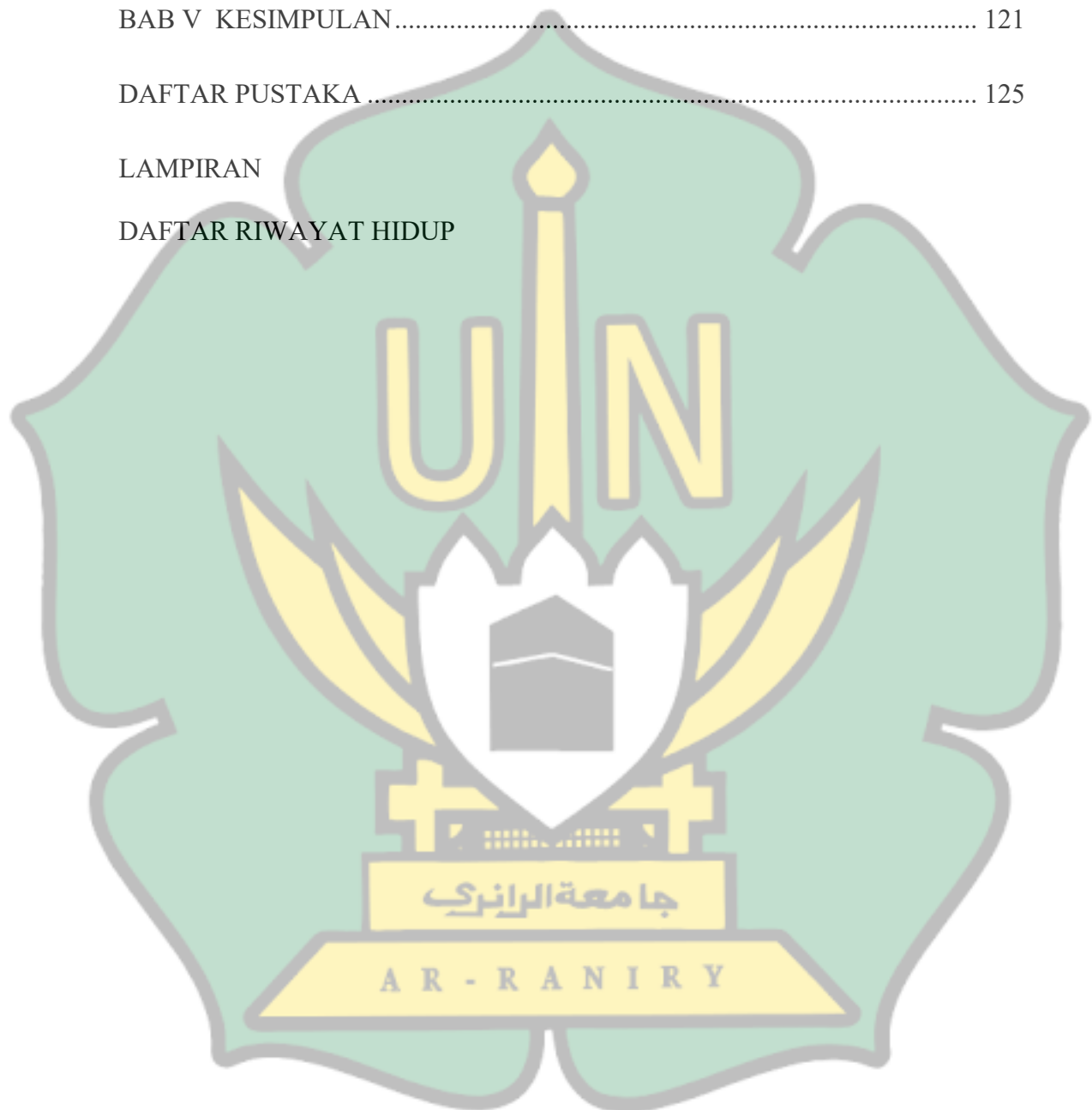
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Penjelasan Istilah	6
1.6. Kajian Kepustakaan	8
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II METODE PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI	12
2.1. Metode Penelitian	12
2.2. Landasan Teori	17
BAB III ACEH SEBELUM INTEGRASI NASIONAL INDONESIA: KONDISI SOSIAL, BUDAYA, PARADIGMA, DAN ASPEK IDEOLOGIS	23
3.1. Asal Usul dan Perkembangan Awal Bangsa Aceh	23

3.2.	Era Awal Peradaban Islam di Aceh.....	25
3.3.	Aceh Era Kesultanan-Kesultanan Abad Ke-13 sampai Ke-16.....	27
3.4.	Kebangkitan Kesultanan Aceh Darussalam dan Puncak Kejayaan.....	30
3.4.1.	Awal Kebangkitan Politik dan Militer Aceh di Tingkat Global.....	32
3.4.2.	Zaman Keemasan Aceh, Masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda Yang Agung (1607–1636).....	35
3.4.3.	Era Kemunduran Kesultanan Aceh Darussalam	44
3.5.	Aceh Awal Abad ke-19, Menuju Perang dengan Belanda	47
3.5.1.	Diplomasi Sultan Ala'ad-din Mansur Syah sebagai Upaya Pertahanan Menghadapi Belanda	48
3.5.2.	Ekspedisi-Ekspedisi Militer Kesultanan Aceh Abad ke-19	51
3.5.3.	Krisis 1872.....	53
3.6.	Perang Aceh-Belanda Pertama	56
3.7.	Perang Aceh-Belanda Kedua (1874–1914).....	58
BAB IV KONSEP INTEGRASI NASIONAL INDONESIA DAN PROSESNYA DI ACEH.....		63
4.1.	Konsep Integrasi Nasional Indonesia	63
4.2.	Proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh	67
4.2.1.	Pemusnahan Identitas Keacehan melalui Eliminasi Pemimpin dan Kaum Cendekiawan (1874–1914).....	67

4.2.2. Pasifikasi Aceh (1914–1930).....	68
4.2.2.1. Transformasi Pendidikan Aceh: Pelarangan Sistem Pendidikan Orisinil Aceh dan Penerapan Pendidikan Sekuler Belanda.....	70
4.2.3. Upaya Awal Integrasi Aceh oleh Organisasi-Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia (1916–1930).....	75
4.2.4. Integrasi Nasional Indonesia di Aceh Periode 1930–1942.....	79
4.2.5. Kelompok-kelompok Elit Sosial di Aceh Berebut Pengaruh dan Kekuasaan (1942–1945).....	90
4.2.6. Elit Aceh Menjemput Jepang	92
4.2.7. Pemberontakan Aceh Terhadap Belanda (1942).....	97
4.2.8. Aceh di Bawah Kendali Kelompok Pemberontak Pro Jepang (Barisan F-Kikan).....	101
4.2.9. Teungku Abdul Jalil di Coet Pling Mengambil Momentum (Perang Bayu 1942)	103
4.2.10. Uleebalang kembali Berkuasa Menggantikan PUSA.....	106
4.2.11. Perekrutan Pasukan Aceh dalam Perang Dunia Kedua.....	109
4.2.12. Konsolidasi Nasionalisme Indonesia di Aceh Pada Masa Kekuasaan Jepang	113
4.2.13. Berita Kemerdekaan Indonesia di Aceh	116

4.2.14. Dinamika Sosial di Aceh Setelah Kemerdekaan Indonesi

Diproklamirkan	119
BAB V KESIMPULAN	121
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Aceh¹ selama berabad-abad telah memiliki identitas nasionalnya sebagai rakyat Kesultanan Aceh Darussalam. Nasionalisme Aceh² telah ada sejak awal abad ke-16 ketika Sultan Ali Mughayatsyah mempersatukan kesultanan-kesultanan yang ada di bagian barat dan utara Sumatra atas nama bangsa Aceh menjadi sebuah negara Islam dengan nama Aceh Darussalam. Negara ini berbentuk kesultanan dengan Islam sebagai sumber hukum dan asas ideologi pemerintahannya.³

Aceh memiliki tradisi kedaulatan yang kuat, sebagai wilayah yang pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, kekuatan maritim, militer dan politik di Asia Tenggara.⁴ Selama lebih dari empat abad berlangsungnya Kesultanan Aceh Darussalam, Aceh telah memainkan peran penting dalam perdagangan global. Sebaliknya, pada waktu bangsa-bangsa lain di Asia Tenggara telah menjadi bagian dari kolonisasi Eropa, Aceh tetap menjadi negara berdaulat seperti layaknya negara-negara berdaulat lainnya di dunia.⁵

¹ Menurut Zulyani Hidayah dalam *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2000), hlm. xiii. Bangsa Aceh merupakan suatu kelompok etnis dan kultural yang berdomisili di wilayah ujung paling barat dan utara pulau Sumatra.

²Lihat Anthony Reid, *Sumatra Revolusi Dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 11.

³A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 120.

⁴ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)* (Kepustakaan Populer Gramedia, 1991), hlm. 45.

⁵ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore University Press, 2005), hlm. 78.

Ketika Kerajaan Belanda menginvasi Kesultanan Aceh, rakyat Aceh mempertahankan negaranya dengan segenap kekuatan dan tidak mau tunduk pada pemerintahan yang baru.⁶ Bahkan setelah Kesultanan Aceh mengalami kekalahan dalam perang dan seluruh wilayahnya berhasil dikuasai oleh Kerajaan Belanda, rakyat Aceh tetap tidak mau tunduk dan tidak mau mengakui pemerintahan Belanda yang baru dibentuk di wilayah Aceh. Rakyat Aceh menyebut seluruh elemen pemerintahan Belanda sebagai *kaphe* (kafir), tidak peduli walaupun dia adalah orang-orang pribumi beragama Islam. Bahkan sekitar 8000 migrasi warga Minang di Aceh yang dibawa oleh pemerintah Belanda sebagai pekerja dan pegawai pemerintahan pada masa itu tidak luput dari cacian dari orang Aceh sebagai *kaphe Padang* (kafir Padang).⁷

Pada masa Pergerakan Nasional Indonesia, mayoritas orang Aceh menganggap isu itu tidak ada hubungannya dengan mereka, bahkan orang-orang Indonesia yang datang ke Aceh kerap dianggap sebagai perantara *kaphe* (kafir).⁸ Dengan semangat nasionalisme semacam itu, bagaimana mungkin Rakyat Aceh kemudian mau bergabung dengan pergerakan nasional Indonesia yang sebelumnya dianggap *kaphe* (kafir) dan melupakan agama dan cita-cita nasional leluhurnya sebagai bangsa Aceh? Namun faktanya, ketika bangsa-bangsa bekas jajahan Eropa di Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaannya pasca Perang Dunia II, sekitar 140 negara baru langsung menjadi anggota PBB. Para elit sosial Aceh memilih

⁶ H.C. Zentgraaf, *Atjeh*, terj. Aboe Bakar (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 5.

⁷ Anthony Reid, *Sumatra Revolusi Dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 30.

⁸ *Ibid.*

untuk bergabung dengan republik yang baru lahir. Sebuah keputusan yang tampaknya bertentangan dengan sejarah panjang kemandiriannya.⁹

Keputusan ini bukannya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, Aceh menjadi wilayah yang dikenal penuh dengan pergolakan politik, konflik sosial, dan perlawanannya terhadap otoritas pemerintah pusat.¹⁰ Semangat kemerdekaan dan identitas keacehan menghasilkan sentimen kolektif dan perasaan tidak rela dari rakyat Aceh untuk tunduk kepada pemerintah Indonesia.¹¹ Sentimen ini kemudian berkembang menjadi gerakan separatisme, seperti yang diusung oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sejak tahun 1976.¹² Pada beberapa dekade terakhir GAM menjadi simbol utama perlawanan terhadap integrasi Aceh ke dalam Indonesia.¹³

Bergabungnya Aceh dengan Indonesia memang tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945–1950).¹⁴ Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di Aceh antara tahun 1945–1950 sangat menentukan terjadinya proses ini.¹⁵ Bergabungnya aktor-aktor politik dan elit sosial Aceh dengan para pejuang Revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tahun-

⁹ Theodore Friend, *Indonesian Destinies* (Cambridge: Harvard University Press, 2003), hlm. 134.

¹⁰ Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (Stanford: Stanford University Press, 2009), hlm. 56.

¹¹ Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989–1992* (Ithaca: Cornell University Press, 1995), hlm. 67.

¹² Kirsten Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization* (Washington, D.C.: East-West Center, 2004), hlm. 89.

¹³ Edward Aspinall, *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia* (Stanford: Stanford University Press, 2009), hlm. 102.

¹⁴ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 143.

¹⁵ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004*, terj. Satrio Wahono dkk. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 154.

tahun itu menjadi kunci mengapa Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini.¹⁶ Namun, apa yang mendorong para aktor politik dan elit sosial Aceh saat itu untuk melebur dalam arus perjuangan Revolusi Kemerdekaan Indonesia? Bukankah Aceh telah lama memiliki identitas kebangsaannya sendiri sebagai entitas yang mandiri dan berdaulat seperti bangsa-bangsa lainnya di dunia?¹⁷ Apakah rakyat Aceh tidak lagi menganggap kafir para pejuang Revolusi Kemerdekaan Indonesia yang notabenenya hanya menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan pemerintahan kolonial? Atau pertanyaan paling penting, apakah nasionalisme kebangsaan sebagai bangsa Aceh sudah tidak ada lagi kala itu?

Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor kausal, kondisional, dan kontekstual yang melatarbelakangi keputusan para pemimpin dan aktor politik Aceh saat itu untuk bergabung dalam perjuangan Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Analisis mendalam terhadap aspek ideologis, kondisi sosial, budaya, dan politik menjadi kunci untuk memahami proses sejarah secara lebih komprehensif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sartono Kartodirdjo dalam karyanya, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*.¹⁸

Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai suatu proses perubahan paradigma dan aspek ideologis masyarakat Aceh

¹⁶ Tim Kell, *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989–1992* (Ithaca: Cornell University Press, 1995), hlm. 173.

¹⁷ Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*, terj. Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 195.

¹⁸ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1993), hlm. 237.

dalam membentuk keputusan historis ini. Proses ini disebut Integrasi Nasional Indonesia yang terjadi pada periode 1930–1945.¹⁹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial, budaya, paradigma dan aspek ideologis rakyat Aceh sebelum terjadinya proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh?
2. Bagaimana Konsep Integrasi Nasional Indonesia?
3. Bagaimana proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi sosial, budaya, paradigma dan aspek ideologis rakyat Aceh sebelum terjadinya proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh.
2. Untuk mendeskripsikan Konsep Integrasi Nasional Indonesia.
3. Untuk mendeskripsikan proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu sejarah dan dapat memperkaya literatur mengenai faktor-faktor kausal,

¹⁹ Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*, terj. Masri Maris (Jakarta: KITLV-Jakarta & Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 248.

kondisional, dan kontekstual yang melatarbelakangi keputusan para pemimpin dan aktor politik Aceh saat itu untuk bergabung dalam perjuangan Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian selanjutnya terkait dengan nasionalisme daerah, konflik pusat-daerah, serta konstruksi identitas politik dalam proses pembentukan negara bangsa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi generasi Aceh ke depan, akademisi, serta masyarakat umum dalam memahami akar historis hubungan antara Aceh dan Indonesia. Selain itu bagi masyarakat Aceh sendiri, penelitian ini dapat menjadi refleksi terhadap perjalanan sejarah bangsanya, sehingga dapat memperkuat identitas dan menjadi pedoman untuk menghindari pengulangan kesalahan masa lalu serta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana di masa depan.

1.5. Penjelasan Istilah

Judul skripsi ini memiliki makna khusus yang merefleksikan tema sentral dan arah kajian penelitian. Setiap kata dalam judul aspek konseptual dan kontekstual dari permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menghindari penafsiran yang keliru, pada bagian ini akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul. Penjelasan ini bertujuan untuk mempertegas batasan makna sesuai dengan konteks ilmiah yang dimaksudkan oleh penulis.

1. Integrasi

Secara harfiah, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dalam ilmu politik dan pemerintahan, integrasi berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional.²⁰

2. Nasional

Nasional secara harfiah berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Dalam ilmu sosial, nasionalisme berarti paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan.²¹

3. Indonesia

Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga berarti bangsa, budaya, bahasa yang ada di negara Indonesia.²²

4. Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung paling barat wilayah teritorial Indonesia. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India, berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara,

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entri “integrasi”, 2021, diakses 26 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/integrasi>; Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 112.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entri “nasionalisme”, 2021, diakses 26 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/nasionalisme>.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), entri “Indonesia”, 2021, diakses 26 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/indonesia>.

Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan provinsi Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan.²³

Aceh juga merujuk pada sebuah etnis suku bangsa yang mendiami wilayah paling barat Pulau Sumatra dan sebagian diaspora di Semenanjung Malaya, Eropa, Amerika Utara, Australia, dan Timur Tengah. Etnis Aceh memiliki bahasa Aceh yang dituturkan dan ditulis, merupakan sebuah bahasa dalam rumpun bahasa Chamik cabang dari rumpun bahasa Austronesia.²⁴

1.6. Kajian Kepustakaan

Untuk memahami proses integrasi nasional Indonesia di Aceh pada masa 1930 hingga 1945, penting untuk menelaah berbagai buku dan penelitian terdahulu yang membahas dinamika sosial, politik, dan ideologi pada masa tersebut. Kajian terhadap literatur-literatur ini menjadi dasar penting untuk melihat bagaimana gagasan Indonesia mulai diterima, diperdebatkan, dan paling sering, ditolak oleh rakyat Aceh.

Buku yang paling objektif dalam membahas latar belakang terjadinya proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh adalah karya Anthony Reid yang berjudul *Sumatra, Revolusi dan Elite Tradisional*. Buku ini tidak memihak pada kepentingan politik atau ideologi tertentu, dan memberikan gambaran yang utuh tentang perubahan pola pikir dan ideologi masyarakat Aceh. Reid menjelaskan bahwa elite tradisional di Sumatra, termasuk di Aceh, mulai kehilangan pengaruhnya seiring

²³BPS Provinsi Aceh, *Aceh dalam Angka 2023* (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik, 2023), hlm. 5.

²⁴R. A. Kern, *Catalogus van de Boeken en Geschriften over de Indische Talen* (Leiden: E. J. Brill, 1939), hlm. 97.

dengan semakin kuatnya dukungan elit baru terhadap gagasan nasionalisme Indonesia. Buku ini menjadi sumber yang sangat penting karena menyajikan data dan analisis yang luas serta disampaikan dengan cara yang netral dan mendalam.²⁵

Rusdi Sufi dalam *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900–1942)* membahas kemunculan organisasi-organisasi modern di Aceh seperti Sarekat Islam, Aceh Muda, dan Parindra. Organisasi-organisasi ini mulai memperkenalkan dan menyebarkan ide nasionalisme Indonesia di Aceh pada awal abad ke-20. Sufi menegaskan bahwa kesadaran keindonesiaan di Aceh berkembang melalui proses yang panjang dan tidak langsung. Proses ini sangat dipengaruhi oleh modernisasi dan kebijakan kolonial Belanda.²⁶

Zulkifli Amiruddin dan Suhartono dalam *Nasionalisme Aceh dan Nasionalisme Indonesia 1900–2007* memperluas kajian tentang bagaimana nasionalisme Indonesia berkembang di Aceh dan bagaimana ia berinteraksi dengan nasionalisme lokal. Buku ini menjelaskan bahwa integrasi nasional di Aceh terjadi melalui berbagai proses kompromi, adaptasi, dan paling sering perlawanan.²⁷

Irwan dan Bambang Purwanto dalam tesis *Nasionalisme Indonesia di Aceh: Persepsi Hasan Saleh dan Hasan Tiro, 1945–1970* membandingkan pandangan dua tokoh Aceh setelah kemerdekaan.²⁸ Hasan Saleh tetap mendukung nasionalisme Indonesia, sedangkan Hasan Tiro mulai mengembangkan gagasan nasionalisme

²⁵ Anthony Reid, *Sumatra, Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012).

²⁶ Rusdi Sufi, *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900–1942)* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998).

²⁷ Zulkifli Amiruddin dan Suhartono, Tesis: “*Nasionalisme Aceh dan Nasionalisme Indonesia 1900–2007*” (Yogyakarta: UGM, 2007).

²⁸ Irwan dan Bambang Purwanto, Tesis: “*Nasionalisme Indonesia di Aceh: Persepsi Hasan Saleh dan Hasan Tiro, 1945–1970*” (Yogyakarta: UGM, 2015).

Aceh yang berlandaskan sejarah kemuliaan bangsa Aceh di masa lalu. Kajian ini penting untuk menunjukkan bahwa penerimaan terhadap ide Indonesia di Aceh tidak sepenuhnya seragam dan membuka ruang bagi perdebatan dan perbedaan pendapat yang tajam.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat bab utama sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, dan sistematika penulisan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konteks dan arah penelitian yang dilakukan.

Bab II: Metodologi Penelitian dan Landasan Teoritis

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Selain itu, bab ini juga menguraikan teori-teori dan konsep yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III: Aceh sebelum Integrasi Nasional Indonesia: Kondisi Sosial, Budaya, Paradigma dan Aspek Ideologis

Bab ini menyajikan pembahasan tentang kondisi sosial, paradigma dan aspek ideologis rakyat Aceh sebelum terjadinya proses Integrasi Nasional Indonesia.

Bab IV: Konsep Integrasi Nasional Indonesia dan Prosesnya di Aceh

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Konsep Integrasi Nasional Indonesia dan proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh dalam konteks sejarah sosial dan kultural.

Bab V: Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji. Kesimpulan disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta menggambarkan hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.



BAB II

METODE PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah untuk mengkaji peristiwa masa lalu tentang integrasi nasional Indonesia di Aceh. Metode sejarah bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa secara sistematis, objektif, dan kritis. Penelitian sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan kejadian, tetapi bermaksud menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, konteks sosio-kulturalnya, pendeknya, secara mendalam hendak diadakan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual, serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang proses integrasi nasional di Aceh.²⁹

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, arsip, dan surat kabar, jurnal, dan sumber-sumber terpercaya lainnya baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Metode sejarah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

²⁹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia, 1993), hlm. 2.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Heuristik adalah tahap pertama dalam penelitian sejarah yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dan berhubungan langsung dengan topik penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber primer dan sekunder melalui studi pustaka. Sumber primer meliputi arsip resmi, dokumen pemerintahan, dan surat kabar yang memuat peristiwa terkait integrasi nasional di Aceh.³¹ Sumber sekunder berupa buku-buku sejarah, artikel ilmiah, jurnal, serta penelitian terdahulu yang membahas Aceh dan Integrasi Nasional. Pencarian dan pengumpulan sumber dilakukan di sejumlah tempat yang diyakini menyimpan arsip-arsip resmi sebagai sumber primer, diantaranya adalah Arsip Wilayah Provinsi Aceh, Perpustakaan wilayah Provinsi Aceh, Arsip Digital Universitas Leiden, Bank Arsip Digital Surat Kabar Sejarah Delpher, Arsip Digital Organisasi Pemerintahan Belanda (Repository Overheid.nl), katalog Akses Publik Online Perpustnas RI dan Perpustakaan Digital JStor. Semua data dikumpulkan secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber terkumpul, tahap selanjutnya adalah melakukan kritik sumber. Kritik sumber bertujuan untuk menilai keaslian, keabsahan, dan keakuratan

³⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, hlm. 20.

³¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

setiap sumber yang telah ditemukan. Kritik sumber dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.³²

Kritik ekstern dilakukan untuk memastikan keaslian fisik dokumen, seperti memeriksa tahun penerbitan, asal dokumen, identitas penulis, dan latar belakang sumber. Langkah ini penting untuk menghindari penggunaan dokumen yang tidak valid atau meragukan. Selanjutnya, kritik intern dilakukan untuk menilai isi dokumen secara mendalam.³³ Peneliti memeriksa keakuratan informasi yang terkandung dalam sumber, menilai objektivitas penyusun sumber, serta membandingkan isi sumber dengan sumber lain yang relevan untuk menghindari bias.

Melalui proses kritik yang teliti, penulis dapat memilah dan memilih sumber-sumber yang layak, kredibel, dan relevan dengan fokus penelitian. Tahap ini menjadi penting untuk menjaga validitas hasil penelitian dan memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar dapat dipercaya.

3. Interpretasi dan Historiografi

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah ini adalah interpretasi dan historiografi. Interpretasi merupakan kegiatan menganalisis dan menafsirkan data yang telah melalui proses kritik sumber untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap fakta-fakta sejarah.³⁴ Pada tahap ini, penulis tidak hanya menyusun fakta-fakta sejarah secara kronologis, tetapi juga berupaya menjelaskan peristiwa yang

³² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 22.

³³ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 42.

³⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 78–82.

diteliti melalui analisis terhadap hubungan sebab dan akibat (kausal), kondisi-kondisi yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa, serta konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi jalannya proses sejarah.³⁵

Selain itu, interpretasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai komponen yang membentuk proses Integrasi Nasional, seperti kebijakan pemerintah yang berkuasa, dinamika masyarakat, kondisi wilayah Aceh, serta eksponen yang berperan sebagai aktor penggerak. Eksponen tersebut berasal dari pemerintah, elite politik, tokoh masyarakat, maupun kelompok-kelompok sosial yang terlibat dalam proses Integrasi Nasional.³⁶ Melalui analisis tersebut, penulis berupaya memahami makna setiap peristiwa, menjelaskan keterkaitan antarfakta sejarah, menghubungkan berbagai faktor yang memengaruhi proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh, serta membandingkan berbagai sumber yang telah dikritisi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, rasional, dan objektif.³⁷

Penafsiran dilakukan secara cermat dengan berlandaskan bukti-bukti sejarah yang telah diuji melalui kritik sumber, sehingga setiap kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris yang dapat dipertanggungjawabkan.³⁸ Dalam proses interpretasi, penulis berusaha menjaga objektivitas dengan menghindari penilaian yang bersifat subjektif maupun presentisme, yaitu kecenderungan menilai

³⁵ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), hlm. 67–71; Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 89–93.

³⁶ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 39–47.

³⁷ Sjamsuddin, Heliuss, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 121–130.

³⁸ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hlm. 72–75.

peristiwa masa lalu berdasarkan nilai-nilai atau sudut pandang masa kini.³⁹ Sebaliknya, setiap peristiwa dipahami sesuai dengan konteks zamannya, sehingga interpretasi yang dihasilkan mampu memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai dinamika, kompleksitas, dan makna historis dari proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh.⁴⁰

Setelah proses interpretasi selesai, tahap berikutnya adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk karya tulis sejarah yang sistematis, kronologis, logis, dan ilmiah.⁴¹ Historiografi tidak sekadar menyajikan rangkaian peristiwa secara berurutan, melainkan juga menyusun hasil interpretasi ke dalam suatu narasi sejarah yang mampu menjelaskan hubungan antarfakta, keterkaitan sebab-akibat, serta perubahan dan kesinambungan yang terjadi sepanjang proses sejarah.⁴² Dalam tahap ini, penulis mengorganisasikan hasil penelitian berdasarkan urutan waktu dan tema pembahasan, kemudian memaparkannya dengan bahasa ilmiah yang jelas, komunikatif, dan mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan analisis.⁴³ Melalui tahap historiografi, hasil analisis disusun secara sistematis dalam bentuk narasi sejarah untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh. Gambaran tersebut meliputi latar belakang, kondisi sosial, politik, budaya, eksponen, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Aceh dan perkembangan bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁴⁴

³⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 95–98.

⁴⁰ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm. 130–136.

⁴¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 99–104.

⁴² Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm. 137–146.

⁴³ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hlm. 76–82.

⁴⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 102–110.

2.2. Landasan Teori

1. Teori Integrasi Nasional - Karl W. Deutsch

Karl W. Deutsch dalam bukunya *Political Community and the North Atlantic Area* menjelaskan bahwa integrasi nasional adalah proses sosial yang terjadi ketika terdapat peningkatan komunikasi, interaksi, dan pertukaran antar kelompok yang berkelanjutan. Deutsch menulis, “*A people are integrated to the extent that they mutually communicate and cooperate with each other*”⁴⁵ yang berarti “Suatu masyarakat dikatakan terintegrasi sejauh mereka saling berkomunikasi dan bekerja sama satu sama lain”. Dengan kata lain, semakin intens komunikasi dan kerja sama antar kelompok, semakin besar peluang terwujudnya integrasi nasional yang stabil.

Deutsch menekankan bahwa integrasi dimulai ketika terbangunnya kesadaran bersama yang mengarah pada rasa saling membutuhkan dan saling percaya antar komunitas. Dalam penelitian ini, teori Deutsch membantu menjelaskan bagaimana rakyat Aceh, yang sebelumnya terisolasi dalam identitas keacehan yang kuat, mulai terhubung dengan gagasan nasionalisme Indonesia melalui berbagai jalur komunikasi sosial, politik, dan ekonomi yang semakin terbuka pada masa kolonial dan revolusi kemerdekaan Indonesia.

2. Teori Warisan Kolonial - Benedict Anderson

Benedict Anderson dalam *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* menegaskan bahwa sebagian besar negara

⁴⁵ Karl W. Deutsch, *Political Community and the North Atlantic Area* (Princeton: Princeton University Press, 1957), hlm. 6.

modern pasca kolonial mewarisi batas-batas administratif dan struktur pemerintahan yang dibentuk oleh penjajah. Anderson menulis, “*The boundaries of most post-colonial states follow the administrative borders created by colonial powers*”⁴⁶ yang berarti ‘Batas-batas sebagian besar negara pasca kolonial mengikuti garis administratif yang dibuat oleh kekuatan kolonial’. Pernyataan ini menunjukkan bahwa integrasi nasional di banyak negara bukanlah murni berasal dari identitas etnis masyarakat, tetapi melanjutkan struktur yang telah dirancang oleh kekuasaan kolonial.

Anderson juga memperkenalkan konsep bahwa bangsa adalah “komunitas yang diimajinasikan” (*imagined communities*). Ia menulis, “*It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, yet in the minds of each lives the image of their communion,*” yang berarti “Nasionalisme merupakan imajinasi karena anggota-anggota dari bahkan bangsa yang paling kecil sekalipun tidak akan pernah mengenal sebagian besar sesamanya, namun imajinasi tentang kebersamaan, hidup dalam benak masing-masing mereka”. Dalam konteks Indonesia, termasuk Aceh, nasionalisme Indonesia yang terbentuk merupakan hasil dari imajinasi kolektif yang sebagian besar dibentuk oleh sistem kolonial yang sudah ada, termasuk birokrasi, sistem pendidikan, dan media cetak yang disebarkan oleh penjajah.

⁴⁶ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 2006), hlm. 121.

3. Teori Hegemoni – Antonio Gramsci

Antonio Gramsci dalam *Selections from the Prison Notebooks* menjelaskan bahwa kekuasaan yang efektif tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer atau hukum, tetapi juga melalui hegemoni, yaitu dominasi ideologi yang diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar dan sah. Gramsci menulis, “*The supremacy of a social group manifests itself in two ways, as domination and as intellectual and moral leadership.*”⁴⁷ Yang berarti, supremasi suatu kelompok sosial terwujud dalam dua bentuk, yaitu sebagai dominasi dan sebagai kepemimpinan intelektual serta moral (hegemoni).

Hegemoni bekerja melalui pendidikan, media massa, bahasa, dan sistem hukum yang membentuk kesadaran masyarakat. Pada masa kolonialisme Belanda, penguasa membentuk sistem pemikiran baru yang membuat masyarakat tunduk secara sukarela. Dalam kasus Aceh, hegemoni kolonial Belanda tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga membentuk pola pikir rakyat Aceh melalui pendidikan modern, sistem administrasi kolonial, dan pengenalan nilai-nilai baru yang tanpa disadari sebenarnya bertentangan dengan nilai Islam yang sebelumnya dominan.

Gramsci menambahkan, “*Every relationship of hegemony is necessarily an educational relationship.*”⁴⁸ Artinya, kekuasaan hegemonik selalu bekerja melalui pembentukan kesadaran yang diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran baru. Hal ini menjadi relevan dalam menjelaskan bagaimana ide sebagai warga Hindia

⁴⁷ Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Notebooks* (New York: International Publishers, 1971), hlm. 57.

⁴⁸ Ibid.

Belanda yang kemudian berubah menjadi nasionalisme Indonesia perlahan diterima oleh sebagian masyarakat Aceh.

4. Teori Sekularisasi – Peter L. Berger

Peter L. Berger dalam *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* menjelaskan bahwa sekularisasi adalah proses di mana institusi-institusi agama kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Berger menulis, “*The process of secularization implies that sectors of society and culture are removed from the domination of religious institutions and symbols.*”⁴⁹ Artinya, Proses sekularisasi mengandung makna bahwa berbagai sektor kehidupan masyarakat dan kebudayaan dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga serta simbol-simbol keagamaan. Dalam konteks Aceh, yang sebelumnya menempatkan agama sebagai dasar pemerintahan, proses sekularisasi yang dipaksakan oleh kolonialisme Belanda dan diteruskan oleh pemerintahan Indonesia mulai mengubah paradigma tersebut. Berger menulis lebih lanjut, “*The pluralistic situation undermines the plausibility of the traditional religious worldview.*”⁵⁰ Artinya, situasi keberagaman akan mengikis keyakinan masyarakat akan sudut pandang (paradigma) keagamaan yang tradisional.

5. Teori Post-Kolonialisme dan Sekularisasi – Perspektif Malik Bennabi

Malik Bennabi, seorang pemikir Muslim asal Aljazair, banyak menyoroti dampak kolonialisme terhadap mentalitas umat Islam. Dalam berbagai karyanya,

⁴⁹ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1967), hlm. 107.

⁵⁰ Ibid., hlm. 133.

khususnya *Les Conditions de la Renaissance* dan *The Question of Culture*, Bennabi menjelaskan bahwa kolonialisme telah menciptakan “*post-colonial mentality*” atau mentalitas pasca-penjajahan yang melemahkan umat Islam dari dalam. Bennabi menulis, “*Colonization is not just about occupying lands; it is about occupying minds.*”⁵¹ Secara harfiah diterjemahkan, “Kolonisasi tidak hanya menguasai tanah, akan tetapi juga menguasai pikiran”.

Salah satu dampak utama yang dikritik oleh Bennabi adalah masuknya sekularisme ke dalam kehidupan umat Islam sebagai warisan kolonial. Dalam pandangan Bennabi, umat Islam mulai memisahkan agama dari politik, pendidikan, dan budaya sehari-hari karena terpengaruh oleh model negara dan sistem sosial yang dibawa oleh kolonialis. Bennabi menulis, “*The secularization of the Muslim world was not the product of its own internal evolution, but rather the result of the cultural invasion imposed by colonization.*”⁵² Artinya, Sekularisasi dunia Islam bukanlah hasil dari evolusi internalnya sendiri, melainkan akibat dari invasi budaya yang dipaksakan melalui kolonialisasi. Menurut Bennabi, setelah kolonialisme fisik berakhir, umat Islam justru mengalami apa yang ia sebut “*colonizability*” atau kerentanan untuk dijajah secara pemikiran. Mereka mengadopsi sistem-sistem kolonial yang sekuler tanpa melakukan kritik, sehingga pola pikir kolonial tetap hidup dalam masyarakat yang secara politik sudah merdeka.

Bennabi juga menegaskan bahwa umat Islam mengalami “*intelektual stagnation*” yang membuat mereka menerima ideologi-ideologi Barat seperti

⁵¹ Malik Bennabi, *Les Conditions de la Renaissance* (Paris: Editions Seuil, 1949), hlm. 25.

⁵² Malik Bennabi, *The Question of Culture* (Cairo: Dar Al Fikr, 1954), hlm. 74.

sekularisme sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak perlu dipertanyakan. Ia menulis, *“The Muslim world suffers not because it is colonized, but because it is colonizable.”*⁵³ Secara harfiah berarti “Dunia Islam menderita bukan karena dijajah, melainkan karena berada dalam keadaan yang memungkinkan untuk dijajah.”



⁵³ Ibid., hlm. 119.

BAB III

ACEH SEBELUM INTEGRASI NASIONAL INDONESIA: KONDISI SOSIAL, BUDAYA, PARADIGMA, DAN ASPEK IDEOLOGIS

3.1. Asal Usul dan Perkembangan Awal Bangsa Aceh

Wilayah Aceh merupakan bagian penting dari kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan ‘Tanah di Bawah Angin’.⁵⁴ Sekitar 15.000 tahun yang lalu, kawasan ini masih terhubung dengan daratan utama Asia akibat rendahnya permukaan laut. Ketika laut mulai naik, daratan terpisah menjadi kepulauan seperti yang dikenal sekarang, termasuk Sumatra, tempat Aceh berada.⁵⁵

Geografi Aceh yang didominasi pantai, sungai besar, dan hutan tropis membentuk pola hidup masyarakatnya yang dekat dengan laut dan sungai. Letaknya di ujung barat Sumatra membuat Aceh menjadi gerbang penting jalur pelayaran Samudra Hindia sejak zaman kuno. Catatan Tiongkok dari Dinasti Han dan peta Ptolemaeus sudah menyebutkan jalur perdagangan yang melibatkan

⁵⁴ Tanah di Bawah Angin adalah istilah historis yang digunakan oleh Bangsa Aceh, India, Persia, Arab, dan Melayu untuk menyebut wilayah Asia Tenggara kepulauan (Asia Maritim). Kawasan ini meliputi kepulauan yang ada di sekitar Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, termasuk wilayah yang sekarang menjadi negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, serta beberapa negara di semenanjung Malaya. Sepanjang sejarah, kawasan ini menjadi jalur persinggahan dan pertemuan antara peradaban besar dunia seperti India, Tiongkok, dan juga pusat penting dalam jaringan perdagangan global. Bangsa Cina menyebut kawasan ini dengan istilah “Laut Selatan” (*Nanyang*). Pada puncak kejayaannya sultan-sultan Aceh mengklaim bahwa mereka adalah penguasa negri-negri Tanah Di Bawah Angin. Sumber: Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680: Volume One: The Lands below the Winds* (New Haven & London: Yale University Press, 1988), hlm. 1–5. Sumber lainnya: Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya, *A History of Malaysia* (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2001), hlm. 39.

⁵⁵ O. W. Wolters, *History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1999), hlm. 20–21.

wilayah yang kini menjadi Aceh, termasuk Barus yang terkenal sebagai penghasil kapur barus.⁵⁶

Bangsa Aceh berasal dari rumpun Austronesia yang bermigrasi ke Sumatra sejak masa Neolitikum sekitar 3000 SM. Gelombang pertama dikenal sebagai proto-Melayu, disusul gelombang kedua, deutro-Melayu, yang membawa teknologi logam sekitar 500 SM. Proses migrasi ini membentuk masyarakat awal Aceh yang kemudian berkembang menjadi entitas etnis tersendiri.⁵⁷

Kajian linguistik menunjukkan bahwa bahasa Aceh termasuk dalam rumpun Austronesia, khususnya cabang Chamik, yang secara unik berkaitan dengan bahasa-bahasa di Vietnam bagian selatan dan Kamboja bagian timur. Bahasa Aceh diduga merupakan cabang tertua dari bahasa Chamik, bahkan lebih awal dari bahasa Cham yang berkembang di daratan Asia Tenggara.⁵⁸

Analisis bahasa menunjukkan pengaruh besar dari bahasa Mon-Khmer, yang menandakan bahwa leluhur orang Aceh kemungkinan sempat tinggal lama di wilayah pesisir Indochina sebelum bermigrasi ke Sumatra. Banyak kosakata dasar dalam bahasa Aceh yang berasal dari pinjaman Mon-Khmer. Diperkirakan migrasi ke Sumatra terjadi pada abad ke-8 M, seiring kemunduran kerajaan Funan di Asia Tenggara.⁵⁹

⁵⁶ Paul Wheatley, *The Golden Khersonese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula before A.D. 1500* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1961), hlm. 71–75.

⁵⁷ Leonard Y. Andaya, *The Kingdom of Aceh: Conflict and Diplomacy under the Sultan Iskandar Muda, 1607–1636* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 2007), hlm. 8–9.

⁵⁸ Paul Sidwell, “Dating the Chamic Diaspora: A Proposal Based on Lexical Borrowing and Morphological Innovation,” *Mon-Khmer Studies* 33 (2003): hlm. 125–126.

⁵⁹ Paul Sidwell, “The Austroasiatic and Austronesian Contact in the Chamic Lexicon,” *Mon-Khmer Studies* 34 (2004): hlm. 63–65.

Sebelum era peradaban Islam, masyarakat Aceh menjalani kehidupan sosial dalam komunitas-komunitas kecil yang egaliter dan tersebar. Mereka mengandalkan sungai dan laut sebagai jalur transportasi serta sebagai sumber kehidupan. Rumah panggung menjadi ciri khas arsitektur mereka, disesuaikan dengan lingkungan berair dan ancaman hewan liar.⁶⁰ Kehidupan pesisir juga memberi akses akan perdagangan. Pelabuhan seperti Lamuri tercatat sebagai pusat perdagangan penting yang dikunjungi pedagang Arab, India, Persia, dan Tiongkok pada era ini. William Marsden menyebut bahwa kawasan ini menjadi simpul pertemuan budaya dan ekonomi sejak masa awal.⁶¹

3.2. Era Awal Peradaban Islam di Aceh

Menurut catatan Tiongkok dari Dinasti Tang, sejak tahun 674 M telah terdapat komunitas muslim di pantai barat Sumatra. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa sejarawan muslim dan orientalis yang menandai kehadiran awal Islam di Asia Maritim yang terjadi melalui aktivitas pedagang muslim dari Arab, Parsi, dan Gujarat. Mereka bermukim di pesisir-pesisir strategis dan menjalin hubungan dengan penduduk lokal melalui perdagangan dan pernikahan.⁶² Keberadaan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Perlak (Peureulak) memungkinkan interaksi yang intens antara masyarakat tempatan dan pedagang Muslim yang membawa ajaran Islam bersama komoditas dagang mereka.⁶³

⁶⁰ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: The Lands Below the Winds* (New Haven: Yale University Press, 1988), hlm. 21–23.

⁶¹ William Marsden, *The History of Sumatra* (London: Thomas Payne, 1783), hlm. 112–115.

⁶² H.M. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I (Medan: PT Waspada, 1981), hlm. 53.

⁶³ Ibid., hlm. 57.

Selain melalui jalur perdagangan, proses islamisasi di wilayah Aceh juga berkaitan erat dengan dinamika politik di pusat kekhalifahan Islam. Pada abad ke-8 dan ke-9 M, terjadi ketegangan politik dan konflik terbuka antara kelompok Syiah dengan pemerintahan Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Syiah, yaitu kelompok yang setia kepada keturunan Ali bin Abi Thalib, mengakibatkan banyak tokohnya mengalami represi dan penindasan politik.⁶⁴

Kondisi ini mendorong migrasi kelompok Syiah ke wilayah-wilayah yang lebih aman dan jauh dari pengaruh kekuasaan Abbasiyah. Salah satu tujuan utama migrasi ini adalah wilayah Asia Maritim, khususnya pesisir utara Sumatra di Perlak.⁶⁵

Sekitar tahun 840 M, kelompok ini berhasil mendirikan Negara Islam pertama di Asia Tenggara yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Perlak, dengan pendirinya adalah Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Shah, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib yang ayahnya telah menetap di Perlak sejak setengah abad sebelumnya. Ibukota negara ini bernama Bandar Khalifah, sebagai bentuk penghormatan terhadap klaim ayah Sultan sebagai Khalifah dari kelompok Syiah Ali ketika hidup di Kota Makkah.⁶⁶

Kesultanan Perlak terletak di pesisir timur Aceh, di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Aceh Timur. Perlak menguasai jalur perdagangan yang

⁶⁴ Ali Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 52.

⁶⁵ Ali Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, hlm. 54.

⁶⁶ Ali Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, hlm. 56.

strategis. Wilayah kekuasaannya mencakup pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatra yang menjadi titik singgah kapal dagang dari Gujarat, Persia, dan Jazirah Arab. Kesultanan ini berlangsung sejak tahun 840 M hingga sekitar awal abad ke-13 M, saat pengaruhnya mulai digantikan oleh Samudera Pasai. Pemerintahannya berbentuk teokrasi Islam, dimana kekuasaan politik berada di tangan sultan sebagai kepala negara dan agama.⁶⁷

Dalam aspek sosial budaya, bahasa Arab mulai dikenal dalam tradisi tulis dan lembaga-lembaga keagamaan seperti madrasah dan masjid menjadi pusat pendidikan dan kehidupan sosial. Perkawinan antara penduduk lokal dengan para pendatang Arab-Parsi mempercepat proses islamisasi masyarakat setempat.⁶⁸ Kesultanan ini meletakkan fondasi intelektual dan politik yang kemudian diteruskan oleh kesultanan-kesultanan penerus seperti Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam.

3.3. Aceh Era Kesultanan-Kesultanan Abad Ke-13 sampai Ke-16

Sebelum tahun 1520, wilayah pesisir utara Sumatra merupakan tempat berdirinya sejumlah pemerintahan maritim yang merdeka dan berdaulat. Tiap-tiap pemerintahan, seperti Pasai, Pidie, dan Lamri, memiliki struktur kekuasaan dan adatnya sendiri, tanpa tunduk satu kepada yang lain.⁶⁹ Catatan pelancong asing

⁶⁷ Ali Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, hlm. 57.

⁶⁸ Ali Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, hlm. 60.

⁶⁹ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce* (New Haven: Yale University Press, 1988), hlm. 102–104.

seperti Marcopolo yang singgah pada tahun 1292, menyebut adanya delapan negara di utara Sumatra yang masing-masing memiliki bahasanya sendiri.⁷⁰

Kesultanan Samudra Pasai merupakan yang paling menonjol dalam deretan kesultanan di wilayah Aceh sebelum penyatuan politik atas nama Aceh Darussalam. Samudra Pasai didirikan sekitar tahun 1267 di atas sisa-sisa Kesultanan Perlak yang telah lebih dahulu eksis sejak awal abad ke-9 dan dikenal sebagai kesultanan Islam pertama di Asia Tenggara. Malik al-Saleh sebagai pendiri Pasai melanjutkan misi Islamisasi yang telah dirintis Perlak. Di bawah penerusnya, Pasai berkembang menjadi salah satu pelabuhan paling aktif di Selat Malaka. Pasai menerbitkan mata uang emas (dinar), dan wilayah kekuasaannya mencakup sebagian besar pantai utara Aceh hingga ke kawasan Nakur dan sekitarnya, mengontrol lalu lintas pelayaran strategis di perairan internasional.⁷¹

Sebagai simpul maritim yang penting, Pasai menjalin relasi dengan Gujarat, Mesir, hingga Cina. Catatan perjalanan Ibnu Batutah pada tahun 1345 mengonfirmasi bahwa Pasai telah memiliki sistem hukum Islam, para ulama yang berwibawa, lembaga pendidikan, serta struktur sosial yang berlandaskan syariat.⁷² Pada saat yang sama, pelabuhan-pelabuhan lain di kawasan Sumatra mulai tumbuh dan saling bersaing.

⁷⁰ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680, Jilid I: Tanah di Bawah Angin* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 3–7.

⁷¹ H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I (Medan: Harian Waspada, 1981), hlm. 83–85; Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680, Jilid I: Tanah di Bawah Angin* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 209.

⁷² Ibn Battuta dalam catatannya yang dikutip oleh H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, hlm. 87; Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga, Jilid II*, hlm. 189–190.

Di sebelah barat laut, kesultanan Lamuri dikenal sejak abad ke-9 sebagai salah satu titik pelayaran awal yang disebut dalam naskah Arab dan Tiongkok. Wilayahnya mencakup kawasan Aceh Besar modern, termasuk jalur pesisir dan pedalaman yang strategis. Lamuri memainkan peran sebagai salah satu wilayah kontak awal antara dunia luar dan Sumatra, terutama sebelum dominasi Pasai. Ia dikenal sebagai penghasil kayu wangi, emas, dan budak, serta menjadi target ekspedisi Rajendra Cola dari India Selatan pada abad ke-11. Meskipun tidak banyak data konkret tentang struktur pemerintahan Lamuri, namun kehadirannya yang bertahan lama menunjukkan kapasitas adaptifnya terhadap tekanan regional dan global.⁷³ Wilayah kekuasaan Lamuri mencakup jalur pantai barat hingga hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke Teluk Krueng Raya.⁷⁴

Kesultanan Pedir, yang muncul kuat pada abad ke-14 dan mencapai puncaknya pada abad ke-15, merupakan kekuatan regional penting di wilayah yang kini mencakup Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. Pusat kekuasaannya berada di pelabuhan Sigli, yang menjadi titik perdagangan lada, hasil hutan, dan emas. Pedir juga tercatat dalam laporan Portugis sebagai kerajaan yang memiliki interaksi dengan bangsa asing sebelum akhirnya menjadi sasaran ekspansi kesultanan yang lebih besar pada akhir abad ke-16.⁷⁵

⁷³ H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, hlm. 66–68; Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga*, Jilid I, hlm. 6–7.

⁷⁴ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*, Jilid I: *Tanah di Bawah Angin* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 3–7; H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, hlm. 66–67.

⁷⁵ H. Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid I, hlm. 130–133.

3.4. Kebangkitan Kesultanan Aceh Darussalam dan Puncak Kejayaan

Sebelum bangsa Eropa mampu berlayar langsung ke Asia, jaringan perdagangan Islam telah lama membentang dari pesisir Laut Merah dan Teluk Persia, melewati India, hingga mencapai Asia Maritim. Sejak abad ke-13, pedagang Muslim dari Gujarat, Bengal, Yaman, dan Mesir menguasai jaringan perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan logam mulia, serta menghubungkan Asia Maritim dengan dunia Islam yang lebih luas.⁷⁶

Selain maritim, jalur perdagangan darat yang dikenal sebagai Jalur Sutra telah menjadi penghubung utama antara Tiongkok, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan seperti sutra, rempah-rempah, dan keramik, tetapi juga menjadi saluran pertukaran intelektual, teknologi, dan agama. Namun, pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, jalur ini mulai terganggu karena konflik politik di Asia Tengah. Penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmani pada 1453 juga mempersulit akses bangsa Eropa ke Timur karena Utsmani kini mengontrol sebagian besar jalur perdagangan darat menuju Asia.⁷⁷

Hambatan ini mendorong bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol untuk mencari jalur laut langsung ke Asia. Keinginan untuk memperoleh rempah-rempah, emas, dan komoditas Asia lainnya tanpa perantara Muslim dan pedagang Italia menjadi pendorong utama eksplorasi maritim. Secara politik, Eropa sedang

⁷⁶ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*, Jilid I: *Tanah di Bawah Angin* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 3–5.

⁷⁷ Peter Frankopan, *The Silk Roads: A New History of the World* (London: Bloomsbury, 2015), hlm. 197–201.

berada dalam fase konsolidasi negara-bangsa dan kebangkitan kerajaan Katolik yang juga dipengaruhi oleh semangat Perang Salib untuk mengalahkan Islam secara ekonomi dan militer.⁷⁸

Sebelum keberhasilan Vasco da Gama mencapai India pada 1498, bangsa Portugis menghadapi berbagai hambatan serius dalam dunia pelayaran. Mereka kekurangan pengetahuan astronomi, pemetaan, dan belum mampu membangun kapal yang kuat untuk menghadapi samudra terbuka. Namun, dorongan untuk mengakses langsung sumber rempah dan emas, mendorong Portugal berinvestasi besar-besaran dalam eksplorasi maritim.⁷⁹

Dengan dukungan teknologi seperti kompas, astrolab, dan pengembangan kapal jenis karavel, serta riset dari pusat pelatihan maritim di Sagres, Portugal berhasil mengatasi keterbatasan tersebut.⁸⁰ Pencapaian pelayaran ke India membuka jalan bagi intervensi langsung mereka di jalur rempah-rempah yang sebelumnya dikuasai oleh jaringan Muslim. Keberhasilan Portugis menguasai Malaka pada 1511 memberi mereka posisi strategis di jalur pelayaran utama dari Asia Maritim ke India dan Timur Tengah. Ini memungkinkan mereka untuk mengenakan pajak dan memblokir pelayaran pedagang Muslim yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan lintas Samudra Hindia.⁸¹

⁷⁸ Felipe Fernández-Armesto, *Pathfinders: A Global History of Exploration* (New York: W. W. Norton, 2006), hlm. 62–66.

⁷⁹ Ibid., hlm. 78–81.

⁸⁰ Sanjay Subrahmanyam, *The Portuguese Empire in Asia, 1500–1700: A Political and Economic History* (London: Longman, 1993), hlm. 45–47.

⁸¹ M.A.P. Meilink-Roelofs, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1962), hlm. 112–115.

Penguasaan Portugis atas Malaka dan blokade di pantai barat India secara efektif mengacaukan pengapalan lada dari pelabuhan-pelabuhan Islam di Sumatra dan India ke Mesir dan kawasan Timur Tengah lainnya. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya persatuan di antara kesultanan-kesultanan di Sumatra bagian utara untuk membentuk identitas nasional dan kebangsaan yang lebih besar.⁸² Perubahan besar terjadi ketika Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Lamuri. Antara tahun 1520 hingga 1524, ia menaklukkan wilayah-wilayah di pesisir utara dan barat Sumatra, membentuk Kesultanan Aceh Darussalam.⁸³ Setelah mengalahkan Portugis, Aceh telah berhasil menciptakan stabilitas di kawasan Asia Maritim dan membendung pengaruh Barat selama beberapa abad.⁸⁴

3.4.1. Awal Kebangkitan Politik dan Militer Aceh di Tingkat Global

Kebangkitan militer dan politik Kesultanan Aceh bermula di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar (1539–1571). Aceh berhasil memperluas wilayahnya ke Aru di pesisir timur dan Pariaman di pantai barat Sumatra, sekaligus memperkuat kontrol atas jalur perdagangan regional. Sultan Alauddin juga menghidupkan kembali perdagangan Islam di Laut Merah, menghubungkan Banda Aceh dengan pelabuhan-pelabuhan penting dunia Islam. Menurut laporan Portugis, pada 1564, sebanyak 23 kapal Islam dari Aceh

⁸² Denys Lombard, *Le Sultanat d'Atjeh au temps d'Iskandar Muda* (Paris: École Française d'Extrême-Orient, 1967), hlm. 25–27.

⁸³ A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 207–210.

⁸⁴ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*, Jilid I: *Tanah di Bawah Angin* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 74–78. Lihat juga Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 95–97.

mengangkut 90 ton lada dan 3.000 kuintal rempah lainnya ke Jeddah, menyaingi jalur perdagangan Portugis.⁸⁵ Hubungan strategis dengan Kesultanan Turki Utsmani menjadi kunci penguatan militer Aceh. Dukungan Turki berupa artileri, teknisi militer, dan model organisasi pasukan mempercepat modernisasi militer Aceh. Inisiatif hubungan ini datang dari Aceh yang aktif mengirimkan utusan ke Istanbul untuk membangun persekutuan Islam melawan Portugis. Sultan Suleiman I merespons positif dengan mengirimkan bantuan militer dan teknisi.⁸⁶

Setelah wafatnya Sultan Alauddin, Sultan Ali Riayat Syah (1571–1578) melanjutkan upaya solidaritas Islam dengan memperkuat diplomasi regional. Salah satu tindakannya adalah mengirimkan meriam besar Turki kepada Kesultanan Johor sebagai tanda aliansi melawan Portugis. Pada 1573, Aceh memimpin upaya koalisi dengan menginstruksikan Ratu Jepara bergabung menyerang Malaka. Meski serangan Jepara terlambat, diplomasi Aceh menciptakan hubungan erat dengan Johor dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.⁸⁷ Upaya Aceh membangun front internasional Islam sebenarnya penuh kendala. Rivalitas dagang, perbedaan kepentingan, dan lemahnya solidaritas di antara kerajaan-kerajaan Islam sering menghambat penyatuan kekuatan. Meskipun demikian, selama dua dekade sejak 1560-an, Aceh tetap menjadi pusat pergerakan Islam melawan penjajahan Kristen Eropa. Aceh secara konsisten mengirimkan bantuan, membangun komunikasi

⁸⁵ Diogo do Couto, *Decadas da Ásia*, vol. III (Lisboa: Regia Officina Typografica, 1788), hlm. 178.

⁸⁶ Diogo do Couto, *Decadas da Ásia*, vol. III, hlm. 179.

⁸⁷ Peter Borschberg, *The Singapore and Melaka Straits: Violence, Security and Diplomacy in the 17th Century* (Singapore: NUS Press, 2010), hlm. 63–65.

dengan Turki Utsmani, dan menjalin kontak dengan pusat-pusat kekuatan Islam di India dan Laut Merah.⁸⁸

Setelah wafatnya Sultan Ali Riayat Syah, Aceh memasuki masa krisis politik. Antara 1571 hingga 1589, kekuasaan Aceh dikuasai oleh para elit kaya dan bangsawan dalam sistem oligarki. Lima sultan naik dan turun tahta, sebagian besar digulingkan oleh kekuatan *orangkaya* dan hulubalang yang memegang kekuasaan *de facto*. Augustin de Beaulieu, seorang jenderal Prancis yang pernah tinggal di Banda Aceh, mencatat bahwa para bangsawan dapat menggulingkan sultan kapan saja jika kepentingan mereka terganggu.⁸⁹

Krisis ini berakhir dengan naiknya Sultan Alauddin Riayat Syah Sayyid al-Mukammil pada 1589. Ia merebut kembali kekuasaan pusat dengan membatasi hak para bangsawan, melarang kepemilikan senjata pribadi, serta memperketat pengawasan terhadap pembangunan rumah batu dan artileri. Tindakan ini memulihkan wibawa istana dan menghentikan dominasi oligarki. Konsolidasi kekuasaan yang dilakukan Sayyid al-Mukammil menjadi fondasi bagi masa kejayaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607–1636), yang membawa Aceh mencapai puncak kejayaannya sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara.⁹⁰

⁸⁸ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 121–125.

⁸⁹ Augustin de Beaulieu, *Relation Journalière du Voyage de l'Armée Française dans l'Archipel Indien, 1621–1622*, dalam Charles Boxer (ed.), *French Commanders in the Far East 1621–1626* (London: Hakluyt Society, 1951), hlm. 11–12.

⁹⁰ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 121–125.

3.4.2. Zaman Keemasan Aceh, Masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda Yang Agung⁹¹ (1607–1636)

Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda menandai titik puncak kejayaan Kesultanan Aceh. Dalam kurun waktu 1607 hingga 1636, Aceh memiliki sistem pemerintahan yang terpusat dan rapi, kekuatan militer yang tangguh, dan kejayaan ekonominya.⁹² Kesultanan Aceh berdiri sebagai kekuatan maritim paling dominan di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya mencakup hampir seluruh pesisir timur dan barat Sumatra, sebagian besar Semenanjung Malaya, dan sejumlah pelabuhan penting di pesisir utara Sumatra. Dengan armada laut besar dan pelabuhan utama di Banda Aceh, kesultanan Aceh menguasai jalur utama perdagangan antara dunia Timur dan Barat. Selat Malaka, yang menjadi penghubung dunia Barat dan Timur kala itu, praktis berada dalam kendali Kesultanan Aceh. Kapal-kapal dari Arab, Gujarat, Cina, dan Eropa tak bisa melintas tanpa berurusan dengan pelabuhan dan penguasa Aceh.⁹³

Kota Banda Aceh menjadi tempat singgah wajib bagi para pedagang yang ingin mengakses kekayaan rempah dan jalur selat Malaka. Pada masa ini, Aceh merupakan salah satu kekuatan internasional yang unggul dalam hal armada dan militer. Armada Aceh lebih tangguh dari armada negara-negara Eropa. Kapal-kapal

⁹¹ Denys Lombard, dalam pendahuluan bukunya *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, menulis: “. . . masa bertakhtanya Sultan Iskandar Muda yang Agung”.

⁹² Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)*, (Jakarta: KPG, 2006), hlm. 83–91.

⁹³ Leonard Y. Andaya, *The Kingdom of Aceh* (Ithaca: Cornell University Press, 2001), hlm. 85–89.

perangnya lebih besar dan dipersenjatai lebih banyak meriam dari berbagai ukuran.⁹⁴

Militer dan artileri Aceh pada masa ini juga mencapai puncaknya dalam hal produksi, kekuatan dan organisasi. Menurut Lombard, sudah berlalu era Sultan Aceh mengirim utusan ke Turki Utsmani untuk membeli meriam dan artileri lainnya. Sekarang saatnya bangsa Eropa, khususnya bangsa Portugis terheran-heran melihat ukuran meriam yang diproduksi di Aceh. Salah satu sumber pendapatan Aceh adalah ekspor meriam dan senapan. Aceh juga mengirim meriam besar kepada raja-raja di Eropa sebagai hadiah. Sultan Iskandar Muda pernah berkata kepada Beaulieu bahwa ia memiliki 5.000 buah meriam. Belerang untuk pembuatan mesiu banyak sekali terdapat di wilayah kekuasaan Aceh, sedangkan besi untuk pembuatan meriam dan senapan kebanyakan didatangkan dari India.⁹⁵ Pasukan reguler dilengkapi dengan seragam yang rapi, meniru gaya militer Ottoman dan Mughal. Hal ini menunjukkan pengaruh kuat dari dunia Islam internasional dalam membentuk gaya militer Aceh. Pasukan darat terdiri dari infanteri bersenjata tombak, pedang, dan senapan lontak. Aceh juga memiliki pasukan berkuda dan pasukan gajah yang berfungsi sebagai kekuatan penembus dalam medan perang dan simbol kekuasaan kesultanan. Gajah-gajah ini dilatih untuk menghadapi musuh di medan laga dan sering digunakan dalam parade kesultanan.⁹⁶

⁹⁴ Anthony Reid, *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680*, Jilid II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 218–220.

⁹⁵ Beaulieu, dikutip dari Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda*, (Jakarta: KPG, 2006), hlm. 120–121.

⁹⁶ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda* (Jakarta: KPG, 2006), hlm. 120–125.

Sultan Iskandar Muda juga membentuk korps pasukan elit kesultanan. Pasukan ini direkrut sejak usia muda dan dididik secara khusus untuk menjalani pelatihan militer. Sistem pelatihannya menyerupai korps *Janissary* di Kesultanan Utsmaniyah, baik dalam hal kedisiplinan, ketaatan mutlak kepada Sultan, maupun dalam pelatihan senjata. Pasukan elit ini menjadi kekuatan inti dalam pertahanan istana dan pelaksanaan operasi militer strategis. Mereka dilatih dalam seni perang, penggunaan senjata api dan senjata tajam, serta taktik bertempur. Penampilan mereka seragam dan rapi dengan pakaian militer yang dibuat dari kain berkualitas dan sepatu kulit, mencerminkan standar tinggi yang ditetapkan oleh Sultan Iskandar Muda terhadap pasukan kesultanan. Keberadaan pasukan ini menjadi simbol kekuasaan absolut Sultan atas seluruh elemen negara, termasuk elit dan masyarakat umum. Militer menjadi alat penting dalam menegakkan kekuasaan pada masa Sultan Iskandar Muda.⁹⁷

Iskandar Muda juga memimpin sejumlah ekspansi militer besar dengan keberhasilan paling mencolok sepanjang sejarah Kesultanan Aceh. Ia menaklukkan wilayah Deli, Johor, dan Pahang, serta memperluas pengaruh Aceh di Semenanjung Malaya.⁹⁸

Sultan Iskandar Muda mengubah struktur politik kesultanan menjadi sangat terpusat. Ia menyingkirkan para bangsawan lama yang memiliki kuasa turun-temurun dan menggantinya dengan bangsawan-bangsawan baru yang sepenuhnya

⁹⁷ Leonard Y. Andaya, *The Kingdom of Aceh* (Ithaca: Cornell University Press, 2001), hlm. 165–170.

⁹⁸ M.A.P. Meilink-Roelofs, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1962), hlm. 345–350.

bergantung padanya. Loyalitas kepada sultan menjadi kunci bertahan dalam kekuasaan. Para pejabat diberikan wilayah kekuasaan administratif melalui titah langsung sultan (sarakata), tetapi wilayah itu bisa ditarik kapan saja. Ini membuat seluruh jajaran pemerintahan bergantung langsung pada otoritas pusat.⁹⁹

Sultan juga membentuk sistem pemerintahan dan struktur sosial yang baru. Selain mendirikan kota-kota besar dan kota pelabuhan yang dipimpin oleh para pejabat tinggi, dibentuk pula kota-kota kecil yang disebut mukim, yang membawahi beberapa gampong (kampung) di setiap wilayah pusat aktivitas masyarakat. Setiap mukim dipimpin oleh seorang Imum Mukim yang bertanggung jawab atas urusan sosial kemasyarakatan. Di setiap mukim dibangun sebuah masjid yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan kota sekaligus pusat kegiatan ritual keagamaan masyarakat.¹⁰⁰ Di sekitar masjid tersebut, turut dibangun sekolah tingkat menengah dan pasar yang menjadi pusat aktivitas ekonomi serta tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat.¹⁰¹ Jabatan Imum Mukim, serta berbagai jabatan lain di atas tingkatan mukim, diangkat dan dilantik langsung oleh Sultan secara periodik. Sistem dan struktur ini kemudian dibakukan sebagai bagian dari pengaturan administrasi pemerintahan Kesultanan.¹⁰²

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam di Asia Tenggara. Sistem pendidikan Aceh pada

⁹⁹ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*, (Leiden: KITLV Press, 2005), hlm. 97–100.

¹⁰⁰ Muhammad Ismail, *Struktur Sosial dan Pemerintahan dalam Kesultanan Aceh* (Banda Aceh: Pustaka Rakyat, 2007), hlm. 45.

¹⁰¹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 132–133.

¹⁰² T. Sulaiman. *Sistem Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Yayasan Warisan Budaya Aceh, 2012, hlm. 59.

masa itu sudah sangat mapan dan terstruktur. Di tingkat kampung, meunasah¹⁰³ berfungsi sebagai sekolah dasar, tempat anak-anak belajar membaca, menulis, mempelajari Al-Qur'an, dasar-dasar fiqih, bahasa Arab, dan tata krama Islam. meunasah menjadi titik awal pembentukan karakter religius masyarakat Aceh.¹⁰⁴ Pada tingkat mukim, terdapat sekolah menengah yang disebut Rangkang, mengajarkan ilmu mantiq, ushul fiqih, tafsir, dan hadits. Lembaga pendidikan ini mengajari siswanya dengan buku-buku yang mayoritas berbahasa Arab.¹⁰⁵

Puncak pendidikan formal di Kesultanan Aceh Darussalam adalah Dayah¹⁰⁶, yaitu lembaga pendidikan tinggi yang tersebar di wilayah Aceh, terutama di sekitar ibu kota. Dayah-dayah ini dikenal dengan jejaring internasionalnya. Mahasiswanya dari seluruh dunia seperti Melayu, India, bahkan Hijaz, datang untuk

¹⁰³ meunasah dalam konteks ini memiliki makna yang sangat berbeda dibandingkan dengan meunasah yang ada di setiap kampung di Aceh pada masa kini. Saat ini, meunasah lebih dipahami sebagai tempat pelaksanaan ibadah shalat berjamaah dan pertemuan masyarakat kampung, atau dapat dikatakan setara dengan balai desa dalam konteks administrasi Indonesia saat ini. Hal ini sangat berbeda dengan makna dan fungsi meunasah pada masa Kesultanan Aceh, di mana meunasah berperan sebagai lembaga pendidikan formal tingkat dasar tempat anak-anak memperoleh pelajaran.

¹⁰⁴ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*, (Leiden: KITLV Press, 2005), hlm. 115–117.

¹⁰⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 80–83.

¹⁰⁶ Dayah yang banyak terdapat di Aceh saat ini tidak memiliki keterkaitan langsung, baik secara definisi, jalur keilmuan, kurikulum, maupun fungsi, dengan dayah pada masa Kesultanan Aceh. Persamaan antara keduanya hanya terletak pada penggunaan nama yang diambil dari lembaga pendidikan Aceh pada masa tersebut. Dayah yang ada sekarang merupakan lembaga pendidikan informal yang setara dengan pondok pesantren dalam konteks pendidikan di Indonesia. Lembaga ini berfokus pada pendidikan agama Islam melalui sistem pengkaderan, yang mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda. Kurikulum di dayah Aceh saat ini merujuk pada sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dari Sumatra Barat, dengan pendekatan sekuler, yakni paradigma yang memisahkan antara agama dan politik atau negara. Oleh karena itu, materi ajar di dayah saat ini terbatas pada ilmu fikih, tasawuf, dan akidah, tanpa mencakup pelajaran umum. Secara umum, seluruh dayah tradisional yang ada di Aceh saat ini merujuk pada model pendidikan Dayah Darussalam Labuhan Haji di Aceh Selatan, yang didirikan oleh Abuya Muda Wali pada masa penjajahan Belanda. Hal ini sangat berbeda dengan dayah pada masa Kesultanan Aceh, yang merupakan lembaga pendidikan formal setara dengan universitas dalam budaya kontemporer. Pada masa itu, dayah menjadi pusat studi bagi para pelajar dari berbagai penjuru dunia dan mengajarkan seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama.

menuntut ilmu. Beberapa Dayah besar, seperti Dayah Teungku Chik di Lam Ara, Dayah Cot Kala, Dayah Awe Geutah, dan Dayah Blang Me Barat, memiliki perpustakaan besar dan¹⁰⁷ kurikulumnya mencakup kedokteran, arsitektur, ilmu politik, tafsir, hadits, fiqh, ilmu kalam, tasawuf, filsafat Islam, mantik, matematika, serta astronomi.

Ulama-ulama besar muncul dari lingkungan ini, seperti Hamzah Fansuri yang dikenal sebagai pelopor tasawuf falsafi di dunia Melayu, Syamsuddin as-Sumatrani yang menjadi ulama istana sekaligus murid utama Hamzah, serta Syekh Nuruddin ar-Raniri yang kemudian menyusun karya-karya monumental dan menjadi mufti Kesultanan Aceh. Perdebatan intelektual antara kubu tasawuf falsafi dan ortodoks juga memperlihatkan dinamika intelektual yang hidup dalam Kesultanan Aceh.¹⁰⁸

Selain pendidikan umum, Aceh juga memiliki sistem pendidikan militer yang terorganisir. Di dalam lingkungan istana, didirikan akademi-akademi militer seperti Mahad al-Harb, Bayt al-Muqaddam, dan Madrasah al-Siyasah al-Harbiyyah untuk mendidik perwira kesultanan.¹⁰⁹ Kurikulumnya mencakup strategi perang, penggunaan artileri, navigasi laut, ilmu teknik pertahanan benteng, serta kedisiplinan dan etika keprajuritan. Para instruktur militer kadang didatangkan dari luar negeri, termasuk dari Turki Utsmani, sebagai bagian dari hubungan diplomatik Aceh dengan dunia Islam internasional.

¹⁰⁷ Teuku Ibrahim Alfian, *Islam dan Peradaban Aceh*, (Banda Aceh: Pustaka Nad, 2009), hlm. 91–96.

¹⁰⁸ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Mysticism of Hamzah Fansuri*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970), hlm. 25–35.

¹⁰⁹ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda*, hlm. 112–114.

Pada Abad ke-17, Kesultanan Aceh memiliki ratusan ribu tentara yang selalu siap tempur kapan saja ditugaskan. Ini menjadikan Aceh salah satu kekuatan dominan di dunia, baik di darat maupun di laut. Menurut laporan seorang Jendral Prancis, Augustin de Beaulieu, pada tahun 1629 Sultan Iskandar Muda mampu menghimpun 40.000 prajurit terlatih hanya dalam waktu 24 jam dari Banda Aceh saja. Angka ini menunjukkan kesiapan militer yang luar biasa dalam skala regional.¹¹⁰

Augustin de Beaulieu adalah komandan armada dagang Perancis yang memimpin ekspedisi *Compagnie des Moluques* ke Asia Tenggara pada tahun 1619–1622. Salah satu catatan perjalanannya, memuat pengamatan langsung tentang Kesultanan Aceh, termasuk sistem militernya, armada lautnya, serta hubungan diplomatik dan dagangnya. Beaulieu mengagumi kekuatan militer Aceh, kedisiplinan pasukannya, serta pengorganisasian armada laut yang dianggapnya sebagai yang terkuat di Asia Maritim pada masa itu.¹¹¹

Beaulieu menyebutkan bahwa di pelabuhan-pelabuhan perang utama seperti Daya dan Pedir, terdapat sekitar 120 kapal perang jenis galai¹¹² besar yang selalu

¹¹⁰ Augustin de Beaulieu, *Mémoires d'un voyage aux Indes orientales 1619–1622*, dalam Charles Schefer (ed.), *Relations et mémoires inédits pour servir à l'histoire de la France dans les pays d'outre-mer* (Paris: Ernest Leroux, 1903), hlm. 179. Lihat juga Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011).

¹¹¹ Ibid.

¹¹² Galai adalah jenis kapal perang besar yang lazim digunakan pada abad ke-16 hingga ke-17, terutama oleh kekuatan maritim di wilayah Mediterania dan juga di Asia Maritim seperti Aceh. Galai merupakan perpaduan antara kapal layar dan kapal dayung, biasanya memiliki tiga tiang layar (biasanya dengan layar persegi), puluhan dayung di kedua sisi kapal (sekitar 30–40 pasang), dek yang luas untuk memuat prajurit dan meriam, dan persenjataan berat, termasuk meriam besar di haluan dan meriam ringan di sisi-sisi kapal. Galai Aceh, seperti yang dicatat oleh Augustin de Beaulieu dan Peter Mundy adalah kapal yang sangat besar dan kompleks. Beberapa galai Aceh bahkan lebih besar dari galai Eropa saat itu, menunjukkan tingkat teknologi perkapalan dan kemampuan logistik yang tinggi.

siap berlayar. Bahkan, sepertiga dari kapal-kapal itu disebut lebih besar dari galai manapun yang pernah dibangun di dunia Kristen.¹¹³ Peter Mundy pada tahun 1637 memperkuat kesaksian Beaulieu. Ia mencatat bahwa Kesultanan Aceh memiliki sekitar 200 kapal perang jenis galai dan ratusan kapal perang lainnya jenis fregat dan fusta, belum termasuk kapal kecil dan perahu besar milik perorangan.¹¹⁴

Galai-galai tersebut dibangun dengan keahlian tinggi. Salah satunya memiliki lunas sepanjang 120 kaki (sekitar 36 meter) yang terbuat dari satu batang kayu utuh.¹¹⁵ Kapal-kapal ini memiliki struktur yang tinggi dan panjang sekitar 100 meter dengan papan setebal 6 inci. Dayung-dayungnya sederhana namun efektif dan setiap dayung dikayuh oleh dua orang yang berdiri.¹¹⁶

Setiap galai dilengkapi 98 meriam, 18 meriam besar (lima buah meriam seberat 55 pon di haluan, satu meriam 25 pon di buritan, sisanya berkekuatan 17 dan 18 pon), 80 meriam jenis falconet, serta banyak meriam putar kecil. Jumlah awak kapal mencapai 600 hingga 800 orang per kapal, bukan terdiri dari budak, melainkan para pekerja kapal yang terampil dalam mendayung. Perawatan galai dibebankan kepada orang-orang kaya di kota, termasuk pejabat tinggi seperti laksamana. Mereka bertanggung jawab penuh terhadap pelayaran dan perawatan

¹¹³ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda (1607–1636)* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 113.

¹¹⁴ Peter Mundy, *The Travels of Peter Mundy in Asia, 1608–1667*, Vol. II (London: Hakluyt Society, 1919), hlm. 19–21.

¹¹⁵ Lunas kapal adalah bagian utama dari rangka kapal yang terletak di bagian paling bawah dan memanjang dari haluan (depan) ke buritan (belakang). Lunas berfungsi sebagai tulang punggung kapal, tempat melekatnya bagian-bagian penting lainnya seperti gading-gading (rangka melintang), papan lambung, dan dek.

¹¹⁶ Peter Mundy, *The Travels of Peter Mundy in Asia, 1608–1667*, Vol. II (London: Hakluyt Society, 1919), hlm. 19–21.

kapal dengan biaya sendiri, sebagai bentuk kontribusi terhadap pertahanan negara.¹¹⁷

Salah satu kapal besar dan paling terkenal dari armada Aceh adalah Cakra Donya, orang Portugis menyebutnya sebagai “*Espanto del Mundo*” atau “Teror Alam Semesta”. Kapal ini dikirim dalam ekspedisi melawan Malaka pada Juli 1629. Meskipun akhirnya jatuh ke tangan Portugis dan dibawa ke Spanyol sebagai trofi, kapal ini meninggalkan kesan mendalam. Menurut catatan Faria y Sousa, kapal tersebut memiliki panjang sekitar 100 meter, dengan tiga tiang layar besar, dan dilengkapi lebih dari 100 meriam. Salah satunya adalah meriam tembaga seberat lebih dari dua arroba, yang harganya mencapai 7.000 dukat.¹¹⁸ Sumber-sumber Barat dan lokal mencatat bahwa Aceh memiliki 200 galai secara aktif di seluruh pesisir barat dan timur Sumatra. Kapal “*Espanto del Mundo*” disebut sebagai salah satu yang terbesar.¹¹⁹ Orang Portugis melaporkan bahwa kapal itu lebih besar dari kapal apa pun yang pernah dibangun oleh bangsa Eropa dan tinggi kastilnya melebihi tinggi tinggi *galleon*.

Warisan kekuasaan Sultan Iskandar Muda begitu kuat sehingga generasi-generasi berikutnya mengakui semua hukum tradisional sebagai peninggalan dari

¹¹⁷ Peter Mundy, *The Travels of Peter Mundy in Asia, 1608–1667*, Vol. II (London: Hakluyt Society, 1919), hlm. 21.

¹¹⁸ Faria y Sousa, *Asia Portuguesa*, vol. II; dikutip dalam Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 149.

¹¹⁹ Sumber Portugis 1629; dikutip dalam Pierre-Yves Manguin, “The Merchant and the King: Political Myths of Southeast Asian Coastal Polities,” dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 38, No. 1 (2007), hlm. 28.

masanya. Cap kesultanan yang menyandang namanya digunakan oleh semua sultan setelahnya sebagai simbol legitimasi.¹²⁰

3.4.3. Era Kemunduran Kesultanan Aceh Darussalam

Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, Kesultanan Aceh mulai mengalami perubahan besar dalam struktur sosial dan politik. Sultan Iskandar Muda sebelumnya memimpin dengan otoritas penuh dan sistem pemerintahan yang sangat terpusat. Namun, sepeninggalnya, kekuasaan mulai terpecah dan mengarah pada sistem yang lebih oligarkis, di mana para pejabat tinggi dan penguasa lokal memperkuat posisi mereka secara turun-temurun.¹²¹

Ketika Sultan Iskandar Tsani meninggal pada 1641, para pejabat tinggi kesultanan saling berebut pengaruh sebelum akhirnya menobatkan Sultanah Safiyyat ad-Din Tajul Alam Syah sebagai sultan perempuan pertama di Aceh. Pemerintahannya menjadi awal dari sistem dewan kekuasaan yang membatasi peran sultanah. Para penguasa lokal, seperti uleebalang, mulai menjadikan jabatan mereka sebagai hak waris dan memperkuat posisi mereka di daerah masing-masing.¹²²

Kekuatan ekonomi Aceh pun menurun. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Pantai Barat dan Deli mulai hilang dari kontrol Aceh, sehingga ekspor lada sebagai salah satu komoditas utama Aceh menjadi terhenti. Ekspor timah dari

¹²⁰ Lihat juga Anthony Reid, *Menuju Sejarah Sumatra* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 111.

¹²¹ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 157–159.

¹²² Sher Banu A.L. Khan, *Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641–1699* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 2017), hlm. 61–65.

Perak juga terputus, membuat Aceh hanya mengandalkan ekspor sekunder seperti emas, gajah, dan hasil hutan. Situasi ini membuat wilayah-wilayah penghasil beras di sekitar ibu kota, seperti Gle Yeueng, menjadi pusat kekuatan baru yang semakin mempengaruhi politik istana.¹²³

Dalam periode ini, muncul kelompok *Panglima Polem* dari Gle Yeueng yang menjadi oposisi utama bagi pemerintahan sultanah. Panglima Polem memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang layak menjadi sultan. Pada akhir abad ke-17, posisi *Panglima Polem* dan *uleebalang* memiliki kekuatan politik yang signifikan dan bahkan memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan menurunkan Sultan.¹²⁴

Pada abad ke-18, Kesultanan Aceh kehilangan kekuasaan terpusatnya. Sistem pemerintahan berubah menjadi jaringan kekuasaan lokal yang otonom. Para *uleebalang* memimpin wilayah mereka secara turun-temurun dan menjadikan jabatan sebagai milik keluarga. Sumber daya dan kekayaan yang sebelumnya terpusat di istana mulai berpindah ke tangan para penguasa lokal, sehingga kemampuan militer Aceh semakin melemah karena kekurangan dana.¹²⁵

Perubahan ini menjadikan Aceh sebagai kesultanan dengan struktur feodal yang unik di Asia Tenggara. Kesetiaan politik lebih bergantung pada kepentingan lokal daripada pada kesultanan pusat. Perubahan struktur sosial ini mengubah wajah

¹²³ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 120–124.

¹²⁴ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 160–163.

¹²⁵ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 126–128.

Aceh secara mendalam, dari negara yang kuat dan terpusat menjadi kerajaan dengan kekuasaan yang terfragmentasi.¹²⁶

Sistem uleebalang sebenarnya sudah mulai terbentuk sejak abad ke-16, terutama pada masa ekspansi militer Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar. Uleebalang awalnya adalah panglima perang yang mendapat anugerah wilayah dari sultan. Namun, setelah masa Iskandar Muda, jabatan uleebalang menjadi tetap dan diwariskan, yang akhirnya memperkuat kekuasaan lokal di luar kendali pusat.¹²⁷

Selain perubahan internal, kemunduran Aceh juga dipercepat oleh masuknya kekuatan Eropa, khususnya Belanda dan Inggris. Melalui perusahaan dagang seperti VOC dan *British East India Company*, Belanda dan Inggris menguasai jalur perdagangan penting di Asia Maritim. Mereka membangun kekuatan politik lokal dan menarik para pedagang untuk bergabung dengan jaringan perdagangan mereka yang dianggap lebih stabil.¹²⁸

Wilayah-wilayah pantai barat seperti Tiku, Pariaman, dan Padang yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Aceh beralih ke tangan Belanda. Di Semenanjung Malaya, pelabuhan-pelabuhan penting yang dulunya tunduk kepada Aceh mulai bergeser karena pengaruh perjanjian dagang dan perlindungan militer Eropa. Perlahan, Aceh kehilangan kendali atas jalur perdagangan internasional yang selama ini menjadi sumber kemakmurannya.¹²⁹

¹²⁶ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 165–167.

¹²⁷ Leonard Y. Andaya, *The Kingdom of Aceh: Conflict and Diplomacy under the Sultan Iskandar Muda, 1607–1636* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 2007), hlm. 43–45.

¹²⁸ Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680: Expansion and Crisis* (New Haven: Yale University Press, 1993), hlm. 87–90.

¹²⁹ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 130–133.

Dalam situasi ini, Kesultanan Aceh semakin terisolasi. Lemahnya struktur pemerintahan di dalam negeri dan kehilangan jalur perdagangan global membuat Aceh tidak mampu lagi mempertahankan kejayaannya. Kekuasaan lokal yang semakin kuat dan campur tangan perusahaan-perusahaan Eropa mempercepat runtuhnya pengaruh Aceh sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara.¹³⁰

3.5. Aceh Awal Abad ke-19, Menuju Perang dengan Belanda

Pada awal abad ke-19, Kesultanan Aceh masih berdiri sebagai salah satu negara Islam yang kuat dan merdeka di dunia. Dengan kekayaan hasil bumi berupa lada dan pinang, Aceh masih memiliki jaringan perdagangan yang luas ke berbagai penjuru dunia. Posisi strategis Aceh di jalur pelayaran internasional sangat menguntungkan untuk mempertahankan status *quo* sebagai pusat perdagangan di Asia Maritim. Pada tahun 1819, Kesultanan Aceh menandatangani sebuah perjanjian dengan Inggris dan memperoleh pengakuan resmi dari Inggris tentang saling menghargai kedaulatan, mempertegas kemerdekaan Aceh dalam konstelasi politik internasional.¹³¹

Pada dekade 1820-an, produksi lada Aceh mencapai puncak produksi abad ke-19, khususnya di wilayah selatan kesultanan yang menghasilkan sekitar separuh dari kebutuhan lada dunia. Kesuburan tanah dan keterampilan penduduk dalam mengelola kebun lada menarik kapal-kapal dagang dari berbagai belahan dunia. Kapal-kapal New England dari Amerika Serikat mengambil bagian besar dalam

¹³⁰ Denys Lombard, *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 170–172.

¹³¹ Lee Kam Hing, “The Sultanate of Aceh: Relations with the British, 1760–1820,” *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 45, No. 1 (1972), hlm. 32–34.

perdagangan ini, diikuti oleh kapal-kapal Arab, India dari Penang, dan Prancis. Pada tahun 1823, dilaporkan bahwa empat kapal besar Prancis memuat lada dari pantai barat Aceh, sedangkan kapal-kapal Amerika Serikat tercatat melakukan 27 kunjungan dalam tahun yang sama.¹³²

3.5.1. Diplomasi Sultan Ala'ad-din Mansur Syah sebagai Upaya Pertahanan Menghadapi Belanda

Pada tahun 1838, Sultan Ala'ad-din Mansur Syah atau lebih dikenal sebagai Sultan Ibrahim, naik takhta. Menyadari ancaman yang kian nyata dari kekuatan kolonial Eropa, terutama Belanda, Sultan Ibrahim berusaha keras mencari aliansi dengan kekuatan asing untuk mempertahankan kedaulatan Aceh. Ia mengirimkan sepucuk surat kepada Raja Louis-Philippe dari Prancis melalui Kapten Martin, seorang kapten kapal dagang. Dalam surat itu, Sultan Ibrahim menawarkan Prancis untuk memperbarui persekutuan yang pernah terjalin pada masa kakeknya, Iskandar Muda. Ia menawarkan hak istimewa kepada Prancis, termasuk pemberian pangkalan dagang di Aceh dan perlindungan penuh terhadap kapal-kapal Prancis yang berdagang di wilayah Aceh.¹³³ Sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, korvet Prancis *La Fortune* melakukan kunjungan resmi ke Banda Aceh pada Februari 1843. Komandan korvet, Le Comte, membawa misi untuk mempererat hubungan dagang dan mendorong penerimaan uang logam lima franc Prancis dalam perdagangan Aceh. Dalam kunjungannya, Le Comte diterima resmi oleh Sultan

¹³² Fernão Mendes Pinto, *Peregrinação*, terj. Rebecca D. Catz (Berkeley: University of California Press, 1989), hlm. 128. Dikutip dalam Reid, *Menuju Sejarah Sumatra*, hlm. 104.

¹³³ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 37–40.

Ibrahim, meskipun suasana pertemuan tergolong dingin akibat kemarahan Sultan terhadap serangan Prancis atas wilayah Seunagan. Sultan menegaskan bahwa kapal-kapal dagang Prancis harus terlebih dahulu berkunjung ke Banda Aceh untuk mendapatkan izin resmi sebelum berdagang di wilayah Aceh lainnya.¹³⁴

Tidak berhenti di situ, pada tahun 1845, Noel Berchou, seorang pedagang dari Nantes yang telah 15 tahun berdagang di Aceh, mencoba menghidupkan kembali gagasan aliansi dengan Prancis. Ia mengajukan proposal kepada Kementerian Luar Negeri Prancis, menawarkan pengaruhnya di Aceh untuk membawa Kesultanan Aceh di bawah perlindungan Prancis. Namun, pemerintah Prancis menolak tawaran tersebut dengan sopan.¹³⁵

Situasi semakin mendesak ketika antara tahun 1839 dan 1840, Belanda berhasil merebut wilayah strategis Singkil dan Barus dari Aceh. Kekalahan ini mendorong Sultan Ibrahim untuk mencari dukungan diplomatik lebih jauh. Pada tahun 1849, Sultan mengutus Muhammad Ghauth untuk menjalankan misi diplomatik ke Konstantinopel dan Paris. Muhammad Ghauth membawa permohonan resmi kepada Sultan Abdul Mejid di Turki agar memperbarui hubungan perlindungan terhadap Aceh. Misi ini berhasil, Sultan Abdul Mejid mengeluarkan dua firman yang mempertegas kembali bahwa Aceh berada di bawah perlindungan Kekaisaran Ottoman.¹³⁶

¹³⁴ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898*, hlm. 37–40.

¹³⁵ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898*, hlm. 37–40.

¹³⁶ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 112–115.

Sebagai bentuk pengakuan atas dukungan ini, Sultan Ibrahim mengirim sumbangan sebesar \$10.000 untuk membantu biaya Perang Krimea. Hubungan diplomatik ini memperkuat citra Aceh di dunia Islam dan membuka jalan untuk perundingan lebih lanjut dengan kekuatan-kekuatan besar.¹³⁷

Pada tahun 1852–1853, Aceh mengirim Teuku Nyak Adum, dikenal di Prancis sebagai Sidi Muhammad, untuk bertemu Napoleon III. Dalam kunjungan tersebut, Sidi Muhammad menyerahkan surat Sultan Ibrahim yang berisi penawaran diplomatik dan militer untuk melindungi Aceh dari ancaman Belanda. Sebagai balasan, Napoleon III menghadiahkan sebilah pedang indah kepada Sultan Ibrahim sebagai tanda persahabatan.¹³⁸

Namun, hubungan dengan Prancis tidak berkembang lebih jauh. Pada 1856–1865, meskipun Konsulat Prancis di Padang tetap aktif, perdagangan lada Prancis dari Aceh mulai menurun drastis. Minat resmi Prancis terhadap Aceh berangsur surut, pergeseran jalur perdagangan ke Penang dan berkurangnya kunjungan kapal Prancis memperjelas bahwa Aceh tidak lagi menjadi prioritas di mata salah satu kekuatan Eropa itu.¹³⁹ Situasi ini mendorong Sultan Ibrahim mencari peluang baru. Pada tahun 1862, ia mempercayakan sebuah tugas penting kepada Cesar Moreno, seorang petualang asal Italia yang berada di lingkungan istana. Moreno diminta menyelidiki kemungkinan menghidupkan kembali perlindungan asing, khususnya dari kekuatan-kekuatan besar Eropa, sebagai benteng terhadap invasi Belanda yang

¹³⁷ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*, hlm. 112–115.

¹³⁸ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*, hlm. 112–115.

¹³⁹ Ibid.

semakin nyata.¹⁴⁰ Misi Moreno menandai awal dari usaha diplomasi baru di tengah dunia yang berubah cepat di persimpangan jalur dagang dan geopolitik Asia Tenggara.³

3.5.2. Ekspedisi-Ekspedisi Militer Kesultanan Aceh Abad ke-19

Selain Upaya diplomasi, Sultan Ibrahim juga mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya di Sumatra Timur. Kesultanan Aceh, sebagai negara berdaulat, mengirimkan ekspedisi resmi untuk memperkuat pengaruh dan menghalau intervensi Belanda serta para penguasa lokal di Sumatra yang berusaha mengkhianati ikatan dengan Aceh.¹⁴¹

Memahami bahwa Belanda menunggu kesempatan untuk menguasai Aceh dan Selat Malaka, Sultan Ibrahim pada tahun 1854 mengutus keponakannya, Tuanku Pangeran Husain untuk memimpin ekspedisi militer besar. Dengan kekuatan sekitar 200 kapal kecil dan 1000 tentara Aceh, Tuanku Pangeran Husain bergerak ke wilayah Asahan, Kota Pinang, Serdang, Deli, Langkat, dan sekitarnya. Misinya mengkonsolidasikan kekuasaan Aceh, meyakinkan para raja setempat atas kedaulatan Aceh, dan memperingatkan bahaya ekspansi kolonial Belanda.¹⁴²

Dalam pertemuan-pertemuan resmi, para raja diingatkan bahwa jabatan mereka berasal dari pengangkatan Sultan Aceh, bukan dari kekuatan lain. Untuk memperkokoh ikatan tersebut, Sultan mengeluarkan *sarakata* (surat tugas)

¹⁴⁰ Fernão Mendes Pinto, *Peregrinação*, terj. Rebecca D. Catz (Berkeley: University of California Press, 1989), hlm. 128. Dikutip dalam Reid, *Menuju Sejarah Sumatra*, hlm. 104.

¹⁴¹ Lee Kam Hing, "The Sultanate of Aceh: Relations with the British, 1760–1820," *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 45, No. 1 (1972), hlm. 32–34.

¹⁴² Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1969), hlm. 12–15.

pengangkatan baru lengkap dengan gelar, hak, batas wilayah, dan tanda kebesaran.¹⁴³

Namun pada tahun 1857, Belanda berhasil memaksa Raja Siak mengakui kedaulatan Belanda atas wilayah Asahan, Deli, Serdang, Langkat, dan Tamiang. Di sisi lain, Sultan Aceh pada tahun 1858 mengangkat Tuanku Hasyim Banta Muda sebagai Viceroy Sultan Aceh (gubernur/kepala negara bagian) untuk wilayah Aceh Timur dan Sumatra Timur. Tuanku Hasyim kemudian membentuk jaringan pertahanan, dibantu oleh Panglima Teuku Nyak Makam sebagai asistennya.¹⁴⁴

Pertahanan diperkuat di Teluk Ham, Pulau Kampai, Pulau Sembilan, Kuala Gebang, Pangkalan Siantar, Bogak, dan Tualang Cut. Pada tahun 1863, Laksamana Teuku Cut Lateh Raja Muda Meureudu turut bergabung memperkuat kekuatan militer Aceh di Sumatra Timur.¹⁴⁵

Pada tahun 1865, Belanda melancarkan serangan besar di bawah Residen Netscher dengan enam kapal perang dan 1000 serdadu Jawa. Setelah menggempur Asahan dan memaksakan pengasingan Sultan Asahan, Belanda menyerang benteng-benteng Aceh di Pulau Kampai dan Pulau Sembilan. Di bawah komando Tuanku Hitam, Teuku Nyak Makam, dan Cut Lateh, pertahanan Aceh berlangsung sengit hingga akhirnya pada 14 Oktober 1865, pasukan Aceh mundur ke Manyak Paet.¹⁴⁶

¹⁴³ Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara* (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 195–197.

¹⁴⁴ T.B. Abdullah, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Aceh* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), hlm. 45–48.

¹⁴⁵ Said Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Jakarta: Bulan Bintang, 1961), hlm. 201–205.

¹⁴⁶ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra*, hlm. 48–52.

Belanda kemudian mengangkat Teungku Sulung Laut sebagai penguasa boneka di Seuruwey dan mengibarkan bendera Belanda untuk pertama kali di bekas wilayah Aceh. Walaupun Seuruwey jatuh, Belanda tidak berani melanjutkan penetrasi lebih dalam ke wilayah Aceh hingga meletusnya Perang Aceh pada 1873.¹⁴⁷ Panglima Teuku Nyak Makam setelah itu mundur ke Peureulak, Simpang Ulim, hingga akhirnya pulang ke Lamnga di Aceh Besar.

3.5.3. Krisis 1872

Pada tahun 1864, Kesultanan Aceh memasuki babak baru dalam sejarah politik dan diplomasi internasionalnya dengan kedatangan Habib Abdur-Rahman az-Zahir. Seorang ulama keturunan Hadhramaut yang berpengalaman luas di dunia Arab, Mesir, India, dan Eropa, membawa semangat reformasi politik sekaligus kemampuan diplomasi tinggi. Ia segera memperoleh pengaruh besar di lingkungan istana Aceh, menawarkan jaringan kontak yang lebih luas dengan dunia Islam internasional.¹⁴⁸

Pada tahun 1868, kekhawatiran atas ekspansi Belanda di Sumatra makin meningkat. Sebagai respon, sebanyak 67 pemuka Aceh mengirimkan sebuah permohonan resmi kepada Sultan Abdul Aziz di Turki, memohon agar Aceh diterima kembali sebagai bagian dari Kekaisaran Ottoman dan mendapatkan perlindungan militer. Sayangnya, kondisi internal Turki yang sedang goyah karena tekanan Eropa dan perang di Balkan menyebabkan permohonan ini ditolak secara

¹⁴⁷ Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, hlm. 205–210.

¹⁴⁸ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 156.

halus. Sultan Abdul Aziz melalui menterinya mengirimkan jawaban diplomatis yang menyatakan simpati, namun tidak bisa memberikan bantuan konkret.¹⁴⁹

Tahun 1869 dan 1870 menjadi periode penting dalam restrukturisasi politik Aceh. Setelah wafatnya Sultan Ala'ad-din Ibrahim Mansur Syah, takhta Aceh dipegang oleh Sultan Mahmud Syah yang masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dalam kondisi yang genting ini, Habib Abdur-Rahman az-Zahir ditunjuk sebagai wali Sultan Mahmud. Selain membimbing Sultan muda, Abdur-Rahman juga mengambil alih urusan hubungan luar negeri Aceh. Ia mengaktifkan kembali jaringan hubungan dengan dunia Muslim dan mencari peluang untuk memperkuat posisi Aceh melalui diplomasi aktif, menyadari bahwa kekuatan militer saja tidak akan cukup untuk menghadapi Belanda.¹⁵⁰

Menjelang akhir tahun 1872, ketegangan meningkat pesat. Pemerintah kolonial Belanda, merasa terganggu oleh upaya diplomasi Aceh, mulai mengatur rencana untuk intervensi militer. Sebagai upaya terakhir, Muhammad Tibang, syahbandar kesultanan yang berpengalaman dan berhubungan erat dengan dunia perdagangan internasional, dikirim ke Singapura. Tibang membawa dua surat, satu surat khusus untuk Konsul Prancis yang diharapkan akan membangkitkan kembali hubungan perlindungan, dan satu surat terbuka untuk konsul-konsul kekuatan Eropa lainnya, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Italia.

¹⁴⁹ Lee Kam Hing, "The Sultanate of Aceh: Relations with the British, 1760–1820," *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, Vol. 45, No. 1 (1972), hlm. 67–68.

¹⁵⁰ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 105–107.

Di Singapura, situasi diplomatik tidak berpihak pada Aceh. Konsul Prancis bersikap dingin, menunjukkan bahwa pemerintah Prancis tidak tertarik untuk menantang posisi Belanda di Sumatra. Menyadari kebuntuan ini, Muhammad Tibang, melalui perantaraan Tengku Mohammad Arifin, seorang Melayu yang fasih berbahasa Inggris dan berpengaruh di kalangan Eropa, mengalihkan pendekatan kepada Mayor Studer, Konsul Amerika Serikat. Dalam pertemuan-pertemuan yang diatur dengan sangat hati-hati, Tibang dan Arifin menawarkan gagasan perjanjian persahabatan dan perlindungan dengan imbalan hak-hak dagang istimewa di pelabuhan Aceh.

Namun, tanpa sepengetahuan pihak Aceh, Tengku Mohammad Arifin sebenarnya sudah lama menjadi informan W.H. Read, Konsul Belanda di Singapura. Dalam *Perang Aceh* karya Paul van 't Veer, disebutkan bahwa Arifin secara rutin memberikan laporan-laporan rahasia kepada Read, termasuk detail pertemuan Muhammad Tibang dengan Konsul Amerika. Arifin membocorkan seluruh upaya diplomasi Aceh kepada Read yang kemudian menggunakan informasi ini untuk mendesak Batavia agar segera melakukan intervensi militer.¹⁵¹

Pada 16 Februari 1873, Read mengirimkan telegram penting kepada Batavia, memperingatkan bahwa Aceh sedang mencari perlindungan dari kekuatan asing. Telegram ini membakar kegelisahan di kalangan pejabat kolonial Belanda yang menganggap bahwa Aceh telah mengkhianati komitmen netralitas regional, mengakibatkan Belanda mempercepat rencana invasi. Kecurigaan bahwa Aceh akan bergabung dengan kekuatan asing mendorong Gubernur Jenderal di Batavia

¹⁵¹ Paul van 't Veer, *Perang Aceh* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm. 53–55.

untuk mengesahkan ekspedisi militer. Dengan dukungan penuh dari para pejabat di Den Haag, Belanda memutuskan untuk menginvasi wilayah kedaulatan Aceh, membuka jalan bagi salah satu perang kolonial paling panjang dan berdarah di dunia.¹⁵²

3.6. Perang Aceh-Belanda Pertama

Pada 22 Maret 1873, armada Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler tiba di perairan Banda Aceh. Armada ini membawa sekitar 5.000 pasukan, dilengkapi artileri berat, kapal-kapal perang, dan logistik lengkap dengan keyakinan bahwa operasi ini akan cepat menundukkan Kesultanan Aceh. Armada terdiri dari serdadu Belanda Eropa, serta ribuan serdadu pribumi, terutama dari Jawa, Ambon, dan Manado. Bersama mereka ikut pula ratusan perempuan dari Jawa yang dibawa untuk kebutuhan seksual pasukan.¹⁵³

Pada 26 Maret 1873, Belanda memulai penyerangan ke wilayah Aceh. Mereka membombardir kota dengan meriam dari kapal-kapal perang, kemudian mendaratkan pasukan infanteri yang terbagi dalam beberapa divisi. Di darat, Belanda menghadapi perlawanan ketat dari tentara Kesultanan Aceh yang terorganisasi dengan baik. Pertempuran sengit mencapai puncaknya pada 8–25 April 1873. Belanda menyerang pusat pemerintahan Aceh di Banda Aceh. Di tengah pertempuran, Jenderal Kohler tewas ditembak oleh seorang penembak jitu

¹⁵² Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898*, hlm. 109.

¹⁵³ Paul van 't Veer, *Perang Aceh* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm. 73–74.

Aceh tepat di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Kematianannya memicu kepanikan di pihak Belanda menyebabkan kehancuran moral pasukan Belanda.¹⁵⁴

Pada 25 April 1873, sisa-sisa pasukan Belanda yang porak-poranda terpaksa mundur ke kapal mereka. Kerugian besar dialami, ratusan serdadu tewas dalam pertempuran dan ratusan lainnya akibat penyakit tropis seperti malaria dan kolera. Ekspedisi Pertama dinyatakan gagal total, memukul keras reputasi militer kolonial Belanda.¹⁵⁵ Sementara itu, di Mekkah, Habib Abdur-Rahman az-Zahir menerima kabar invasi ini. Niat awal untuk menghubungi Prancis ditinggalkan setelah mengetahui sikap Eropa terhadap perang ini. Fokus diplomasi Aceh dialihkan sepenuhnya ke Turki, memohon perlindungan dari Khalifah Ottoman.¹⁵⁶

Pada Juli 1873, Teuku Paya mengirim surat kepada Prancis untuk meminta dukungan. Namun, Prancis dengan tegas menolak, berpegang pada solidaritas kolonial Eropa.¹⁵⁷ Di sisi Belanda, persiapan untuk ekspedisi lanjutan segera dimulai. Pada Agustus 1873, agen intelijen George Lavino mengusulkan penggunaan pedagang Penang untuk mendukung operasi logistik dan spionase. Perekrutan besar-besaran mata-mata dilakukan di Penang dan Singapura, melibatkan Melayu, Arab, Cina, dan beberapa Aceh pembelot.¹⁵⁸

Pada September 1873, Lavino mengirimkan serangkaian laporan rinci dan peta geografi strategis Aceh ke Batavia, memperkuat rencana ekspedisi militer yang

¹⁵⁴ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 120.

¹⁵⁵ Zentgraaff, *Atjeh*, terj. oleh Amir Sutaarga (Jakarta: Pustaka Jaya, 1982), hlm. 45.

¹⁵⁶ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 162.

¹⁵⁷ Paul van 't Veer, *Perang Aceh* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm. 79.

¹⁵⁸ Ibid., hlm. 85.

lebih sistematis.¹⁵⁹ Aktivitas propaganda Islam di Singapura dan Jawa yang sempat berkobar setelah kabar kemenangan Aceh, mulai reda pada Desember 1873. Pemerintah kolonial Inggris dan Belanda meningkatkan pengawasan ketat terhadap masjid dan perkumpulan-perkumpulan Muslim.¹⁶⁰

Kekalahan Belanda di Aceh menjadi berita besar di dunia. Surat kabar Eropa dan Amerika mengolok-olok kegagalan itu, mempertanyakan ketangguhan militer Belanda dan mengecam kolonialisme yang ceroboh. Di dunia Islam, kemenangan Aceh membangkitkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme di berbagai belahan Asia dan Afrika.¹⁶¹

3.7. Perang Aceh-Belanda Kedua (1874–1914)

Pada Januari 1874, Belanda meluncurkan Ekspedisi Kedua ke Aceh dengan kekuatan lebih besar dan strategi lebih sistematis. Armada besar dikerahkan setelah kegagalan Ekspedisi Pertama yang mempermalukan reputasi militer Belanda di mata dunia. Gubernur Jenderal James Loudon, yang merasa didesak oleh opini publik dan tekanan politik di Belanda, memerintahkan penyusunan pasukan baru yang lebih lengkap. Sekitar 8.500 serdadu, yang terdiri dari tentara Eropa, Jawa, Ambon, Manado, dan Bali, diberangkatkan. Mereka didukung oleh sekitar 4.000 tenaga logistik, termasuk buruh pelabuhan dan perempuan budak seks dari Jawa untuk melayani kebutuhan moral pasukan. Armada laut yang mengangkut mereka terdiri dari puluhan kapal perang, kapal transportasi, dan kapal rumah sakit.¹⁶²

¹⁵⁹ Reid, *The Contest for North Sumatra*, hlm. 125.

¹⁶⁰ Reid, *An Indonesian Frontier*, hlm. 164.

¹⁶¹ Reid, *The Contest for North Sumatra*, hlm. 127.

¹⁶² Paul van 't Veer, *Perang Aceh* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm. 78-81.

Serangan besar kedua ini berhasil merebut Banda Aceh yang telah kosong setelah eksodus warga kota Banda Aceh yang diorganisir oleh tentara Aceh. Pasukan Belanda menduduki bekas istana sultan, membangun benteng pertahanan di tengah kota, dan secara simbolis mengibarkan bendera Belanda. Namun, kemenangan ini bersifat semu. Sultan Mahmud Syah dan para pemimpin militer Aceh telah mundur ke pedalaman, membentuk jaringan pertahanan yang lebih sulit dikalahkan.¹⁶³

Pada Maret 1874, Konsul Belanda di Singapura, W.H. Read, mengusulkan agar dinas intelijen diperluas. Ia meminta penguatan jaringan informan di Singapura dan Penang untuk melacak pergerakan intelijen pihak Aceh dan mencegah suplai senjata dari luar.¹⁶⁴ Antara tahun 1875–1876, sejumlah perwira Muslim, termasuk dari Turki dan India, mencoba membantu Aceh, tetapi dampaknya kecil. Sumbangan dari komunitas Islam di Singapura dan Penang yang semula deras, mulai menurun karena ketatnya pengawasan Inggris dan Belanda.¹⁶⁵

Pada 1877, Read diangkat menjadi Konsul Jenderal untuk seluruh Straits Settlements. Di bawah kendalinya, pengawasan terhadap komunitas Melayu, Arab, dan Cina di Semenanjung semakin diperketat. Pada 1879, George Lavino yang berpengalaman dalam dinas intelijen ditunjuk menjadi Wakil Konsul di Penang, memperkuat pengawasan terhadap semua kegiatan yang diduga berhubungan dengan pertahanan Aceh.¹⁶⁶

¹⁶³ Ibid., hlm. 81.

¹⁶⁴ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 128.

¹⁶⁵ Ibid., hlm. 130.

¹⁶⁶ Ibid., hlm. 133.

Tahun 1880–1881, terjadi skandal besar di Penang. Tiga orang Jerman, Cramer, Schmitz, dan Forker, mencoba memeras Konsulat Belanda dengan menawarkan informasi palsu tentang rencana persekongkolan antara intelijen Aceh dan orang Eropa untuk menghancurkan benteng-benteng Belanda. Skandal ini mempermalukan Belanda dan memperlihatkan kerapuhan jaringan intelijen mereka.¹⁶⁷ Pada 1881, 30 orang di Palembang ditangkap karena dicurigai merencanakan pembunuhan terhadap semua orang Eropa di sana. Read yang paranoid menuduh Sultan Johor dan Muhammad Alsagoff sebagai dalang, namun tuduhan ini tidak terbukti.¹⁶⁸

Pada tahun 1882 hingga 1883, pengeluaran rahasia untuk operasi intelijen di Penang melonjak tajam. Ketika Read akhirnya cuti pada Maret 1883 dan diberhentikan pada Juli 1883, Lavino segera menggantikannya, diangkat menjadi Konsul Jenderal di Singapura pada Desember 1884.¹⁶⁹ Pada 1888–1889, operasi mata-mata Belanda semakin meluas. Mereka mengawasi semua aktivitas Muslim dan komunitas Cina di Semenanjung, namun beban keuangan meningkat drastis menimbulkan ketidakpuasan di Batavia.¹⁷⁰

Pada 1890, kedatangan kapal perang Turki di Singapura membangkitkan harapan di kalangan orang Aceh dan komunitas Muslim Asia Tenggara bahwa bantuan dari Khalifah Ottoman akan datang. Namun, harapan ini segera pupus.¹⁷¹

¹⁶⁷ Ibid., hlm. 140.

¹⁶⁸ Ibid., hlm. 142.

¹⁶⁹ Paul van 't Veer, *Perang Aceh*, hlm. 95.

¹⁷⁰ Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 168.

¹⁷¹ Ibid., hlm. 170.

Pada 1893, surat dari Sultan Aceh yang meminta dukungan kepada Turki jatuh ke tangan Belanda yang semakin memperketat pengawasan terhadap hubungan luar negeri Aceh. Konsulat Belanda di Singapura dan Penang memperluas operasi pengawasan terhadap orang Arab, Melayu, dan jemaah haji.¹⁷² Pada 1895, Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda yang menjadi penasihat pemerintah kolonial, mengkritik keras penyalahgunaan jaringan mata-mata. Ia mengeluhkan bagaimana agen Belanda di Singapura memeras jemaah haji dan pedagang Arab, mencoreng reputasi kolonial Belanda di mata dunia Islam.¹⁷³

Secara umum, meskipun Belanda berhasil menguasai Ibukota Banda Aceh secara *de jure* sejak 1874, tentara Kesultanan Aceh yang mempertahankan diri tetap bertahan keras di luar ibukota Banda Aceh. Pada 1914 setelah 40 tahun berperang, Belanda akhirnya berhasil mengalahkan militer Aceh. Dalam laporan Gouvernements-Secretarie Batavia, 1915 dikatakan “Pertahanan bersenjata dalam bentuk militer terorganisir di Aceh berakhir pada tahun 1913, namun operasi-operasi militer kecil terhadap kelompok-kelompok yang tersisa masih berlanjut hingga pertengahan 1914, setelah itu Aceh dianggap sepenuhnya ‘aman’ untuk administrasi sipil”.¹⁷⁴ Selama periode perang (1874–1914), Belanda melakukan genosida di wilayah-wilayah taklukan, membunuh para pemimpin, dan cendekiawan Aceh. Akibatnya, rakyat Aceh kehilangan struktur kepemimpinan dan elemen intelektual penting. Dengan runtuhnya basis pertahanan ini, Belanda dapat

¹⁷² Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 144.

¹⁷³ Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, terj. A.W.S. O'Sullivan (Leiden: Brill, 1906), hlm. 382.

¹⁷⁴ Gouvernements-Secretarie, *Verslag van de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië over het Jaar 1915* (Batavia: Landsdrukkerij, 1916), hlm. 45.

dianggap telah menaklukkan Aceh. Setelah kekalahan tentara reguler Kesultanan Aceh pada 1914, api resistensi tetap membara, berubah menjadi perjuangan rakyat panjang dan berdarah, sepanjang dekade-dekade berikutnya.



BAB IV

KONSEP INTEGRASI NASIONAL INDONESIA DAN PROSESNYA DI ACEH

4.1. Konsep Integrasi Nasional Indonesia

Dalam ilmu politik dan pemerintahan integrasi berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional.¹⁷⁵ Konsep ini senada dengan penjelasan James D. Fearon, bahwa integrasi nasional adalah proses membangun kohesi sosial dan kesediaan berbagai kelompok untuk hidup bersama dalam satu sistem politik yang sama.¹⁷⁶ Di Indonesia proses integrasi nasional telah dimulai sejak masa kolonial Belanda, bukan setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945. Kolonisasi yang dilakukan oleh Belanda di Asia Tenggara menjadi titik awal penyatuan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah secara geografis, budaya, dan politik ke dalam satu kesatuan administrasi kolonial.¹⁷⁷ Pengalaman kolektif sebagai warga jajahan Belanda dan interaksi sosial yang meningkat menjadi dasar psikologis dan struktural bagi lahirnya semangat kebangsaan di kalangan elit sosial Indonesia. Pengalaman seperti ini dibentuk melalui sistem administrasi kolonial, jaringan transportasi, pendidikan, dan media massa. Masyarakat dari berbagai etnis, bahasa, dan daerah memiliki pengalaman bersama sebagai subjek kolonial. Dari

¹⁷⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/integrasi>. Diakses pada tanggal 26 Desember 2023.

¹⁷⁶ James D. Fearon, "Social Capital, Social Cohesion, and Integration," dalam *Measuring Social Cohesion*, ed. Bertelsmann Stiftung (Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, 2008), hlm. 31–48.

¹⁷⁷ Anthony Reid, *The Indonesian National Revolution, 1945–1950* (Melbourne: Longman, 1974), hlm. 3–5.

sinilah muncul rasa kebersamaan atau “*we-feeling*” sebagaimana dijelaskan oleh Karl W. Deutsch yang menyebut bahwa “*Social communication leads to a higher probability of mutual sympathy and loyalties*”,¹⁷⁸ ‘Komunikasi sosial mengarah pada probabilitas yang lebih tinggi atas simpati dan loyalitas timbal balik’. Dengan demikian, Integrasi Nasional Indonesia sejatinya merupakan kelanjutan dari proyek integrasi kolonial Hindia Belanda.

Benedict Anderson memperkuat pandangan ini, dalam *Imagined Communities* menyebut bahwa bangsa adalah komunitas politik yang dilandaskan pada imajinasi (*imagined political community*), dan kesadaran kebangsaan lahir dari proses historis yang memungkinkan orang-orang yang tidak saling mengenal merasa bagian dari komunitas yang sama. Salah satu proses utamanya adalah kapitalisme cetak (*print-capitalism*) yang memungkinkan lahirnya kesadaran kolektif melalui media massa. Selain media massa, penggunaan bahasa Melayu, serta sistem pendidikan dan administrasi kolonial Hindia Belanda menciptakan pengalaman bersama yang memperkuat imajinasi kebangsaan di kalangan penduduk jajahan.¹⁷⁹

Pada wilayah Aceh, pembentukan identitas nasional Indonesia merupakan warisan identitas dan struktur kolonial Hindia Belanda yang disusun melalui proses panjang dominasi politik, militer, dan administratif sejak abad ke-19.¹⁸⁰ Melalui proses tersebut, Aceh diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda,

¹⁷⁸ Karl W. Deutsch, *Nationalism and Social Communication: An Inquiry into the Foundations of Nationality* (Cambridge, MA: MIT Press, 1953), hlm. 81.

¹⁷⁹ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 2006), hlm. 116–120.

¹⁸⁰ Anthony Reid, *The Contest for North Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1969), hlm. 5.

sementara para elite sosial yang sebelumnya menjadi aktor politik kolonial kemudian beralih menjadi elite nasional Indonesia dengan tetap meneruskan struktur kekuasaan, logika administratif, dan batas-batas politik warisan kolonial.¹⁸¹ Hal ini senada dengan penjelasan Ernst B. Haas, bahwa integrasi merupakan suatu proses ketika para aktor politik dalam beberapa unit politik yang berbeda terdorong untuk mengalihkan loyalitas, harapan, serta aktivitas politik mereka kepada suatu pusat kekuasaan baru yang memiliki yurisdiksi lebih luas daripada unit politik sebelumnya.¹⁸² Di Aceh, proses pengalihan tersebut juga amat dipengaruhi kesuksesannya akibat upaya dari organisasi-organisasi pergerakan nasional yang menanamkan pengaruh ideologis dan sosial melalui pendidikan, jaringan organisasi, serta tokoh-tokoh yang menjadi penghubung antara pemikiran nasionalisme Indonesia dan masyarakat Aceh.¹⁸³ Proses tersebut berlangsung dalam periode Kebangkitan Nasional, pada awal abad ke-20 ketika berbagai organisasi seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), Muhammadiyah (1912), dan kemudian Partai Nasional Indonesia (1927) mulai mengkonsolidasikan gerakan kebangsaan di berbagai wilayah Nusantara. Gerakan-gerakan ini membawa paradigma baru tentang kebangsaan atas dasar kesamaan nasib di bawah pemerintahan kolonial.¹⁸⁴

¹⁸¹ Poerwanto, *Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional*, hlm. 56.

¹⁸² Ernst B. Haas, *The Uniting of Europe: Political, Social, and Economic Forces, 1950–1957* (Stanford: Stanford University Press, 1958), hlm. xi–xvi.

¹⁸³ Anthony Reid, “Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional,” Jakarta: Sinar Harapan, 1986, hlm. 34–37.

¹⁸⁴ Ibid.

Organisasi-organisasi ini menyebarkan pendidikan modern yang sekuler, mencetak media cetak berbahasa Melayu, dan membentuk jaringan kader yang tersebar sampai ke Aceh.¹⁸⁵ Pengaruh inilah yang kemudian membentuk kesadaran politik baru di kalangan elite sosial Aceh, khususnya generasi yang dididik di sekolah-sekolah negeri pemerintah kolonial atau yang terhubung dengan organisasi Islam modernis seperti Muhammadiyah dan PERSIS.¹⁸⁶ Selain itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) juga sempat memiliki pengaruh penting dalam pergerakan nasional di Indonesia, termasuk upaya radikal mempercepat perubahan politik di berbagai wilayah.¹⁸⁷

Organisasi lain yang juga turut memainkan peran adalah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan agama di Aceh dengan sistem pengkaderan. Kurikulum yang diadopsi dari tradisi PERTI yang berasal dari Sumatra Barat telah terhegemoni oleh pemikiran sekuler yang menempatkan agama hanya dalam ranah spiritual dan ritual saja, sementara aspek politik dan pemerintahan dianggap sebagai ranah duniawi yang harus dijauhi oleh umat Islam.¹⁸⁸ Lembaga-lembaga ini berperan besar dalam membentuk paradigma

¹⁸⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 37–89; Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926* (Jakarta: Grafiti Pers, 1997), hlm. 25–54.

¹⁸⁶ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 89–148; Anthony Reid, *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1979), hlm. 31–38.

¹⁸⁷ Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism* (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 1–45.

¹⁸⁸ Rusli, R., & Muhtadi, F. (2021). “Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Dalam Mengembangkan Pendidikan Islam Di Minangkabau Pada Awal Abad XX,” *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(1), 74–83. Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ABIM, 1978), hlm. 15–44.

baru tentang agama di kalangan masyarakat Aceh, serta menghilangkan perlawanan terhadap penjajah karena umat Islam tidak tertarik lagi berpolitik.

4.2. Proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh

4.2.1. Pemusnahan Identitas Keacehan melalui Eliminasi Pemimpin dan Kaum Cendekiawan (1874–1914)

Penaklukan Aceh oleh Belanda dalam Perang Aceh-Belanda Kedua (1874–1914) menandai sebuah era baru dalam sejarah panjang Aceh. Pertama kalinya, negeri yang selama berabad-abad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara Islam independen, jatuh di bawah kekuasaan asing yang membawa paradigma sekuler ke dalam tubuh masyarakatnya.¹⁸⁹ Paul van 't Veer mencatat bahwa sejak merebut Banda Aceh, Belanda juga berupaya menghancurkan sistem sosial-politik Aceh, yang berpadu erat dengan identitas budaya rakyatnya. Hal ini senada dengan yang telah dijelaskan oleh Stuart Hall, menegaskan bahwa kolonialisme modern merupakan proyek budaya (*cultural project*) yang berusaha membentuk cara masyarakat jajahan memahami dirinya sendiri, sejarahnya, dan hubungannya dengan kekuasaan kolonial. Jadi, tidak sebatas menundukkan wilayah geografisnya.¹⁹⁰ Sasaran utama Belanda adalah para pemimpin keagamaan yang sekaligus merupakan pemimpin administratif di Aceh. Sultan, Ulama, Teungku Chik, Panglima, *Uleebalang* dan kaum cendekiawan menjadi target pembunuhan atau pengasingan.

¹⁸⁹ Paul van 't Veer, *Perang Aceh* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm. 78–81.

¹⁹⁰ Stuart Hall, *Cultural Identity and Diaspora*, dalam *Identity: Community, Culture, Difference*, ed. Jonathan Rutherford (London: Lawrence & Wishart, 1990), hlm. 222–240.

4.2.2. Pasifikasi Aceh (1914–1930)

Setelah perang selama empat dekade yang berakhir pada 1914, Belanda secara resmi menyatakan bahwa Aceh telah “aman” untuk pemerintahan sipil. Namun, upaya Belanda untuk menundukkan Aceh menciptakan tatanan sosial yang stabil, patuh, dan terhubung secara fungsional ke pusat kekuasaan kolonial di Batavia, tidak berakhir dengan penguasaan militer semata.¹⁹¹ Aceh memasuki fase baru dalam sejarahnya yang disebut sebagai pasifikasi Aceh, sebuah proses politik, sosial, dan budaya untuk mengintegrasikan wilayah taklukan ke dalam kerangka kolonial Hindia Belanda. Pasifikasi Aceh merupakan proses sistematis yang melibatkan penanaman disiplin administratif, ekonomi, dan pembentukan struktur sosial baru yang kompatibel dengan kepentingan kolonial.

Sejak tahun 1915, pemerintah kolonial secara bertahap mengganti pendekatan koersif dengan metode pasifikasi administratif. Laporan Gouvernements-Secretarie Batavia tahun 1915, menyatakan bahwa Aceh telah aman untuk dikelola secara sipil.¹⁹² Namun bagi rakyat Aceh, kekalahan itu justru menjadi awal dari bentuk penaklukan yang lain, yaitu penaklukan ke dalam tatanan sosial, struktur politik, dan sistem nilai kehidupan sehari-hari. Pemerintah kolonial membentuk birokrasi sipil yang diisi oleh pegawai-pegawai bumiputera, mayoritas dari luar Aceh seperti Jawa dan Minangkabau.¹⁹³ Strategi ini merupakan implementasi dari saran-saran yang telah dikembangkan oleh Snouck Hurgronje

¹⁹¹ Paul van 't Veer, *Perang Aceh* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1985), hlm. 165.

¹⁹² *Verslag van den Staat van Atjeh en Onderhoorigheden*, Gouvernements-Secretarie Batavia, 1915.

¹⁹³ C. Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, terj. A. W. S. O'Sullivan (Leiden: Brill, 1906), hlm. 234–250.

sejak dekade sebelumnya. Dalam *De Atjehers* (1893), Hurgronje menulis bahwa untuk menguasai Aceh secara efektif, Belanda harus mengosongkan isi kekuasaan lokal dari semangat Islam politik dan menggantinya dengan sistem administratif yang tunduk pada kolonialisme.¹⁹⁴

Di berbagai wilayah Aceh, struktur pengawasan diperkuat melalui pembangunan kantor *kontrolir*, pemasangan sistem pencatatan penduduk, dan pembangunan jalan-jalan untuk mempercepat mobilisasi aparat.¹⁹⁵ Aceh menjadi wilayah yang sepenuhnya terhubung secara administratif ke Batavia, dan terputus dari akarnya sendiri. Dalam istilah Michel Foucault, masyarakat Aceh selain ditaklukkan secara politik, juga diatur, dipantau, dan dibentuk ulang landasan berpikirnya dalam kerangka logika kolonial.¹⁹⁶ Selain melalui administrasi, pasifikasi juga menyasar pemaknaan ulang identitas Aceh. Upaya Belanda untuk mendefinisikan ulang keacehan sebagai bagian dari identitas “Hindia Belanda” menjadi salah satu strategi jangka panjang. Media cetak, pameran budaya, dan dokumentasi resmi kolonial digunakan untuk menampilkan narasi Aceh yang sudah terintegrasi, dan siap menjadi bagian dari proyek nasional Hindia Belanda.¹⁹⁷ Meski demikian, di bawah permukaan terdapat resistensi kultural yang kuat. Sebagian besar masyarakat Aceh masih menunjukkan ketidakpercayaan terhadap simbol-simbol kekuasaan kolonial yang dianggap kafir.

¹⁹⁴ Snouck Hurgronje, *De Atjehers* (Leiden: Brill, 1893), hlm. 79.

¹⁹⁵ Poerwanto, *Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 58.

¹⁹⁶ Michel Foucault, *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–1978*, ed. Michel Senellart (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hlm. 103.

¹⁹⁷ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Leiden: KITLV Press, 2005), hlm. 212.

Pasifikasi ini membawa perubahan besar dalam kesadaran kolektif masyarakat Aceh. Dalam waktu kurang dari satu dekade pasca kebijakan pasifikasi, Belanda berhasil mengubah wajah kekuasaan di Aceh dari yang berasaskan Islam berganti dengan sekularisme. Meskipun demikian, hegemoni Belanda tidak pernah benar-benar memadamkan semangat keacehan yang berakar pada Islam dan sejarah panjang kedaulatan. Fase ini merupakan landasan bagi transformasi lebih lanjut yang akan terjadi pada proses integrasi nasional Indonesia dan revolusi kemerdekaan.

4.2.2.1. Transformasi Pendidikan Aceh: Pelarangan Sistem Pendidikan Orisinil Aceh dan Penerapan Pendidikan Sekuler Belanda

Salah satu target utama dalam pasifikasi ini adalah penghapusan sistem pendidikan tradisional Aceh yang berasas Islam. Pendidikan di Aceh yang terdiri dari *meunasah*¹⁹⁸ di tingkat dasar, *ranggang* di tingkat menengah, dan *dayah*¹⁹⁹ di

¹⁹⁸ *Meunasah* dalam konteks ini memiliki makna yang sangat berbeda dibandingkan dengan *meunasah* pada masa kini yang ada di setiap kampung di Aceh. Saat ini, *meunasah* lebih dipahami sebagai tempat pelaksanaan ibadah shalat berjamaah dan pertemuan masyarakat kampung atau dapat dikatakan setara dengan balai desa dalam konteks administrasi Indonesia saat ini. Makna dan fungsi *meunasah* pada masa Kesultanan Aceh, berperan sebagai lembaga pendidikan formal tingkat dasar tempat anak-anak memperoleh pelajaran. *meunasah* = Madrasah.

¹⁹⁹ *Dayah* yang banyak terdapat di Aceh saat ini tidak memiliki keterkaitan langsung—baik secara definisi, jalur keilmuan, kurikulum, maupun fungsi—dengan *dayah* pada masa Kesultanan Aceh. Persamaan antara keduanya hanya terletak pada penggunaan nama yang diambil dari lembaga pendidikan Aceh pada masa tersebut. *Dayah* pada masa sekarang merupakan lembaga pendidikan informal yang setara dengan pondok pesantren dalam konteks pendidikan di Indonesia. Lembaga ini berfokus pada pendidikan agama Islam melalui sistem pengkaderan yang mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda. Kurikulumnya merujuk pada sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dari Sumatra Barat dengan pendekatan sekuler, yakni paradigma yang memisahkan antara agama dan politik atau negara. Oleh karena itu, materi ajar di *dayah* modern terbatas pada ilmu fikih, tasawuf, dan akidah, tanpa mencakup pelajaran umum. Hampir seluruh *dayah* yang ada di Aceh saat ini merujuk pada model pendidikan *Dayah Darussalam Labuhan Haji* di Aceh Selatan, yang didirikan oleh Abuya Muda Wali pada masa penjajahan Belanda. Hal ini sangat berbeda dengan *dayah* pada masa Kesultanan Aceh, yang merupakan lembaga pendidikan formal setara dengan universitas-universitas lainnya di dunia Islam

tingkat universitas, telah membentuk kerangka berpikir politik, sosial, dan hukum masyarakat. Bagi rakyat Aceh, pendidikan adalah manifestasi dari keyakinan bahwa kehidupan dunia adalah pengabdian terhadap Tuhan, termasuk dalam ranah penelitian, pemerintahan, dan hukum.²⁰⁰

Snouck Hurgronje, seorang orientalis Belanda dan ahli Islam dan ahli Arab terkemuka yang beragama Kristen, memberikan landasan teoritis bagi kebijakan kolonial Belanda terhadap lembaga pendidikan orisinil Aceh. Sebagai seorang humanis liberal yang tidak mau berkompromi, Snouck Hurgronje memandang eratnya hubungan antara agama dan politik di kalangan Aceh sebagai musuh utama bagi perdamaian dan kemajuan kolonial Belanda. Atas dasar itu, Snouck Hurgronje menyarankan kebijakan ganda. Pertama, pemerintah kolonial harus mengakui dan melindungi ruang ekspresi agama berupa ritual termasuk pelaksanaan ibadah haji dengan menjaga sikap netral dan toleran yang ketat dalam ranah ritual dan spiritual. Kedua, pemerintah harus tanpa ragu untuk menghancurkan sehancur-hancurnya para intelektual dan ulama mana saja di Aceh untuk menghilangkan sumber keilmuan dan paradigma Aceh yang orisinil.²⁰¹

Snouck Hurgronje juga mendorong perluasan pendidikan Barat sekuler untuk menciptakan elite baru di kalangan pribumi. Ia percaya bahwa dengan menanamkan nilai-nilai budaya Barat, akan tercipta generasi baru yang sekuler an

saat itu. Pada masa itu, dayah menjadi pusat studi bagi para pelajar dari berbagai penjuru dunia dan mengajarkan berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama.

²⁰⁰ A. Hasjmy, "Naskah Tentang Adat Aceh dan Perkembangannya," Banda Aceh: BPPD, 1983, hlm. 48.

²⁰¹ C. Snouck Hurgronje, *Nederland en de Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1915), hlm. 45–47

terasing dari *worldview* Islam dan nilai-nilai Keacehan.²⁰² Dalam “De Atjehers” (1893), Snouck Hurgronje merekomendasikan bahwa untuk melemahkan potensi perlawanan Aceh, Belanda harus menghancurkan dan mengendalikan institusi pendidikan Aceh.²⁰³ Sebagai respons, pemerintah kolonial mengeluarkan serangkaian kebijakan yang membatasi aktivitas pendidikan Aceh. Banyak *meunasah*, *ranggang* dan *dayah* ditutup, dibakar, dihancurkan, dan bagi yang bertahan, dikenakan pembatasan kurikulum. Pengajaran yang terkait dengan ilmu pengetahuan umum, hukum Islam, politik, dan sejarah perjuangan keislaman dilarang. Buku-buku teks yang digunakan di *dayah* tradisional diganti dengan bahan ajar yang hanya memuat aspek ritual dan spiritual saja, dan para guru harus memperoleh izin dari pemerintah untuk mengajar.²⁰⁴

Untuk menggantikan peran *meunasah*, *volkschool* pertama di Aceh didirikan pada tahun 1907 di Banda Aceh.²⁰⁵ Sekolah ini menawarkan pendidikan dasar tiga tahun dalam bahasa Melayu dengan aksara Latin. Namun, sekolah ini awalnya kurang mendapat sambutan. Dalam sepuluh tahun pertama, masyarakat Aceh menganggap sekolah Belanda sebagai pendidikan untuk menjadi orang kafir karena didasarkan pada paradigma kafir. Dari sinilah asal-muasal munculnya ungkapan dalam masyarakat Aceh yang berbunyi “Bek panyang that kajak sikula,

²⁰² Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005), hlm. 218.

²⁰³ Snouck Hurgronje, “De Atjehers,” Leiden: Brill, 1893, hlm. 77–79.

²⁰⁴ Gouvernements-Secretarie Batavia, “Verslag van den Staat van Atjeh en Onderhoorigheden,” 1915.

²⁰⁵ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 32-33.

jeut keu kaphe”, ‘Jangan terlalu tinggi sekolah, nanti jadi kafir’.²⁰⁶ Sampai penghujung 1919, ketika siswa *volkschool* ini sudah berjumlah sekitar 15.000, masih diperlukan paksaan bagi siswa untuk menghadiri kelas. Bahkan ayah siswa yang tidak menghadiri sekolah harus bekerja paksa di proyek pembangunan jalan.²⁰⁷

Meskipun demikian, pada 1935 jumlah siswa *volkschool* yang bersekolah secara sukarela mencapai lebih dari 33.000, bahkan lebih banyak dari daripada jumlah siswa yang bersekolah di pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar.²⁰⁸ Hal ini menunjukkan perubahan sikap yang sejalan dengan meningkatnya antusiasme terhadap modernisasi di awal 1920-an, yang juga dipelopori oleh Sarekat Islam. Kehidupan kota dan kebutuhan akan keterampilan baru mendorong rakyat Aceh untuk melihat pendidikan sebagai jalan baru menuju mobilitas sosial.²⁰⁹ Namun, pendidikan dasar tiga tahun yang disediakan lewat *Volkschool* tidak lagi memuaskan masyarakat Aceh yang telah merasakan kehidupan kota. Selain pendidikan menengah Melayu dua tahun untuk kalangan mampu, gubernemen hampir tidak memberi jalan bagi rakyat biasa untuk

²⁰⁶ Sejarah lisan, yang diceritakan oleh Teungku Cut Ali ben Muhammad Richad kepada penulis di tahun 2016. Teungku Cut Ali ben Muhammad Richad telah hidup sejak masa kolonial Belanda dan menempuh pendidikan kolonial sejak tahun 1920-an.

²⁰⁷ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 32.

²⁰⁸ *Verslag van den Staat van Atjeh en Onderhoorigheden* Tahun 1935 (Batavia: Landsdrukkerij, 1936), bagian Onderwijs; *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië* Tahun 1936, bagian Onderwijs in Atjeh en Onderhoorigheden. Data mengenai jumlah murid *Volksschool* tahun 1935 juga dikutip dalam *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm. 70–72.

²⁰⁹ *Memorie van Overgave van den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden*, A.H. Philips, 31 Mei 1932; *Verslag van den Staat van Atjeh en Onderhoorigheden* Tahun 1935, bagian Onderwijs.

menikmati pendidikan Barat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kebutuhan melanjutkan pendidikan di Aceh banyak dipenuhi oleh pihak swasta.²¹⁰

Dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Taman Siswa, mulai masuk ke Aceh masing-masing pada 1928 dan 1932.²¹¹ Pada 1938, kedua organisasi ini telah menjalankan tujuh HIS di berbagai kota di Aceh, hampir setara dengan jumlah HIS yang dijalankan pemerintah kolonial. Mereka juga mendirikan taman kanak-kanak, sekolah penghubung, dan sekolah pendidikan guru. Walau berusaha menyampaikan pesan-pesan kebangsaan dan persatuan nasional dengan corak-corak Aceh, Muhammadiyah tetap dicap “Minang” dan Taman Siswa dicap “Jawa” oleh masyarakat Aceh. Hingga 1942, sebagian besar tenaga pengajar berasal dari luar Aceh.²¹²

Pasifikasi pendidikan juga diarahkan khusus untuk mencetak calon birokrat baru dari kalangan *uleebalang*. Sekolah-sekolah seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dibuka untuk mendidik putera-putera *uleebalang* dalam bahasa, pandangan hidup, dan praktik birokrasi kolonial.²¹³ Pada 1938, terdapat 8 HIS di Aceh dengan 1.500 murid. Beberapa siswa yang berprestasi lebih baik dikirim ke Bukittinggi atau Jawa untuk belajar di sekolah lanjutan Belanda, meskipun Sekolah

²¹⁰ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 32-33.

²¹¹ *Verslag van den Staat van Atjeh en Onderhoorigheden* Tahun 1928 dan Tahun 1932, bagian mengenai organisasi sosial dan pendidikan; Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 97–118.

²¹² Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 33.

²¹³ *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië* Tahun 1938, bagian Hollandsch-Inlandsche Scholen; S. L. van der Wal (ed.), *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indië 1900–1940* (Groningen: J.B. Wolters, 1963).

Menengah Pertama (MULO) didirikan di Aceh pada 1930 untuk mengakomodasi kebutuhan lokal.²¹⁴

Dampak dari sekularisasi pendidikan ini sangat mendalam. Generasi muda Aceh yang terdidik di sekolah kolonial mulai terpisah secara epistemologis dari tradisi Islam yang mendasari identitas kolektif Aceh. Mereka menginternalisasi *worldview* sekuler, dimana agama dipandang sebagai urusan privat dan tidak relevan dalam tata kelola pemerintahan. Ini sejalan dengan pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam “*Islam and Secularism*” (1993), bahwa sekularisasi pendidikan adalah instrumen utama untuk menggeser paradigma masyarakat Muslim dari tauhid ke rasionalisme sekuler.²¹⁵

4.2.3. Upaya Awal Integrasi Aceh oleh Organisasi-Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia (1916–1930)

Pada dekade kedua abad ke-20, Aceh untuk pertama kalinya dihadapkan dengan gagasan baru tentang “Persatuan Nasional” yang dibawa oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional. Sebuah ide tentang persatuan nasional yang tidak berasal dari identitas Aceh sebagai sebuah bangsa, tetapi ide persatuan nasional yang lebih luas atas wilayah pemerintahan kolonial Hindia Belanda.²¹⁶ Inilah masa awal upaya integrasi Aceh ke dalam ide nasionalisme Indonesia, sebuah ide yang

²¹⁴ *Verslag van den Staat van Atjeh en Onderhoorigheden* Tahun 1938, bagian Middelbaar Onderwijs; C.E. Maier, *Memorie van Overgave, Assistent-Resident van Groot Atjeh*, 17 Juni 1935; lihat pula artikel “MULO Koetaradja dan Kontribusinya bagi Pergerakan Nasional di Aceh Abad XX” yang mengutip langsung arsip tersebut.

²¹⁵ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hlm. 21–23.

²¹⁶ Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* (The Hague: W. van Hoeve, 1960), hlm. 67–82.

asing bagi banyak orang Aceh. Salah satu organisasi pertama yang membawa gagasan ini ke Aceh adalah Sarekat Islam (SI), didirikan pada 1912 di Surakarta.²¹⁷ SI berkembang pesat dan membawa semangat solidaritas antarpribumi melawan tekanan sosial dari Belanda dan Tionghoa. Pada tahun 1916, sejumlah pemuda terpelajar Aceh telah mengetahui keberadaan SI dan mulai tertarik dengan semangat yang dibawanya.²¹⁸

Namun, penerimaan gagasan ini hanya pada segelintir elit saja. Pemerintahan kolonial yang sekuler dipandang sebagai pemerintahan kafir oleh rakyat Aceh.²¹⁹ Istilah *kaphe* 'kafir' digunakan secara luas oleh rakyat Aceh untuk menyebut seluruh elemen pemerintahan kolonial Belanda, termasuk pegawai pemerintah etnis pribumi yang mayoritas dari Jawa dan Minangkabau.²²⁰ Sekitar 8000 migran Minangkabau yang menetap di Aceh pada masa ini pun tak luput dari julukan *Kaphe Padang* (Kafir Padang) karena dianggap tunduk pada pemerintah kafir dan meninggalkan prinsip Islam yang kaffah.²²¹ Walaupun SI mengangkat semangat keadilan dan persatuan umat Islam, bagi rakyat Aceh gerakan itu tetap berada di bawah legitimasi pemerintahan kafir.²²² Sebagian bahkan mencela SI

²¹⁷ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 24–31.

²¹⁸ Takashi Shiraishi, *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), hlm. 41–58.

²¹⁹ Christiaan Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, Vol. II (Leiden: E.J. Brill, 1906), hlm. 291–302.

²²⁰ *Memorie van Overgave van den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden* A.H. Philips, 31 Mei 1932.

²²¹ *Volkstelling 1930: Deel VIII, Inheemsche Bevolking van Sumatra* (Batavia: Landsdrukkerij, 1935); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 24–31.

²²² Takashi Shiraishi, *An Age in Motion*, hlm. 55–73.

sebagai gerakan yang mengemis keadilan kepada penjajah.²²³ Namun, ada sebagian kecil elite Aceh yang mulai terpengaruh, terutama yang telah mengenyam pendidikan kolonial di Bukittinggi.²²⁴

Di Lhokseumawe, Sarekat Islam didukung tiga *uleebalang* muda, Teuku Rhi Boedjang dari Nisam, Teuku Mat Said dari Cunda, dan Teuku Abdul Latif dari Geudong. Mereka adalah alumni sekolah Gubernemen dan membawa ide pembaruan. Ketiganya mendirikan koperasi rakyat, menentang kerja paksa, dan membentuk organisasi seperti “Islam Menjadi Satu”. Seiring dengan penyebaran gerakan ini di daerah pantai utara Aceh di sekitar Lhokseumawe, para anggota disumpah untuk saling membantu dan melindungi melalui apa yang disebut sumpah air dengan bacaan surat Yasin dari Al Qur'an. Air yang dikatakan telah didatangkan dari Sarekat Islam di Pulau Jawa diminum sementara surat Yasin dibacakan untuk memperkuat ketetapan hati.²²⁵

Gagasan persatuan ini sempat menyentuh hati Teuku Maharaja dari Lhokseumawe yang mendukung Sarekat Islam setelah kembali dari Batavia dengan kesan bahwa gerakan itu kuat dan mampu mendikte Gubernur Jenderal. Tetapi sebagian *uleebalang* lain tetap skeptis, mempertanyakan kenapa mereka harus mengikuti organisasi yang tidak berasal dari Aceh. Usaha membentuk “*Uleebalang*

²²³ *Mailrapporten Gouvernement Atjeh* Tahun 1918–1921.

²²⁴ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 24–31.

²²⁵ *Politiek Verslag van Atjeh en Onderhoorigheden, 1921* (Koetaradja: Gouvernementssecretarie, 1922); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 26.

Sepakat” pun gagal. Pemerintah kolonial akhirnya menangkap ketiga pemimpin tersebut pada 1921 dan membuang mereka.²²⁶

Walau gerakan ini meredup, benih nasionalisme tetap tumbuh lewat pendidikan Belanda. Teuku Mohammad Thajeb dan Teuku Nyak Arif menjadi anggota Volksraad, tetapi karena dukungan mereka terhadap gerakan nasional Indonesia, keduanya dicopot dari jabatan oleh pemerintah kolonial. Upaya lain datang dari Muhammadiyah yang membuka sekolah di Aceh sejak 1928. Meskipun dikenal sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah tetap sulit diterima karena dianggap di bawah pemerintahan kafir. Pada 1932, hanya 7% anggotanya merupakan orang Aceh asli dan dari 50 siswa di sekolah Muhammadiyah Lhokseumawe, hanya dua yang berasal dari bangsa Aceh.²²⁷ Mayoritas masyarakat Aceh menolak mengirim anaknya ke sekolah modern karena dianggap mengajarkan Islam dalam paradigma kafir, yaitu menjadikan agama hanya urusan pribadi tanpa kaitan dengan negara dan hukum publik.

Satu hal penting yang perlu dicatat adalah perbedaan perlakuan pemerintah kolonial Belanda terhadap kelompok-kelompok resisten di Aceh dibandingkan wilayah lain di Hindia Belanda. Di daerah seperti Jawa, organisasi yang dipimpin kalangan terpelajar seperti SI dan Muhammadiyah mendapat ruang berkembang walau diawasi ketat. Namun di Aceh, setiap percobaan keterlibatan politik dari elite lokal, sekalipun dalam kerangka organisasi nasional yang sah, langsung direspons

²²⁶ *Politiek Verslag van Atjeh en Onderhoorigheden over het jaar 1921* (Koetaradja: Gouvernementsdrukkerij, 1922); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 27.

²²⁷ *Verslag van den Staat van Atjeh en Onderhoorigheden over het jaar 1932* (Koetaradja: Gouvernementsdrukkerij, 1933); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 27.

dengan pembuangan atau pemecatan. Hal ini menunjukkan bahwa Aceh tetap dianggap sebagai wilayah berisiko tinggi oleh Belanda karena watak politik Islamnya yang tidak terpisahkan dari semangat perlawanan terhadap penjajahan. Pada akhirnya, nasionalisme Indonesia tetap menjadi proyek para elit terpelajar, terpisah dari arus bawah masyarakat.²²⁸

4.2.4. Integrasi Nasional Indonesia di Aceh Periode 1930–1942

Antara tahun 1930 hingga 1942, Aceh mengalami masa perubahan besar yang menentukan arah masa depannya sebagai bagian dari Indonesia. Selama ratusan tahun, masyarakat Aceh hidup dalam *worldview* Islam, agama dipandang sebagai fondasi hukum, budaya, dan kekuasaan. Pandangan tersebut kemudian berubah dengan lahirnya generasi baru yang menempuh pendidikan modern. Sebuah generasi yang tidak lagi merasa bahwa penyelenggaraan negara merupakan juga penyelenggaraan agama.²²⁹

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab 4.2.2.1, bahwa sekolah pemerintah kolonial secara umum ditolak oleh masyarakat Aceh.²³⁰ Pemerintah kolonial memberi ruang bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional dari Jawa dan Sumatra Barat untuk mendirikan sekolah-sekolah agama di Aceh. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut kemudian menjadi bagian dari perluasan sistem

²²⁸ *Koloniaal Verslag over het jaar 1921* (Batavia: Landsdrukkerij, 1922); Robert van Niel, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite* (The Hague: W. van Hoeve, 1960), hlm. 101;

²²⁹ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm., 31–36.

²³⁰ A. Vogel, *Verslag betreffende het Volksonderwijs in het Gewest Atjeh en Onderhoorigheden* (Batavia: Landsdrukkerij, 1919), hlm. 1–10; *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1982), hlm. 50–55.

pendidikan modern sebagai bagian dari agenda pembentukan paradigma sekuler.²³¹

Upaya tersebut pada umumnya ditolak masyarakat Aceh karena sekolah-sekolah itu dipandang sebagai bagian dari institusi kafir.²³² Meskipun demikian, model pendidikan yang diperkenalkan justru menarik perhatian sebagian *teungku*, terutama mereka yang telah berinteraksi dengan administrasi kolonial.²³³ Memasuki tahun 1920-an, mereka mulai berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah agama dengan mengadopsi sistem persekolahan modern dan merekrut tenaga pengajar dari lulusan sekolah-sekolah agama di Padang dan Jawa. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan organisasi pergerakan nasional, lembaga-lembaga ini memperoleh sambutan luas karena didirikan oleh *teungku-teungku* asli Aceh yang memiliki legitimasi di tengah masyarakat. Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya menjadi pesaing *Volksschool*, tetapi bahkan menjadikan kelulusan *Volksschool* sebagai salah satu syarat penerimaan siswa. Menjelang akhir dekade 1920-an, lembaga-lembaga pendidikan ini berkembang pesat di berbagai wilayah Aceh.²³⁴

Para *uleebalang* pun ikut serta sebagai pelindung dan sponsor sekolah-sekolah baru ini.²³⁵ Beberapa sekolah yang terkenal: Perguruan Islam Teungku

²³¹ *Verslag van den Staat van Atjeh en Onderhoorigheden over het jaar 1928* (Koetaradja: Gouvernementsdrukkerij, 1929); *Koloniaal Verslag over het Jaar 1918* ('s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1919), hlm. 278–281; A.Ph. van Aken, *Memorie van Overgave van den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden* (Kutaradja, Februari 1936), hlm. 62–67.

²³² Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 37–45

²³³ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 26.

²³⁴ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, hlm. 118–126; Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 60–68; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 27.

²³⁵ *Koloniaal Verslag over het Jaar 1930* ('s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1931), bagian "Onderwijs"; *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900–1942)* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 58–60.

Abdul Wahab di Seulimeum (1926), Madrasah Ahlu's-Sunnah Wal Jama'ah di Idi (1928), Al-Islam Peusangan (1930), dan Jamiatuddiniyah Al-Mustaslah (1931).²³⁶ Oleh karena dipimpin oleh orang-orang asli Aceh, sekolah-sekolah ini punya pengaruh yang besar, bahkan melebihi pengaruh Muhammadiyah. Kaum muda lulusan Thawalib dan sekolah reformis lainnya berani menentang tradisi, bahkan soal-soal kecil seperti adat pemakaman. Ini memicu konflik dengan kaum tua.²³⁷

Salah satu tokoh sentral masa ini adalah Muhammad Daud Beureueh. Lahir 1899, ia tidak pernah belajar di lembaga pendidikan Belanda, tapi berpikiran terbuka terhadap perubahan ini. Ia dikenal sebagai orator ulung dan organisator yang baik. Pada 1930, ia mendirikan sekolah agama Jami'atul Diniyah di Garot, Pidie. Meski berkonflik dengan *uleebalang* Keumangan, ia mendapat perlindungan Tuanku Raja Keumala, penasihat Gubernur Belanda urusan Agama, ia berturut-turut mengajar di Tapaktuan dan Lhokseumawe.²³⁸ Di dua tempat ini ia menunjukkan keahlian dan semangat yang hebat dalam mengatasi pertentangan antara "kaum muda" dan "kaum tua".²³⁹ Pada masa ini, ia lebih dikenal sebagai seorang organisator dan penengah ketimbang sebagai seorang ulama. Namun ia

²³⁶ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Islamic Schooling in Aceh: Change, Reform, and Local Context," *Studia Islamika* 20, no. 3 (2013): 474–476; *Gerakan Nasionalisme di Aceh (1900–1942)*, hlm. 58–60

²³⁷ Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 121–132; Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 97–108.

²³⁸ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh* (Jakarta: Media Dakwah, 1982), hlm. 17–24; A. Hasjmy, *Semangat Merdeka*, hlm. 78–82; *Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900–1942* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 61–64; A. Hasjmy, *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 73–78.

²³⁹ *Memorie van Overgave van den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden* (Kutaradja, 1936), bagian mengenai *Inlandsche Godsdienstzaken*; A. Hasjmy, *Semangat Merdeka*, hlm. 82–85.

mendapat dukungan dari para tokoh dan para cendekiawan senior Aceh seperti Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dan bahkan ulama pengasingan Tengku Syech Abdul Hamid yang menulis surat dari Mekah berisi saran-saran pembaharuan dalam pendidikan Islam dengan mengambil contoh-contoh pendidikan Islam di Mesir dan Negeri Arab di bawah Raja Ibnu Saud. Jami'atul Diniyah berkembang cepat. Sekolah pertama berdiri di Blang Pase (1931), lalu menyusul di Ië Leubeue dan Kelapa Satu.²⁴⁰

Jamiatul Diniyah memang mendapatkan perlindungan dari Tuanku Raja Keumala dan beberapa *uleebalang* lainnya turut terlibat pendiriannya. Namun, berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang hanya mengandalkan pada perlindungan satu *uleebalang*, lembaga ini tidak dapat sepenuhnya bergantung pada satu *uleebalang* saja. Di wilayah Pidie, persaingan *uleebalang* begitu tajam, dan yang paling kuat sekaligus paling kaya adalah *uleebalang* Keumangan yang justru memusuhi kehadiran Jamiatul Diniyah. Ketegangan ini yang semula tampak sebagai kelemahan, justru menjadi kekuatan tersendiri di tangan Daud Beureueh. Ia langsung menyapa rakyat melalui serangkaian ceramah umum yang disampaikan di masjid-masjid. Jika di kota-kota besar gerakan pembaruan Islam hanya mampu mengumpulkan ratusan peserta, maka di tangan Daud Beureueh, tabligh Jamiatul Diniyah mampu menarik hingga 7.500 orang desa yang rela jauh-jauh berjalan kaki untuk mendengarkannya.²⁴¹

²⁴⁰ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, hlm. 25–29; *Gerakan Nasionalisme di Aceh 1900–1942* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 64–66; A. Hasjmy, *Semangat Merdeka*, hlm. 86–88.

²⁴¹ A.Ph. van Aken, *Memorie van Overgave van den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden* (Kutaradja, 1936), bagian Zelfbestuurders; M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh* (Jakarta: Media Dakwah, 1982), hlm. 31–35.

Dalam setiap tabligh yang diadakan, masyarakat Aceh sebenarnya paling menantikan suara dari pemimpin muda gerakan ini, Daud Beureueh.²⁴² Kebangkitan ini juga mendapat ruang dan dukungan dari pemerintah kolonial Belanda dan para *uleebalang*. Semangat baru ini dinilai positif dan didukung karena mampu meredakan perlawanan bersenjata dari rakyat Aceh.²⁴³ Dalam jangka panjang, gerakan ini terbukti lebih efektif dibandingkan Sarekat Islam dalam mengarahkan masyarakat Aceh ke jalan persatuan dalam bingkai Indonesia. Bagi pemerintah kolonial, perubahan yang terlihat di Aceh sejak awal 1930-an ini disebut sebagai era normalisasi.²⁴⁴ Menjelang tahun 1940, praktik seperti *Atjeh-moord/Aceh Pungo* (serangan bunuh diri yang menasar pejabat kolonial) dan sumpah mati syahid sebagai seorang muslim sudah tidak lagi ditemukan.²⁴⁵

Puncak perkembangan gerakan pembaruan Islam yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Aceh ini tercapai melalui pembentukan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada 1939. Organisasi ini lahir dari konferensi yang dipersiapkan oleh Tengku Abdul Rahman dari Perguruan Al-Islam di Peusangan pada Mei 1939. Konferensi tersebut menempatkan standardisasi pendidikan Islam sebagai agenda

²⁴² M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh* (Jakarta: Media Dakwah, 1982), hlm. 35–40; A. Hasjmy, *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 88–91.

²⁴³ A.Ph. van Aken, *Memorie van Overgave van den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden* (Kutaradja, 1936), bagian *Politieke Toestand* dan *Godsdienstzaken*; *Koloniaal Verslag over het Jaar 1938* ('s-Gravenhage: Algemeene Landsdrukkerij, 1939), bagian Atjeh en Onderhoorigheden.

²⁴⁴ A.Ph. van Aken, *Memorie van Overgave van den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden*, bagian *Politieke Toestand*; *Koloniaal Verslag over het Jaar 1938*, bagian Atjeh en Onderhoorigheden.

²⁴⁵ *Gouvernement van Atjeh en Onderhoorigheden, Politiek Verslag van Atjeh en Onderhoorigheden* (1937–1939); A.Ph. van Aken, *Memorie van Overgave van den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden*, bagian *Veiligheid en Rust*;

utama dan menghimpun sebagian besar pemimpin sekolah Islam modern yang didirikan oleh orang Aceh. Pembentukan PUSA menyatukan jaringan ulama, guru, dan lembaga pendidikan, yang sebelumnya berkembang secara terpisah.²⁴⁶

Susunan pimpinan PUSA memperlihatkan kuatnya pengaruh Pidie dan pantai utara Aceh dalam organisasi tersebut. Daud Beureueh terpilih sebagai ketua, Noer El Ibrahimy sebagai Sekretaris I, dan T.M. Amin sebagai bendahara. Ketiganya menetap di Sigli, yang kemudian menjadi tempat sekretariat PUSA. Tengku Abdul Rahman menjabat sebagai wakil ketua, sedangkan Ismail Yakoeb dari Bireuen menjadi Sekretaris II dan sekaligus penyunting majalah Penjoeloeh. Aceh Barat tidak memiliki perwakilan dalam kepengurusan karena gerakan pembaruan pendidikan Islam di wilayah tersebut telah dilarang oleh pemerintah Belanda sejak 1926, setelah serangan yang dilakukan oleh pergerakan Teuku Cut Ali. Aceh Besar diwakili oleh Tengku Abdul Wahab dari Seulimeum, meskipun PUSA harus menghadapi kelompok-kelompok yang telah memiliki kedudukan kuat di wilayah tersebut.²⁴⁷

Aceh Besar telah berkembang sebagai pusat gerakan Muhammadiyah, tempat tinggal sejumlah *uleebalang* progresif, dan menjadi tujuan para pemuda Aceh yang kembali setelah memperoleh pendidikan modern serta nasionalisme Indonesia di Sumatra Barat. Lingkungan tersebut melahirkan berbagai kelompok

²⁴⁶ A. Hasjmy, *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 98–101; M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh* (Jakarta: Media Dakwah, 1982), hlm. 45–48.

²⁴⁷ A. Hasjmy, *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 98–101; M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh* (Jakarta: Media Dakwah, 1982), hlm. 45–48.

pembaharu Islam. Pada 1938, Ali Hasymy bersama sejumlah guru lulusan Minangkabau mendirikan organisasi pemuda yang kemudian dikenal sebagai Peramiindo. Perkembangan kelompok-kelompok tersebut memperluas jaringan pembaruan dari lingkungan sekolah dan ulama ke kalangan pemuda.²⁴⁸

Kongres pertama PUSA yang diselenggarakan di sekitar Sigli pada April 1940 memperkuat kedudukan organisasi tersebut setelah menghimpun sejumlah organisasi yang telah berdiri sebelumnya. Kasysyafatul Islam, organisasi kepanduan yang didirikan di Bireuen pada 1934, menjadi organisasi kepanduan PUSA. Peramiindo di Seulimeum dan Pemuda Aceh Sepakat di Sigli di bawah pimpinan Hasan Aly bergabung dengan PUSA sambil mempertahankan identitas organisasi masing-masing. Kedua kelompok tersebut menolak bergabung dengan Pemuda PUSA.²⁴⁹

Pemuda PUSA dibentuk dalam Kongres 1940. Tengku Amir Hoesain, seorang pemuda dari Idi, Aceh Timur, mengajukan diri untuk memimpin barisan pemuda dengan seruan, “Saya sanggup!” Kongres menentukannya sebagai pemimpin Pemuda PUSA dan menjadikan Idi sebagai pusat organisasi. Amir Hoesain kemudian memperoleh gelar Al-Mujahid. Pemuda PUSA menghimpun banyak pengikut dari kalangan pelajar sekolah agama, sedangkan corak gerakannya

²⁴⁸ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, hlm. 51–54.

²⁴⁹ A. Hasjmy, *Semangat Merdeka*, hlm. 109–113; Persatuan Ulama Seluruh Aceh, *Laporan Kongres PUSA Pertama* (Sigli, 1940); *Penjoeloeh*, 1940; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 26.

kurang menarik bagi sebagian pemuda perkotaan dan pemuda yang memperoleh pendidikan umum non keagamaan.²⁵⁰

Beberapa kelompok ulama tetap berada di luar PUSA. Sejumlah pengajar yang berhaluan konservatif, terutama di Aceh Besar dan Aceh Barat, mempertahankan jarak dari gerakan pembaruan tersebut. Teungku Mohammad Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ahli teologi Islam terkemuka dari Muhammadiyah, juga tidak bergabung dengan PUSA. Meskipun demikian, pada 1941 PUSA telah berkembang sebagai organisasi yang mewakili “suara rakyat Aceh”. Kedudukan tersebut memperluas pengaruh para pemimpin PUSA dalam membentuk orientasi pendidikan, keagamaan, dan sosial masyarakat Aceh.²⁵¹

Pertumbuhan PUSA berlangsung dalam situasi yang memperlihatkan perubahan orientasi politik pemerintah kolonial terhadap gerakan Islam di Aceh. Sejak masa awal penaklukan, kekuatan ulama dipandang sebagai salah satu sumber utama perlawanan. Pada dekade 1930-an, pemerintah Belanda lebih mencurigai Muhammadiyah karena organisasi tersebut berasal dari luar Aceh dan terbuka terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia. Nasionalisme telah menggantikan Islam sebagai perhatian utama pemerintah kolonial karena membuka kemungkinan terbentuknya hubungan politik antara masyarakat Aceh dan gerakan yang berkembang di wilayah lain di Hindia Belanda.²⁵²

²⁵⁰ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 26-32; M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh* ; A. Hasjmy, *Semangat Merdeka* .

²⁵¹ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, hlm. 58–61; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 26-32.

²⁵² Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 26-32.

Pejabat-pejabat Belanda di Aceh menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap gerakan pembaruan yang menegaskan identitas Aceh. Gubernur Goedhart menyatakan:

“Saya tidak berputus asa bahwa pada akhirnya akan tercapai saling pengertian yang baik antara kita dan rakyat Aceh. Eksklusivitas orang Aceh dan harga dirinya yang besar, menurut perhitungan saya, akan meyakinkan mereka bahwa akan lebih bermanfaat bagi mereka untuk mengikatkan diri kepada kita daripada ditelan ke dalam kesatuan rakyat Indonesia.”²⁵³

Pernyataan tersebut menunjukkan harapan pemerintah kolonial untuk membangun hubungan politik dengan masyarakat Aceh melalui penguatan identitas kedaerahan. Pemerintah Belanda memandang identitas Aceh sebagai unsur yang dapat membatasi pengaruh nasionalisme Indonesia. Pandangan ini berkembang bersama kesadaran sejumlah pejabat kolonial, termasuk Gubernur Paauw dan sekretarisnya, Dr. Piekaar, pada 1938–1942, bahwa ketergantungan pemerintah kepada *uleebalang* telah membawa *Atjeh-politiek* ke dalam kebuntuan. Sikap pemerintah yang relatif akomodatif terhadap PUSA berkembang dalam konteks perubahan kebijakan tersebut.²⁵⁴

Para penentang PUSA menuduh organisasi ini sebagai alat pemerintah Belanda. Kecurigaan tersebut memperoleh dasar dari hubungan dekat PUSA

²⁵³ Gubernur Goedhart, pernyataan mengenai politik pemerintah kolonial terhadap masyarakat Aceh, dikutip dalam A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan* ('s-Gravenhage: W. van Hoeve, 1949), hlm. 20–21; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 26–32.

²⁵⁴ Gouvernement van Atjeh en Onderhoorigheden, *Politiek Verslag van Atjeh en Onderhoorigheden over 1939* (Kutaradja, 1940), bagian mengenai PUSA; A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*, hlm. 27–30.

dengan Teuku Chik Peusangan, *uleebalang* yang memiliki kedudukan yang cukup penting dalam pemerintah kolonial di Aceh. Teuku Chik Peusangan memberikan perlindungan kepada PUSA tanpa mengambil peranan dalam mengarahkan kebijakan organisasi. Hubungan tersebut tetap memperlihatkan adanya ruang politik yang memungkinkan PUSA berkembang di bawah pemerintahan kolonial.²⁵⁵

Orientasi PUSA pada masa awal juga menunjukkan hubungan yang relatif baik dengan golongan *uleebalang*. Selain pertentangan pribadi antara Daud Beureueh dan Teuku Oemar dari Keumangan, sikap permusuhan terhadap *uleebalang* pada saat ini belum menjadi bagian penting dari kegiatan organisasi. PUSA memusatkan perhatian pada pembentukan lembaga pendidikan, penyusunan kurikulum sekolah agama, penyeragaman penetapan awal Ramadhan, dan pengembangan media organisasi. Sekolah Pendidikan Guru didirikan di Bireuen pada 1939, sedangkan majalah bulanan *Penjoeloeh* mulai diterbitkan pada November 1940.²⁵⁶

Kehadiran *uleebalang* dalam konferensi-konferensi penting PUSA dan sikap baik yang dipelihara para pemimpinnya memperlihatkan hubungan yang berkembang antara organisasi ulama dan struktur elite lokal. Dalam situasi politik yang tegang pada akhir pemerintahan kolonial, perkembangan PUSA menempatkan

²⁵⁵ A.J. Piekaar, *Atjèh en de Oorlog met Japan*, hlm. 28–31; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 26–32.

²⁵⁶ A. Hasjmy, *Semangat Merdeka*, hlm. 124–127; *Penjoeloeh*, tahun I, November 1940.

organisasi tersebut sebagai kekuatan sosial dan politik yang memiliki pengaruh luas di Aceh.²⁵⁷

Pada lima tahun terakhir masa kekuasaan Belanda di Aceh, perlawanan bersenjata yang sebelumnya begitu keras perlahan-lahan menghilang. Zentgraaf mencatat dalam tulisannya pada tahun 1938 bahwa perubahan yang ia temui dalam kunjungan ke Aceh sembilan tahun setelah kunjungan sebelumnya sungguh mencolok. Ia menulis bahwa batas budaya antara Aceh dan wilayah kolonial lainnya hampir tidak lagi terlihat.²⁵⁸ Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penerimaan gaya berpakaian Barat yang pada akhir 1920-an masih dianggap tabu karena merupakan pakain kafir yang mengalahkan mereka. Selain itu, bagi generasi penulis muda Aceh saat itu, semua yang tengah berlangsung merupakan sebuah transformasi menyeluruh yang menggairahkan. “Kesadarn” dan “keinsafan” adalah kata kata yang sering ditulis penulis muda Aceh kala itu. Namun, dibalik kemajuan dari sudut pandang kolonial, perubahan besar ini membawa rakyat Aceh semakin jauh dari akar identitasnya.²⁵⁹ Seorang pejabat tinggi Belanda, yang dianggap salah satu yang paling cerdas pada masanya, pernah mengatakan bahwa “Rakyat Aceh akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka berada di bawah kekuasaan kolonial dan sadar bahwa tidak ada pilihan lain selain bekerja sama”. Namun, pernyataan itu jauh dari kebenaran. Bagi sebagian besar masyarakat Aceh di akar rumput masih menyala api kebencian dan sedang menunggu momentum

²⁵⁷ M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, hlm. 65–69; A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*, hlm. 31–35.

²⁵⁸ H.C. Zentgraaff, *Atjeh* (Batavia: G. Kolff & Co., 1938), hlm. 225–230.

²⁵⁹ Stuart Hall, "Cultural Identity and Diaspora," dalam Jonathan Rutherford (ed.), *Identity: Community, Culture, Difference* (London: Lawrence & Wishart, 1990), hlm. 222–237.

mengadakan peperangan. Seperti yang dilakukan oleh Teungku di Coet Plieng pada tahun 1942 di Bayu, dekat Kota Lhokseumawe.²⁶⁰

Sedangkan bagi para elit sosial Aceh, terutama generasi mudanya yang mereka terima bukanlah kekuasaan Belanda secara mutlak, melainkan lahirnya cara pandang baru dalam berorganisasi dan membentuk kesadaran sosial. Kaum muda dan kalangan terpelajar dari pendidikan Belanda ini tidak lagi menilai kebesaran Aceh dari kenekatan berperang dengan senjata. Sebaliknya, mereka mulai mengukur martabat bangsanya dari kemampuan untuk beradaptasi dengan kekuatan-kekuatan baru dari kalangan pergerakan nasional yang kemudian membentuk wajah Islam yang baru di Aceh. Perubahan paradigma dan cara berpikir inilah yang secara perlahan membuka jalan bagi integrasi Aceh ke dalam Republik Indonesia.²⁶¹

4.2.5. Kelompok-kelompok Elit Sosial di Aceh Berebut Pengaruh dan Kekuasaan (1942–1945)

Menjelang akhir kekuasaan Belanda di Aceh, masyarakat Aceh terbagi ke dalam dua kelompok masyarakat yang berpengaruh. Pertama, para *uleebalang* yaitu sekelompok bangsawan Aceh yang kemudian diberi kewenangan oleh Pemerintah Belanda sebagai penguasa-penguasa daerah. Kedua, orang-orang berpengaruh yang

²⁶⁰ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 31-36; Muhjam Kamza, Teuku Kusnafizal, dan M. Yusrizal, “Teungku Abdul Djalil: Political Hack ‘Hakko Ichu’ and Founder of the Indonesian Opposition to the Japanese Occupation,” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 1 (2023): 175–194.

²⁶¹ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 241–260; A. Hasjmy, *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 98–128; Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 67–80.

tergabung ke dalam organisasi-organisasi reformasi Islam. Para *uleebalang* tetap mempertahankan status *quo* sebagai elit sosial karena jabatan dan legitimasi dari pemerintah Belanda. Di sisi lain terdapat orang-orang non bangsawan namun juga mendapat pendidikan Belanda dan memiliki pengaruh dalam masyarakat namun tidak mendapat legitimasi kekuasaan dari pemerintah Belanda. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari mereka terhadap kelompok *uleebalang*. Karena itulah, dengan mengandalkan basis dukungan dari masyarakat biasa, mereka mencari legitimasi lain di luar pemerintahan untuk merintis menjadi elit sosial baru. Terutama dari kaum pergerakan nasional Indonesia dan kelompok anti kesultanan lainnya di luar Aceh. PUSA adalah kelompok yang paling terdepan dan paling sukses dalam mengambil kesempatan ini untuk menjadi elit baru di Aceh. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan sampai akhirnya PERTI mengambil alih otorisasi pendidikan agama di tahun 50-an dan membentuk elit sosial baru yang mengubah wajah sosial di Aceh sampai saat ini.

Ketika kemajuan Jepang sudah sangat terang, serangan kilat yang dilancarkan Jepang pada Desember 1941 menjadikan semenanjung Malaya jatuh ke tangan mereka. Kelompok-kelompok yang bersaing di Aceh melihat ini sebagai sinar matahari dari timur. Begitulah adanya mereka berlomba-lomba menjemput calon tuan mereka yang baru ke Aceh.²⁶²

²⁶² Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 123.

4.2.6. Elit Aceh Menjemput Jepang

Sejumlah utusan dari Aceh dikirim ke Penang untuk menjalin kontak dengan pihak Jepang. Pengiriman ini diorganisir oleh beberapa individu dan organisasi, diantara yang paling aktif adalah organisasi anti-kesultanan seperti PUSA di Aceh dan Gerindo di Sumatera Timur. Di kalangan aktivis pergerakan nasional di Aceh, Jepang memiliki citra yang relatif positif. Sikap ini tidak banyak terpengaruh oleh peringatan tokoh-tokoh nasionalis seperti Dr. Hatta dan Dr. Sutjipto yang menentang fasisme. Sejak kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, beredar keyakinan bahwa Jepang bisa menjadi kekuatan Asia yang membantu bangsa-bangsa lain melawan kolonialisme Barat. Pandangan ini masih bertahan dan ikut mendorong munculnya semangat pemberontakan terhadap Belanda di Aceh. Menurut Said Abu Bakar, seorang ulama PUSA yang mendukung Jepang, rencana untuk melepaskan diri dari kekuasaan Belanda mulai dibicarakan secara rahasia dalam konferensi PUSA pada April 1940. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar pindah ke Kedah, Malaya, dan mengajar agama bagi masyarakat Aceh diaspora di sana. Setelah Jepang menduduki wilayah utara Malaya, ia mulai berupaya menjalin komunikasi dengan pihak Jepang.²⁶³

Pada Februari 1942, beberapa kelompok dari Aceh mengirimkan utusan ke Penang. Mereka bergerak secara mandiri. Salah satu kelompok, dipimpin oleh dua *uleebalang* dari Lhoksukon, berangkat pada 13 Februari dan tiba di Penang pada 4

²⁶³ AJ Piekaar, *Atjeh en de Oorlog bertemu Jepang*, hlm. 14–16; Iwaichi Fujiwara, “Fifth Column Work in Sumatra,” dalam Anthony Reid dan Oki Akira, eds., *The Japanese Experience in Indonesia: Selected Memoirs of 1942–1945* (Athens: Ohio University Monographs in International Studies, Southeast Asia Series, 1986), hlm. 9–31; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124–127.

Maret. Setibanya di sana, kedatangan mereka diumumkan melalui Radio Penang. Kelompok lain berangkat dari Idi pada 20 Februari, terdiri dari dua ulama terkemuka PUSA dari Pidie serta beberapa perwakilan Pemuda PUSA yang dipimpin oleh Hoesain Almujaheed.²⁶⁴

Di Sumatera Timur, meskipun ada upaya serupa dari kelompok anti kesultanan seperti Gerindo, persiapannya kurang matang. Beberapa tokoh seperti Jacob Siregar serta mantan tahanan politik dari Digul juga berusaha menjalin kontak dengan Jepang. Dua politisi, Xarim M.S. (mantan anggota PKI) dan Radja Mulamanik (seorang bangsawan Karo yang disingkirkan Belanda), bahkan pernah mengadakan hubungan rahasia secara pribadi dengan Konsulat Jepang di Medan. Namun, sebelum upaya mereka berkembang, keduanya ditangkap Belanda dan diasingkan ke Jawa tak lama setelah Perang Pasifik meletus.²⁶⁵

Di pihak Jepang, kegiatan untuk membangun jaringan lokal di wilayah Asia Tenggara dijalankan oleh satuan intelijen bernama Fujiwara Kikan (disingkat F-Kikan). Unit ini dipimpin oleh Mayor Fujiwara Iwaichi, seorang perwira muda yang baru memiliki pengetahuan dasar tentang kawasan ini dan hanya menguasai sedikit bahasa Inggris. Meski begitu, Fujiwara dikenal ramah terhadap tokoh-tokoh nasionalis lokal yang mendukung Jepang. Ia cepat memahami cara pandang mereka yang melihat Jepang sebagai pembebas Asia. Karena gaya pendekatannya yang

²⁶⁴ AJ Piekaar, *Atjeh en de Oorlog bertemu Jepang*, hlm. 132–133, 145–146; M. Joenoes Djamil, *Riwayat Barisan* “(Kutaradja: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1975), hlm. 50–68; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124–127.

²⁶⁵ AJ Piekaar, *Atjeh en de Oorlog bertemu Jepang*, hlm. 85–106; M. Joenoes Djamil, *Riwayat Barisan “F” (Fujiwara Kikan) di Atjeh*, hlm. 4–6; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124–127.

simpatik, beberapa orang bahkan menjulukinya sebagai “*Lawrence of Arabia* dari Jepang”.²⁶⁶

F-Kikan dibentuk di Tokyo pada September 1941 dan beranggotakan lima perwira muda lulusan sekolah intelijen Nakano-gakkō, serta sejumlah ahli yang memiliki pengalaman bahasa dan perdagangan di Asia Tenggara. Setelah berkumpul di Bangkok pada Oktober 1941, mereka bergabung dengan pasukan Jepang di Songkhla, Thailand Selatan, tepat setelah serangan ke Pearl Harbor. Tugas utama mereka adalah membantu penaklukan Malaya dengan menggandeng kelompok anti-Inggris, terutama dari kalangan tentara India dan organisasi nasionalis Melayu seperti Kesatuan Melayu Muda.²⁶⁷

Setelah jatuhnya Singapura, F-Kikan mulai menangani berbagai urusan militer dan politik di Malaya, termasuk Tentara Nasional India. Persiapan politik untuk wilayah Sumatera Utara, termasuk Aceh, awalnya bukan fokus utama mereka. Namun, justru di Aceh-lah peran F-Kikan berkembang pesat. Menurut catatannya, Fujiwara sendiri belum pernah mendengar tentang Aceh sebelum invasi Jepang ke Malaya. Ia mengaku terkejut melihat antusiasme dan komitmen masyarakat Aceh untuk bekerja sama dengan Jepang. Semua kontak dilakukan atas

²⁶⁶ Iwaichi Fujiwara, “Fifth Column Work in Sumatra,” dalam Anthony Reid dan Oki Akira, eds., *The Japanese Experience in Indonesia*, hlm. 9–31; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124–127.

²⁶⁷ Iwaichi Fujiwara, “Fifth Column Work in Sumatra,” dalam Anthony Reid dan Oki Akira, eds., *The Japanese Experience in Indonesia*, hlm. 9–31; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124–127.

inisiatif pihak Aceh sendiri, yang kemudian mengembangkan peran mereka dari hanya mendukung intelijen menjadi gerakan yang lebih luas.²⁶⁸

Setelah Jepang mencapai Kedah Selatan, Said Abu Bakar melakukan perjalanan darat dan laut ke Penang untuk bertemu dengan pejabat Jepang. Ia ingin menyampaikan rencana untuk memanfaatkan jaringan PUSA dalam mendukung kedatangan Jepang di Aceh. Pertemuan antara Abu Bakar dan Fujiwara akhirnya berlangsung di Taiping. Dalam pertemuan itu, Fujiwara meminta agar Abu Bakar mengumpulkan sebanyak mungkin orang Sumatera untuk mendukung operasi Jepang. Mereka berkumpul di Kuala Lumpur pada 14 Januari 1942. Kelompok ini terdiri dari lima orang Aceh, lima orang dari Sumatera Barat, dan beberapa orang dari Indragiri yang juga telah melakukan kontak terpisah dengan F-Kikan. Mereka ditempatkan di sebuah bangunan yang disebut “Gedung Indonesia” di kawasan Kenny Hill yang mewah. Para anggota muda kelompok ini sempat menyambut situasi itu dengan semangat, sebelum kemudian mulai mempertanyakan maksud sebenarnya dari kehadiran militer Jepang setelah menyaksikan sikap mereka yang keras.²⁶⁹

Fujiwara mendapatkan gambaran tentang kondisi sosial-politik di Aceh dari penjelasan Abu Bakar. Dalam penuturannya, Abu Bakar menyampaikan bahwa rakyat Aceh sangat membenci pemerintah Belanda dan *uleebalang* karena keduanya dianggap menindas. Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat Aceh sangat

²⁶⁸ AJ Pickaar, *Atjeh en de Oorlog bertemu Jepang*, hlm. 145–178; Iwaichi Fujiwara, “Fifth Column Work in Sumatra,” dalam Anthony Reid dan Oki Akira, eds., *The Japanese Experience in Indonesia*, hlm. 9–31.

²⁶⁹ Iwaichi Fujiwara, “Aksi Kolom Kelima di Sumatra, *Pengalaman Jepang di Indonesia*, hlm. 9–31.

taat pada Islam dan lebih mudah digerakkan melalui organisasi keagamaan. Menurutnya, PUSA adalah organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Aceh saat itu.²⁷⁰

Fujiwara dan Abu Bakar sepakat bahwa para utusan harus menjalin kontak erat dengan PUSA untuk memastikan dukungan terhadap Jepang. Mereka yang terlibat dalam operasi ini diberi ban lengan bertanda huruf “F” sebagai identitas dari F-Kikan. Tugas mereka adalah menyebarkan informasi bahwa Jepang datang dengan niat baik, mencegah sabotase fasilitas penting oleh Belanda, serta membantu logistik pasukan Jepang yang akan mendarat.²⁷¹ Pada tahap ini, belum ada tanda-tanda bahwa masyarakat Aceh akan melakukan pemberontakan terbuka terhadap Belanda. Fujiwara mencatat bahwa orang Aceh tidak menuntut imbalan atas dukungan yang mereka berikan, berbeda dengan pengalaman Jepang bekerja sama dengan kelompok lain seperti tentara India. Tidak ada pembahasan mengenai kemerdekaan Aceh atau Indonesia, karena hal tersebut secara tegas dilarang oleh pemerintah Jepang di Tokyo. Dalam memoarnya, Fujiwara menyebut bahwa Jepang akan menghormati agama dan kesejahteraan rakyat Aceh. Ia tidak banyak menyinggung konflik antara PUSA dan *uleebalang* karena kurang memahami dinamika lokal tersebut. Namun, ia mencatat bahwa Jepang tidak akan menarik pajak setinggi yang diberlakukan oleh Belanda.²⁷²

²⁷⁰ Iwaichi Fujiwara, “Aksi Kolom Kelima di Sumatra,” *Pengalaman Jepang di Indonesia*, hlm. 9–31.

²⁷¹ Iwaichi Fujiwara, “Kerja Kolom Kelima di Sumatra,” dalam Anthony Reid dan Oki Akira, eds., *The Japanese Experi*, hlm. 9–31.

²⁷² AJ Piekaar, *Atjeh en de Oorlog bertemu Jepang*, hlm. 145–178; M. Joenoes Djamil, *Riwayat Barisan “F” (Fujiwara Kikan) di Atjeh*, hlm. 50–68; Iwaichi Fujiwara, “Kerja Kolom Kelima di Sumatra,” dalam Anthony Reid dan Oki Akira, eds., *The Japanese Experi*, hlm. 9–31.

Sebuah surat dari salah seorang pendukung F-Kikan asal Aceh, yang disita Belanda beberapa hari sebelum tentara Jepang mendarat, menyebut bahwa Jepang telah menjanjikan penghapusan pajak dan *herendienst* 'kerja paksa'. Ini menunjukkan bahwa janji-janji Jepang, meskipun disampaikan secara samar dan informal, telah ditafsirkan oleh para aktivis Aceh sesuai dengan harapan dan tuntutan mereka akan perubahan.²⁷³

4.2.7. Pemberontakan Aceh Terhadap Belanda (1942)

Dua hari setelah meninggalkan Kuala Selangor, Said Abu Bakar berlayar menuju Aceh. Ia dan sekitar enam orang lainnya tiba di dekat Tanjung Balai, Asahan. Kelompok lain dengan jumlah serupa mendarat di dekat Bagansiapiapi. Sebagian besar dari mereka adalah orang Aceh, namun ada juga yang berasal dari suku Batak, Minangkabau, dan lainnya. Kedua kelompok ini sempat membuang senjata mereka, menyerahkan diri kepada pihak Belanda, dan kemudian ditahan di Medan. Kelompok ketiga, yang juga berasal dari Aceh dan dikirim oleh Masubuchi dari Penang pada 13 Februari 1942, tertangkap dan ditahan di Idi. Mereka mengaku sebagai pengungsi dari wilayah pertempuran di Malaya dan sebagian besar akhirnya diizinkan kembali ke kampung halaman pada Februari. Said Abu Bakar, tokoh penting dalam kelompok tersebut, dibebaskan pada 13 Februari setelah menjalin komunikasi dari dalam tahanan dengan jaringan PUSA, serta mendapat jaminan dari tokoh-tokoh Aceh seperti Mr. T.M. Hasan dan Tuanku Mahmud.²⁷⁴

²⁷³ AJ Pickaar, *Atjeh en de Oorlog bertemu Jepang*, hlm. 145–178; M. Joenoes Djamil, *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Atjeh*, hlm. 50–68.

²⁷⁴ A.J. Pickaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan* ('s-Gravenhage-Bandung: W. van Hoeve, 1949); M. Joenoes Djamil, *Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Atjeh* (Kutaradja: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1975); William H. Frederick, "The Japanese Occupation

Setelah bebas, Said Abu Bakar pergi ke Seulimeum, sekitar 40 km dari Banda Aceh, tempat ia memiliki hubungan dengan Sekolah Islam yang dipimpin oleh Teungku Abdul Wahab. Sambutan terhadap rencananya sangat antusias, hingga terjadi pemberontakan besar pada 19 Februari 1942. Pemberontakan ini diawali dengan aksi sabotase berupa pemutusan kabel telepon dan telegraf, serta pembongkaran rel kereta api. Puncaknya terjadi pada malam 23 Februari setelah rapat umum di sebuah sekolah Islam. Pejabat Belanda bernama Tiggelman tewas, dan dana sebesar 15.000 gulden disita dari kantor pos. Keesokan harinya, Direktur Kereta Api Aceh, Graaf von Sperling, dibunuh saat memeriksa kerusakan di jembatan Keumiroë, Seulimeum. Tiga orang Aceh yang mengenakan ban lengan bertuliskan huruf “F” juga tewas dalam insiden tersebut.²⁷⁵

Pemberontakan di Seulimeum didorong oleh dua ulama reformis terkemuka yaitu Teungku Abdul Wahab dan Teungku H.A. Hasballah, serta mendapat dukungan dari Panglima Polim Muhammad Ali, seorang *uleebalang* muda. Beberapa *uleebalang* di sekitar Seulimeum turut mendukung gerakan ini secara diam-diam. Meskipun Seulimeum bukan basis kuat PUSA, hubungan baik antara *uleebalang* dan para ulama reformis, serta tradisi anti-Belanda yang kuat di wilayah tersebut, menjadi faktor utama pemberontakan. Di daerah pantai barat Aceh,

and Rival Indonesian Elites: Northern Sumatra in 1942,” *The Journal of Asian Studies* 35, no. 1 (1975): 49–61

²⁷⁵ A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan* (’s-Gravenhage-Bandung: W. van Hoeve, 1949); Muhammad Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 155–157.

perlawanan terbuka juga muncul di daerah-daerah yang memiliki sejarah perang dan perlawanan terhadap Belanda.²⁷⁶

Saat Belanda kembali menguasai Seulimeum dan pasukan Jepang belum tiba, aksi sabotase mulai mereda. Namun, tindakan militer balasan dari Belanda justru menambah ketegangan. Para pemimpin pemberontakan di Seulimeum masih bersembunyi, sementara *uleebalang* dan ulama terkemuka di Aceh Besar mengadakan pertemuan di Lubo' pada 4 Maret 1942. Mereka sepakat untuk melanjutkan perlawanan secara bersama-sama dan menunjuk Teuku Njak Arif sebagai koordinator. Dua hari kemudian, surat pemberontakan dikirimkan ke kantor-kantor pemerintah dan kelompok pendukung di seluruh Aceh. Tanggal 7 Maret 1942 ditetapkan sebagai awal pemberontakan lanjutan yang ditandai dengan sabotase di Aceh Besar dan pantai barat bagian utara. Pada 9 Maret malam, pasukan yang dipimpin *uleebalang* Teuku Sabi menyerang markas Belanda di Calang. Kondisi Belanda yang melemah membuat Teuku Njak Arif dapat menemui Gubernur Belanda secara terbuka pada 8 Maret 1942 untuk menawarkan pengambilalihan pemerintahan di Aceh. Setelah tawaran itu ditolak, ia memilih bergerak secara diam-diam mendukung pemberontakan. Pada 10 Maret 1942, Belanda memutuskan untuk mundur dari Aceh karena tidak mampu mempertahankan Banda Aceh yang dikepung setiap malam.²⁷⁷

²⁷⁶ William H. Frederick, "The Japanese Occupation and Rival Indonesian Elites: Northern Sumatra in 1942," *The Journal of Asian Studies* 35, no. 1 (1975): 49–61; A.J. Piekaar, *Atjèh en de Oorlog met Japan* ('s-Gravenhage-Bandung: W. van Hoeve, 1949); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124-127.

²⁷⁷ A.J. Piekaar, *Atjèh en de Oorlog met Japan* ('s-Gravenhage-Bandung: W. van Hoeve, 1949); Muhammad Ibrahim dkk., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 156–158; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124-127.

Di Pidië dan pantai utara, *uleebalang* masih mendukung kekuasaan kolonial, sehingga aktivitas gerakan “F” kurang terlihat. Sekretaris PUSA, T.M. Amin, ditangkap Belanda pada 7 Maret karena terkait dengan penyebaran bendera “F”. Seorang pemimpin pemuda PUSA, Sab Cut, memimpin serangan ke Sigli pada 12 Maret sebelum kedatangan pasukan Jepang. Ia dan kelompoknya membunuh Asisten Residen dan mengusir tentara Belanda dari kota tersebut. Di sepanjang pantai barat, pasukan Belanda yang mundur terus mendapat serangan, sebagian akibat tindakan brutal mereka terhadap penduduk di Lam No, Calang, dan Tapaktuan. Ratusan warga Aceh gugur di wilayah-wilayah tersebut.²⁷⁸

Setelah Jepang mengambil alih, muncul perdebatan mengenai siapa yang paling berjasa dalam pemberontakan ini. Teuku Njak Arif dan para *uleebalang* mengklaim peran utama, sementara kelompok PUSA juga menyatakan tanggung jawab. Klaim PUSA dianggap lebih kuat, meskipun data yang tersedia tidak sepenuhnya jelas. Mengingat sikap pasif pemimpin PUSA, Teungku Daud Beureueh, besar kemungkinan bahwa pemberontakan ini digerakkan oleh inisiatif tokoh-tokoh lokal yang memiliki hubungan dengan PUSA atau kelompok pemudanya. Jika pun ada kepemimpinan pusat, maka itu berada di tangan Said Abu Bakar dan para ulama dari Seulimeum, bukan pada pimpinan PUSA di Sigli.²⁷⁹

²⁷⁸ A.J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan* ('s-Gravenhage-Bandung: W. van Hoeve, 1949); William H. Frederick, “The Japanese Occupation and Rival Indonesian Elites: Northern Sumatra in 1942,” *The Journal of Asian Studies* 35, no. 1 (1975): 49–61; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124-127.

²⁷⁹ William H. Frederick, “The Japanese Occupation and Rival Indonesian Elites: Northern Sumatra in 1942,” *The Journal of Asian Studies* 35, no. 1 (1975): 49–61; M. Joenoes Djamil, *Riwayat Barisan “F” (Fujiwara Kikan) di Atjeh* (Kutaradja: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1975); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 124-127.

4.2.8. Aceh di Bawah Kendali Kelompok Pemberontak Pro Jepang (Barisan F-Kikan)

Kekacauan besar hanya berlangsung selama empat hari di Aceh Besar, bahkan lebih singkat di wilayah lain di Aceh. Tentara Jepang mendarat pada 12 Maret 1942 di dekat Kutaraja dan di Peureulak, Aceh Timur. Mereka berhasil mencapai kota-kota utama di Aceh pada hari yang sama dengan jatuhnya pemerintahan Belanda. Peristiwa ini disambut gembira oleh masyarakat. Namun, kekacauan di Aceh menimbulkan kekaguman sekaligus tantangan tersendiri bagi Jepang. Sementara penduduk di wilayah lain di Indonesia terkesan dengan kekuatan Jepang, masyarakat Aceh justru menguatkan keyakinan pada keberanian mereka sendiri.²⁸⁰

Pemberontakan yang terjadi bukan hanya menyebabkan mundurnya Belanda, tetapi juga menimbulkan kepanikan di kalangan pegawai pemerintahan non-Aceh. Di Sumatra Timur Jepang dapat langsung mengambil alih struktur pemerintahan yang sudah berjalan, namun itu tidak bisa dilakukan di Aceh. Di Aceh, kekuasaan harus diserahkan dulu kepada para pemberontak yang mendukung Jepang. Di banyak tempat, terjadi perpecahan antara kelompok *ulèëbalang* dan pihak-pihak yang menentang mereka. Hanya di Aceh Besar kondisi ini tidak menjadi kendala. Teuku Njak Arif dan T. Panglima Polim sudah terlibat sejak awal dalam pemberontakan, sehingga mereka memiliki pengaruh moral terhadap gerakan tersebut. Sementara itu, *ulèëbalang* lainnya tidak sempat mengambil sikap

²⁸⁰ AJ Piekaar, *Atjèh en de oorlog bertemu Jepang* ('s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949); Antonius *Jurnal Studi Asia* 35, no. 1 (November 1975): 49–61; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 130-132.

karena telah ditangkap oleh komandan militer Belanda yang mencari pihak yang dapat disalahkan atas pemberontakan. Oleh karena itu, Jepang mengakui kewenangan Komite Penjaga Ketertiban untuk Aceh Besar, yang dipimpin oleh Teuku Njak Arif. Hal ini memberikan posisi penting bagi tokoh nasionalis Indonesia tersebut untuk mempengaruhi kebijakan Jepang di kemudian hari.²⁸¹

Di daerah lain, para *ulèëbalang* menghadapi masa sulit. Tokoh-tokoh yang menentang mereka, terutama anggota Pemuda PUSA, mengenakan ban lengan bertanda “F” dari Fujiwara kikan sebagai tanda pengakuan dari penguasa baru. Dari Malaya, Mayor Fujiwara mengirim empat staf untuk turut dalam penyerbuan ke Sumatra Utara dan situasi di Aceh segera menjadi fokus perhatian mereka. Pemimpin kelompok ini, Masubuchi Sahei, adalah perwira yang fasih berbahasa Indonesia dan memiliki kemampuan membangun kepercayaan. Ia berperan penting dalam pembentukan pemerintahan sipil sementara Jepang. Ia juga menjalin hubungan dengan Said Abu Bakar dan kelompok F-kikan dari Malaya. Di berbagai daerah, tokoh-tokoh dari Barisan F menguasai Komite Penjaga Ketertiban (*chian-iji-kai*), yang menjalankan pemerintahan sementara selama Maret dan April 1942.²⁸²

Said Abu Bakar ikut serta dalam ekspedisi Jepang di pesisir barat Aceh pada 21 Maret 1942 dan memiliki pengaruh terhadap susunan komite sementara di sana.

²⁸¹ AJ Piekaar, *Atjèh en de oorlog bertemu Jepang* ('s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949); Antonius, *Jurnal Studi Asia* 35, no. 1 (November 1975): 49–61; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 130-132.

²⁸² AJ Piekaar, *Atjèh en de oorlog bertemu Jepang* ('s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 130-132.

Tindakan balasan dilakukan terhadap dua *ulèëbalang* pro-Belanda di Meulaboh yang sebelumnya menangkap dua utusan dari kelompok ulama reformis di Seulimeum (salah satunya kemudian dieksekusi oleh Belanda). Kedua *ulèëbalang* tersebut dikritik oleh Barisan F dan kemudian dibunuh bersama beberapa pegawainya. Di banyak daerah, terjadi pemberontakan menolak kekuasaan *ulèëbalang* sebagaimana mereka menolak kekuasaan Belanda. Pemuda-pemuda PUSA yang didukung oleh para ulama reformis tidak mengakui otoritas *ulèëbalang*. Pernikahan disahkan tanpa melalui kantor pencatatan resmi, transaksi tanah dilakukan tanpa prosedur hukum pemerintah, dan kepala-kepala kampung tidak lagi dianggap berwenang. Ini menjadi era pertama kelompok aktivis pergerakan nasional Indonesia berkuasa.²⁸³

4.2.9. Teungku Abdul Jalil di Coet Pling Mengambil Momentum (Perang Bayu 1942)

Selain dua kelompok di atas, yaitu organisasi-organisasi reformis Islam dan kaum *uleebalang* yang berlomba-lomba menjemput calon tuan mereka yang baru ke Aceh. Di tengah euforia penyambutan terhadap penguasa baru, masih tersisa di lapisan masyarakat bawah masih juga terdapat sisa-sisa kebangsaan nasional Aceh. Kecintaan yang mendalam dan rasa superior sebagai bangsa Aceh masih tetap menimbulkan pandangan jijik terhadap orang asing dan kebencian mendalam terhadap penguasa kafir. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa tidak benar

²⁸³ AJ Piekaar, *Atjèh en de oorlog bertemu Jepang* ('s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949); Antonius, *Jurnal Studi Asia* 35, no. 1 (November 1975): 49–61; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 130-132.

“Rakyat Aceh akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka berada di bawah kekuasaan kolonial”. Di Bayu dekat Lhokseumawe, seorang ulama muda yang konservatif sedang menunggu momentum untuk mengusir penguasa asing dengan cara khas Aceh, perang. Dia adalah Teungku Abdul Jalil, pemimpin sekolah agama di Cot Pliëng yang mempersiapkan perlawanan terhadap penguasa baru itu.²⁸⁴

Teungku Abdul Jalil aktif menyampaikan pidato terbuka menentang pemerintahan baru dan para pendukung PUSA yang telah membantu masuknya Jepang ke Aceh. Ia dikenal mencetuskan ungkapan bahwa barisan F-Kikan telah “Mengusir anjing dan memasukkan babi”. Ia menyamakan Jepang dengan Yajuj dan Majuj dan mengingatkan masyarakat tentang nilai mati syahid seperti yang tertulis dalam *Hikayat Perang Sabil*. Selain itu, ia juga aktif merekrut dan melatih pasukan untuk menghadapi perlawanan. Ketika T.M. Hasan dari Glumpang Payung memperingatkannya bahwa perlawanannya tidak akan berhasil, ia menjawab bahwa perlawanan bukanlah tindakan sia-sia. Musuhnya yang menyerang belum tentu mati syahid, tetapi tidak ragu lagi bahwa orang yang melawan dengan mempertahankan diri pasti akan mati syahid.²⁸⁵

Serangan Jepang dimulai pada 10 November 1942, setelah berbagai upaya perundingan dan peringatan gagal. Militer Jepang dalam jumlah besar dikerahkan, masjid dan sekolah di Cot Pliëng hancur, puluhan tentara Teungku Coet Plieng

²⁸⁴ AJ Piekaar, *Atjeh en de Oorlog m*(s-Gravenhage-Bandung: W. van Hoeve, 1949); M. Joenoes Djamil, *Riwayat Barisan “F”* (*Fujiwara Kikan*(Kutaradja: Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Aceh, 1975) *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 1 (2023): 175–194; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 160-161.

²⁸⁵ AJ Piekaar, *Atjeh en de oorlog bertemu*(s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949). Untuk keterangan mengenai perlawanan Teungku Abdul Jalil, penggunaan sentimen *Jurnal Studi Asia* 35, no. 1 (1975): 49–61; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 160-161.

syahid dalam serangan senapan mesin dan mortir Jepang. Meskipun demikian, senapan tentara Aceh yang ketinggalan zaman juga telah menewaskan puluhan tentara Jepang. Setelah wilayah Bayu dikuasai, Teungku Abdul Jalil dan pasukannya mundur ke wilayah Buloh, kampung masa kecilnya yang berjarak sekitar 20 km dari Bayu. Di Buloh, Teungku Abdul Jalil syahid setelah bertempur selama tiga hari di beberapa tempat dengan ratusan korban di pihak masing-masing. Setelah peperangan selesai, Masubuchi menyebarkan selebaran yang menyebut Teungku Abdul Jalil sebagai “setan” dan “orang gila”, sebagai bagian dari propaganda Jepang. Tentu saja ini usaha yang sia-sia. Aceh mendapatkan lagi syuhada dan pemimpin tanpa kompromi. Aceh kembali menatap muka penguasa kafir dan kaki tangannya dengan kebencian dan perasaan jijik, bangsa rendahan yang menguasai mereka.²⁸⁶

Perang Bayu membuat Jepang mulai memperhatikan peran Islam secara lebih serius. Para tokoh Aceh yang dipercaya diminta menjelaskan alasan perlawanan Teungku Abdul Jalil. Dari Medan, Chōkan Nakashima mengirim Xarim M.S. dan Hamka untuk tujuan yang sama. Setelah itu, Jepang perlahan mengembangkan kebijakan yang lebih aktif dalam memanfaatkan Islam. Meskipun kelompok Teungku Abdul Jalil sangat membenci PUSA, Perang Bayu ini rupanya tidak menguntungkan PUSA. Sebaliknya kaum *ulèëbalang* memanfaatkan kekhawatiran Jepang terhadap gerakan Islam militan untuk membatasi pengaruh PUSA. Akibatnya, kebijakan yang diterapkan Chōkan Iino adalah menempatkan

²⁸⁶ AJ Piekaar, *Atjeh en de oorlog bertemu* (s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 160-161.

PUSA hanya sebagai salah satu dari banyak organisasi Islam yang ada, bukan sebagai pejabat apalagi penguasa daerah. Sebaliknya kaum *uleebalang* kembali mendapat jabatan dan posisi-posisi strategis dan mempertahankan status quonya sebagai elit sosial Aceh.²⁸⁷

4.2.10. Uleebalang kembali Berkuasa Menggantikan PUSA

Meskipun propaganda Jepang sempat membangkitkan harapan, rupanya agenda mereka tidak memberikan keuntungan apapun bagi kelompok aktivis pergerakan Nasional Indonesia di Aceh. Sumatera dan Malaya, yang berada dibawah kendali Tentara Jepang ke-25, dianggap sebagai wilayah penting karena kekayaan alam dan letaknya yang strategis. Kawasan ini dimaksudkan untuk tetap menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang, sehingga bidang-bidang vital harus dikendalikan secara ketat. Semua tindakan atau pernyataan yang dapat mendorong semangat kemerdekaan pribumi harus dicegah dengan hati-hati. Dalam praktiknya, bendera Merah Putih yang sempat dikibarkan untuk menyambut kedatangan Jepang dilarang. Orang Indonesia diberi ucapan selamat karena dianggap telah menjadi bagian dari bangsa Jepang. Partai politik pada awalnya diabaikan, lalu dilarang sepenuhnya. Dalam rencana Tokyo, tidak ada tempat bagi nasionalisme Indonesia di Sumatera.²⁸⁸

²⁸⁷ AJ Piekaar, *Atjeh en de oorlog bertemu Jepang* ('s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949); lihat pula William H. Frederick, "Pendudukan Jepang dan RiJurnal Studi Asia 35, no. 1 (1975): 49–61; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 160-161.

²⁸⁸ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 136-139.

Kebijakan Jepang terhadap pemerintahan lokal bersifat sangat konservatif. Mereka berusaha mempertahankan struktur pemerintahan yang sudah ada, mempekerjakan pegawai pribumi sebanyak mungkin, dan menghindari perubahan besar terhadap posisi para bangsawan. Namun, pada Juli 1942, dikeluarkan perintah bahwa klaim kekuasaan yang didasarkan pada kontrak atau keturunan tidak diakui. Slogan untuk Malaya dan Sumatera mengadopsi semangat restorasi Meiji, seluruh wilayah harus tunduk pada satu kedaulatan. Kebijakan ini dipandang sebagai kelanjutan dari politik kolonial Belanda yang mendukung struktur kerajaan. Upaya perubahan yang dilakukan oleh Barisan F di Aceh pun ditolak dengan cepat.²⁸⁹

Pada 20 April 1942, Barisan F dibubarkan. Keesokan harinya, pemerintahan sipil Aceh dibentuk sementara. Komite Penjaga Ketertiban dibubarkan dan *ulèëbalang* secara bertahap kembali diberi jabatan sebagai *sonchō*. Beberapa *ulèëbalang* berpengalaman bahkan diangkat sebagai *gunchō* (setara controleur Belanda) di tingkat *onderafdeling*. Misalnya, T. Cut Hasan dari Muhammadiyah diangkat menjadi *gunchō* di Bireuen, sedangkan Teuku Cik Peusangan tidak diangkat karena dianggap terlalu dekat dengan Belanda. Di Sigli, T.M. Hasan dari Glumpang Payung yang sebelumnya aktif menentang kesultanan juga menjadi *gunchō*.²⁹⁰

Dari 20 posisi *gunchō* di Aceh, hanya dua yang ditempati oleh aktivis Barisan F yaitu Marah Hoesin dan Said Abu Bakar di wilayah-wilayah terpencil

²⁸⁹ Ibid., hlm. 136-139.

²⁹⁰ AJ Piekaar, *Atjeh en de oorlog bertemu Jepang* ('s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 136-139.

Aceh Selatan. Said Abu Bakar, yang merasa disingkirkan dan kecewa karena tidak dihargai oleh Jepang, dikabarkan mencoba bunuh diri pada Desember 1942. Setelah pulih, ia pergi ke Singapura untuk menyampaikan keluhan langsung kepada Fujiwara. PUSA tidak hanya dikecewakan dengan kebijakan ini, tokoh-tokoh mereka pun juga ditangkap. Pada April 1942, pemimpin PUSA di Lhokseumawe ditangkap bersama tiga belas pengikutnya. Tokoh-tokoh PUSA lainnya seperti Daud Beureueh, T.M. Amin, Tgk. Abdul Wahab, dan Hoesain Almudjahid juga ditahan dan dalam beberapa kasus mengalami penyiksaan. Meskipun akhirnya dibebaskan, mereka menyalahkan *ulèëbalang* atas kejadian tersebut.²⁹¹

Beberapa *ulèëbalang* pun mulai menunjukkan sikap bermusuhan terhadap PUSA. Salah satunya T.M. Hasan Glumpang Payong yang menyebut dalam suratnya bahwa PUSA telah memfitnah *ulèëbalang* dan menciptakan kebencian terhadap mereka. Ia menganggap PUSA sudah menyimpang dari tujuan awalnya sebagai organisasi ulama dan berubah menjadi gerakan politik yang ingin menguasai Aceh dengan memanfaatkan agama Islam untuk menarik dukungan rakyat. Ia juga menyebut bahwa gerakan ini bisa menjadi ancaman bagi pemerintah Jepang karena sifat fanatiknya. Pemerintah Jepang tampaknya juga khawatir terhadap pengaruh keagamaan yang kuat dari PUSA, seperti halnya Belanda sebelumnya. Selama pendudukan Jepang, gerakan PUSA dibatasi sedangkan Muhammadiyah yang dianggap tidak berpolitik mendapat dukungan. T.M. Hasan,

²⁹¹ AJ Piekaar, *Atjèh en de oorlog met Japan* ('s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 136-139.

yang telah menjadi lawan utama PUSA, menjadi salah satu tokoh Aceh paling berpengaruh dalam struktur pemerintahan Jepang.²⁹²

4.2.11. Perekrutan Pasukan Aceh dalam Perang Dunia Kedua

Pada tahun 1943, prioritas utama militer Jepang di kawasan Selatan adalah mempertahankan wilayah dari kemungkinan serangan balasan Sekutu. Aceh menjadi wilayah strategis karena letaknya yang dekat dengan India dan Sri Lanka, wilayah yang berada di bawah komando Sekutu, Mountbatten, sebagai pintu gerbang menuju instalasi minyak di Pangkalan Brandan, kawasan Malaya dan Singapura. Analisis Jepang diperkuat oleh meningkatnya serangan udara dan laut Sekutu terhadap pelabuhan-pelabuhan di Aceh, dimulai pada Desember 1942 di Banda Aceh dan Aceh Barat. Akibatnya, Aceh menjadi wilayah dengan pembangunan instalasi pertahanan terbesar, termasuk lapangan terbang dan dukungan logistik. Selain itu, Perang Bayu telah menimbulkan kesan bagi Jepang bahwa orang Aceh adalah bangsa yang memiliki harga diri tinggi dan tidak punya rasa gentar dalam berperang. Jepang kemudian menjadikan Aceh sebagai wilayah utama perekrutan tenaga militer dan semimiliter.²⁹³

Usulan awal pada November 1942 adalah merekrut pemuda Aceh yang aktif dalam politik untuk dilatih menjadi pasukan khusus melawan gerilyawan Cina di

²⁹² AJ Piekaar, *Atjeh en de oorlog met Japan* ('s-Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve, 1949); Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 136-139.

²⁹³ T. Ibrahim Alfian dkk., *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseuman Daerah Istimewa Aceh, 1982); Joyce C. Lebra, *Japanese-Trained Armies in Southeast Asia: Independence and Volunteer Forces in World War II* (New York: Columbia University Press, 1977), 113-119; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 164-168.

Malaya. Namun, rencana ini diubah untuk kebutuhan lokal, pada Februari 1943 dimulailah pelatihan *Tokubetsu Keisatsutai* (Polisi Khusus), yaitu pasukan bergerak dengan struktur militer. Sebagian kecil pasukan terdiri dari mantan anggota KNIL, namun mayoritas adalah pemuda Aceh yang dilatih Jepang. Ini menjadi kesempatan pertama bagi mereka untuk menerima pelatihan militer modern. Pada saat Jepang menyerah, pasukan ini berjumlah sekitar 750 orang yang ditempatkan di sepanjang pantai Aceh untuk tugas pertahanan dan kontra-spionase. Komandan keseluruhan pasukan adalah warga sipil Jepang bernama Kuroiwa.²⁹⁴

Pada Mei 1943, dimulai perekrutan *Heiho* (tentara pembantu) di seluruh Sumatera. Mereka juga menerima pelatihan militer, tetapi terutama ditempatkan untuk tugas berat dan penjagaan. Namun, bagi orang Aceh *Heiho* dianggap sebagai bentuk lain dari kerja paksa. Meski begitu, di Sumatera Timur, Xarim M.S. mendukung *Heiho* karena melihatnya sebagai satu-satunya cara memperoleh pelatihan militer. Sebagai Kepala Propaganda Kotapraja Medan, ia memimpin promosi perekrutan.²⁹⁵

Pada tahun 1943, posisi Jepang dalam perang mulai defensif. Dalam mempertahankan wilayah dari serangan Sekutu, Jepang memberi lebih banyak ruang bagi nasionalisme Indonesia, terutama di bidang militer dan pemerintahan. Pada Juni 1943, Jepang menyusun strategi pertahanan baru untuk pulau-pulau di

²⁹⁴ T. Ibrahim Alfian, Zakaria Ahmad, Muhammad Ibrahim, Rusdi Sufi, Nasruddin Sulaiman, dan M. Isa Sulaiman, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945–1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm. 14; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 164-168.

²⁹⁵ T. Ibrahim Alfian, Zakaria Ahmad, Muhammad Ibrahim, Rusdi Sufi, Nasruddin Sulaiman, dan M. Isa Sulaiman, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945–1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm. 14; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 164-168.

Indonesia. Strategi ini memungkinkan tentara Jepang fokus di medan perang utama, sementara pertahanan garis pantai diserahkan kepada pasukan lokal yang dilatih dan dimotivasi secara nasionalis. Untuk itu, diperlukan pasukan pribumi dengan korps perwira sendiri. Jepang mulai bersedia mempersenjatai orang Indonesia dengan senjata modern, sesuatu yang sebelumnya tidak dilakukan Belanda.²⁹⁶

Langkah awal dilakukan oleh *Gunseibu* Sumatera di Bukittinggi pada akhir September 1943, setelah pembentukan *Giyugun* di Jawa (dikenal sebagai PETA). Di Sumatera, pelaksanaan rekrutmennya tidak seragam. Sumatera Barat memulai rekrutmen besar pada Oktober 1943, diikuti oleh Aceh pada November, dan kemudian provinsi lain dalam skala lebih kecil. Pasukan ini disebut *Giyugun* (Barisan Sukarela). Dalam kampanye rekrutmen, dijelaskan bahwa gaji, aturan, dan kondisi kerja setara dengan tentara Jepang. Pangkat tertinggi yang dapat dicapai adalah kapten dengan gaji ¥150 per bulan.²⁹⁷ Pedang samurai menjadi simbol status baru menggantikan atribut ala Belanda. Meski syarat pendidikan hanya Sekolah Dasar, banyak pendaftar berasal dari sekolah menengah dan memiliki kemampuan bahasa Belanda atau Jepang. Seleksi banyak dipengaruhi oleh koneksi dengan tokoh-tokoh yang memiliki akses ke pihak Jepang. Di Aceh, banyak pendaftar

²⁹⁶ T. Ibrahim Alfian, Zakaria Ahmad, Muhammad Ibrahim, Rusdi Sufi, Nasruddin Sulaiman, dan M. Isa Sulaiman, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945–1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm. 14; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 168-171.

²⁹⁷ Aiko Kurasawa, *Giyūgun: Tentara Sukarela pada Pendudukan Jepang di Jawa dan Sumatra* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024), hlm. 1–15; Joyce C. Lebra, *Japanese-Trained Armies in Southeast Asia*, hlm. 113–119; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 168-171.

berasal dari keluarga *ulèëbalang* terkemuka, serta aktivis yang dekat dengan Said Abu Bakar dan Masubuchi.²⁹⁸

Giyugun Aceh menjadi pasukan terbesar di Sumatera dengan lebih dari 20 kompi (sekitar 5.000–6.000 orang). Sumatera Timur hanya memiliki enam kompi (1.500 orang). Dari 18 perwira *Giyugun* angkatan pertama di Sumatera Utara yang mulai bertugas pada Mei 1944, 15 berasal dari Aceh. Tidak ada yang mencapai pangkat kapten, namun beberapa mencapai pangkat setara Letnan Satu. Tidak ada struktur komando di atas tingkat kompi, hal ini menjadi tantangan bagi pembentukan tentara Indonesia di masa depan. Meski begitu, latihan selama enam bulan membentuk ikatan kuat antar anggota *Giyugun*. Ada pula satuan khusus bernama *Hikōjō Kimuotoi* yang bertugas menjaga lapangan udara. Meski jumlahnya hanya beberapa ratus orang, beberapa perwiranya kemudian menjadi pemimpin militer penting saat revolusi Indonesia, bersama anggota *Giyugun* dan *Tokubetsu Keisatsutai*.²⁹⁹

Pendidikan Jepang lebih menekankan semangat, disiplin, dan kerja keras dibanding pelajaran akademik. Sekolah menengah pertama di Medan setelah Jepang masuk, mencantumkan kurikulum yang menekankan semangat Jepang, sopan santun, moral Timur, dan kerja keras. Hal ini ditegaskan dalam pidato kepala sekolah di Sekolah Latihan Kepemimpinan Malaya/Sumatera di Singapura yang menolak pengaruh budaya Barat dan menekankan semangat Jepang. Meskipun

²⁹⁸ Joyce C. Lebra, *Japanese-Trained Armies in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 113–119; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 168–171.

²⁹⁹ Joyce C. Lebra, *Japanese-Trained Armies in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 113–119; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 168–171.

Jepang memberi ruang bagi nasionalisme Indonesia sejak 1943, mereka tetap menekankan bahwa orang Indonesia harus meniru disiplin, kepercayaan diri, dan semangat pengorbanan Jepang. Dalam pandangan Jepang, *Giyugun* adalah alat utama untuk menanamkan semangat ini. Namun, semangat perjuangan yang tumbuh di kalangan prajurit *Giyugun* tidak selalu mengarah pada kepentingan Jepang.³⁰⁰

Kekecewaan muncul karena perwira Jepang tidak selalu mendapatkan status yang setara dengan perwira *Giyugun*, meski telah menjalani pelatihan serupa. Seperti kaum terpelajar Indonesia didikan Belanda yang menentang sikap rasial kolonial, banyak pemuda lulusan pendidikan Jepang juga menunjukkan perlawanan. Pada November 1944, T.A. Hamid, adik *ulèëbalang* Samalanga, memimpin dua peleton melarikan diri ke pegunungan, namun akhirnya menyerah setelah keluarganya ditangkap.

4.2.12. Konsolidasi Nasionalisme Indonesia di Aceh Pada Masa Kekuasaan

Jepang

Pada awal November 1943, Ki Bagus Hadikusumo, Sukarno dan Moh. Hatta diberi kesempatan menghadap Kaisar Hirohito. Dalam kesempatan itu kaisar bersalaman dan menganugerahi Bintang Ratna Suci kepada ketiganya.³⁰¹ Pada 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, menyampaikan dalam pidatonya di hadapan parlemen Jepang, bahwa setelah Perang Asia Timur Raya

³⁰⁰ T. Ibrahim Alfian dkk., *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945–1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm. 14; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 168-171.

³⁰¹ Gunawan, Restu, dkk. *Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, hlm. 1.

dimenangkan, Indonesia akan dimerdekakan. Pidato itu muncul setelah Jepang mengalami kekalahan militer yang signifikan, termasuk jatuhnya Pulau Saipan ke tangan Amerika pada 9 Juli 1944. Dalam upaya mengatasi kondisi tersebut, Koiso memimpin pembahasan untuk meninjau kembali berbagai kebijakan, termasuk mengenai masa depan Indonesia. Saat itu, jalur distribusi dari Indonesia ke Jepang telah terputus, sehingga hasil bumi Indonesia tidak lagi efektif dimanfaatkan. Pemerintah Jepang mempertimbangkan apakah pertahanan Indonesia sebaiknya tetap dijalankan oleh militer Jepang atau dibantu oleh penduduk setempat sebagai imbalan atas janji kemerdekaan.³⁰² Tentara ke-16 Jepang di Jawa menjadi satu-satunya yang mendukung gagasan kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, Markas Besar Tentara Jepang akhirnya menyetujui janji kemerdekaan untuk seluruh wilayah Hindia Timur, meskipun mendapat penolakan dari Angkatan Laut Jepang. Secara praktis, hanya sedikit perubahan yang diberikan, seperti izin mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia di Jawa dan Sumatera.³⁰³

Di Sumatera, pejabat militer Jepang menunjukkan keraguan terhadap janji ini. Mereka menilai bahwa penduduk belum cukup siap secara politik dan budaya untuk mengelola pemerintahan sendiri, sehingga pelaksanaan pemerintahan dilakukan secara tidak penuh. Dalam pidato-pidato resmi, mereka menyatakan

³⁰² Anthony Reid, *"Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional"* Jakarta: Komunitas Bambu, 2012, hlm. 192-195.

³⁰³ Hatta, *Memoir* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 394-395; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 168-171.

bahwa Indonesia masih membutuhkan bimbingan Jepang dan kemajuan bangsa akan dicapai melalui kerja sama dalam perang.³⁰⁴

Secara administratif, janji kemerdekaan tidak banyak mempengaruhi jalannya pemerintahan militer. Namun, secara politik, janji tersebut memberi dampak besar terhadap kesadaran masyarakat. Jepang memanfaatkan janji itu sebagai alat propaganda untuk memulihkan citra mereka. Di berbagai daerah diadakan rapat umum, pidato, dan penyebaran selebaran. Puncaknya adalah perayaan besar di Bukittinggi pada 7–9 Oktober 1944, yang disebut sebagai perayaan rakyat Sumatera terbesar.³⁰⁵

Perayaan itu menjadi ajang pertemuan tokoh-tokoh dari berbagai wilayah di Sumatera. Adinegoro memimpin panitia pelaksana. Sumatera Timur diwakili oleh tiga perwakilan kerajaan, Soengkoepo, dan H.A.R. Sjahab. Dari Aceh hadir Teuku Njak Arif, Daud Beureueh, dan T. Daudsah dari Aceh Timur. Saat perayaan di Bukittinggi, disebutkan bahwa 20.000 orang menyanyikan lagu “Indonesia Raya” bersama. Di Aceh, yang sebelumnya hanya sedikit mengenal gagasan nasionalisme Indonesia, para pemuda Islam pembaruan mulai berkumpul di sekitar media dan kantor propaganda Jepang. Kelompok-kelompok bersenjata lokal juga menunjukkan semangat terhadap cita-cita kemerdekaan Indonesia. Mereka kemudian menjadi kekuatan baru dalam politik Aceh yang lebih fokus pada

³⁰⁴ Aiko Kurasawa, *Giyūgun: Tentara Sukarela pada Pendudukan Jepang di Jawa dan Sumatra* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2024), hlm. 19–21; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 168–171.

³⁰⁵ George S. Kanahale, *The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence* (Ithaca: Cornell University Press, 1967), hlm. 210–218; Joyce C. Lebra, *Japanese-Trained Armies in Southeast Asia: Independence and Volunteer Forces in World War II* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 113–119; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 168–171.

persatuan nasional Indonesia. Dr. Amir kemudian menyatakan bahwa propaganda Jepang tentang kemerdekaan Indonesia dalam satu tahun berhasil menyebarkan gagasan persatuan dan kemerdekaan nasional lebih efektif dibanding propaganda sebelumnya selama sepuluh tahun.³⁰⁶

4.2.13. Berita Kemerdekaan Indonesia di Aceh

Pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintahan militer Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan sebuah badan baru bernama *Dokuritsu Junbi Chōsakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Tujuan badan ini adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan bagi negara Indonesia yang direncanakan akan merdeka.³⁰⁷ BPUPK secara resmi dibentuk pada 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang yang ke-124 Hirohito. Jumlah anggotanya sebanyak 67 orang, terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua, sedangkan wakil ketua adalah Ichibangase Yoshio, orang Jepang.³⁰⁸

³⁰⁶ T. Ibrahim Alfian dkk., *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945–1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm. 14–16; A. Hasjmy, *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 287–292; Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 168–171.

³⁰⁷ Rika Septiana dan Yeti Yuniarsih, “Sejarah Konstitusi Republik Indonesia,” *Jurnal* (2019), bagian “Lahirnya Undang-Undang,” hlm. 1–2; Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 141–150; Nugroho Notokusanto, *Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*, Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1971, hlm. 14–15.

³⁰⁸ Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959), hlm. 79–92; B.R.O. Supomo, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 29.

Badan ini melakukan serangkaian sidang untuk membahas dasar-dasar pembentukan negara Indonesia. Salah satu sidang penting terjadi pada 14 Juli 1945, ketika BPUPK menerima laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Laporan tersebut memuat sejumlah keputusan penting, antara lain: pernyataan kemerdekaan Indonesia, bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, bentuk pemerintahan Republik, bendera nasional adalah Merah Putih, bahasa nasional adalah Bahasa Indonesia, serta wilayah Indonesia meliputi bekas Hindia Belanda ditambah wilayah lain seperti Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya.³⁰⁹

Rangkaian sidang BPUPK ini menjadi landasan penting bagi perumusan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks Proklamasi Kemerdekaan dilakukan pada malam 16–17 Agustus 1945 setelah terjadi peristiwa Rengasdengklok. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo kemudian merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol No. 1, Jakarta. Setelah teks disepakati, Soekarno dan Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemudian dibacakan oleh Soekarno pada pagi 17 Agustus 1945.³¹⁰

Berita Proklamasi kemudian disebarluaskan melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola pihak Jepang dan Indonesia, termasuk radio, kantor

³⁰⁹ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Tintamas, 1969), hlm. 45–52; A.B. Lopian dan P.J. Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati: Diplomasi dan Perang di Indonesia, 1945–1949* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992); Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, jilid I, hlm. 92–96; Ahmad Ibrahim, *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 187.

³¹⁰ Mohammad Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Tintamas, 1969), hlm. 45–52; A.B. Lopian dan P.J. Drooglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati: Diplomasi dan Perang di Indonesia, 1945–1949* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992),

berita, surat kabar, dan jaringan para pemuda.³¹¹ Di Aceh, berita tentang proklamasi kemerdekaan baru diterima pada 28 Agustus 1945, karena terbatasnya komunikasi dengan Jakarta. Elit-elit sosial Aceh segera meningkatkan kegiatan mereka untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh Aceh. Berita tersebut kemudian sampai kepada tokoh-tokoh Aceh melalui pemuda Gazali dan Rajalis serta radiogram yang dikirim dari Bukittinggi oleh Adinegoro. Setelah menerima berita tersebut, Teuku Nyak Arif memanggil sejumlah pemimpin Aceh dan menyatakan kesetiaannya kepada Republik Indonesia. Teuku Nyak Arif juga memasang bendera Merah Putih di sepeda motornya dan melakukan konvoi memberitakan Indonesia merdeka kepada warga kota Banda Aceh.³¹²

Pada 28 Agustus 1945, Teuku Nyak Arif dipilih sebagai ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) daerah Aceh, dengan Tuanku Mahmud sebagai wakilnya. Pembentukan KNI tersebut menjadi salah satu langkah awal konsolidasi politik Republik Indonesia di Aceh. Pada saat yang sama, para bekas anggota *Giyugun* dan kelompok pemuda mulai mempersiapkan pembentukan organisasi pertahanan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan.³¹³

³¹¹ George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1952, hlm. 138-139.

³¹² Syamaun Gaharu, *Cuplikan Perjuangan Daerah Modal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 62-68; Mardanas Safwan, *Teuku Nyak Arif* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hlm. 88-90; T. Ibrahim Alfian dkk., *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)*, hlm. 35-37.

³¹³ T. Ibrahim Alfian, Zakaria Ahmad, Muhammad Ibrahim, Rusdi Sufi, Nasruddin Sulaiman, dan M. Isa Sulaiman, *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945-1949)* (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982), hlm. 35-36.

4.2.14. Dinamika Sosial di Aceh Setelah Kemerdekaan Indonesia

Diproklamirkan

Momentum Teuku Nyak Arief mengibarkan bendera Merah Putih pada 24 Agustus 1945 di Banda Aceh merupakan hal yang wajar karena memang identitas dan kebanggaan nasional Aceh sudah tidak ada lagi pada elit sosial Aceh pada tahun 1945. Namun bergabungnya elit sosial Aceh dalam bingkai Republik Indonesia di tahun 1945 bukanlah akhir dari sejarah panjang Aceh dalam perang dan pergolakan politik. Aceh bagaikan tanah jahannam yang selalu bersimbah darah. Dikibarkannya bendera merah putih di Banda Aceh hanyalah awal dari perang baru di depan mata. Daud Beureueh dan organisasinya PUSA yang kecewa karena tidak juga mendapat kekuasaan mengambil langkah penghabisan.

Setelah semua perjuangan dan jasanya terhadap suksesnya integrasi Aceh ke dalam Indonesia, tetap saja kaum bangsawan yang memetik hasil. Bukan Daud Beureueh, tapi T. Nyak Arief lah yang menjadi kepala residen Aceh di bawah Indonesia. Akumulasi ketegangan sosial, politik, dan ekonomi kemudian berkembang menjadi konflik terbuka, revolusi sosial pun terjadi. Pembantaian para bangsawan Aceh pada akhir tahun 1945 sampai pertengahan tahun 1946 telah membuat Daud Beureueh dan PUSA memegang tampuk kekuasaan di Aceh. Namun tetap saja ini tidak berlangsung lama. Besarnya pengaruh dan kekuatan Daud Beureueh menimbulkan ketakutan dari pemerintah pusat di Jakarta. Keputusan diambil dengan meleburkan Aceh dalam satu kesatuan administrasi dengan Sumatera Utara. Daud Beureueh kembali dikecewakan, membuatnya bergabung dalam gerakan Darul Islam pada 1953. Aceh bersimbah darah lagi.³¹⁴

Tindakan represif dan pembunuhan massal yang dilakukan oleh aparat Indonesia pada masa perang Darul Islam telah menimbulkan ketidakpercayaan dari rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia. Abuya Muda Waly dari organisasi PERTI dengan lihai memanfaatkan momentum berdarah ini. Ia datang ke Jakarta untuk membaiat Sukarno sekali lagi. Hasilnya dengan dukungan pemerintah dan

³¹⁴ Anthony Reid, *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*, Jakarta: Komunitas Bambu, 2012, hlm. 123-293.

dibubarkannya sekolah-sekolah PUSA, para murid dari pantai utara Aceh berduyun-duyun masuk ke sekolah agama Islam yang didirikannya di Aceh Selatan pada masa Belanda. Ditambah lagi Abuya Muda Waly menyebut sekolahnya sebagai Dayah, seolah-olah memiliki keterhubungan historis dan keilmuan dengan dayah pada masa Kesultanan Aceh. Padahal kenyataannya daya Abuya Muda Waly kurikulum dan tradisi dari PERTI dalam pembelajaran dan pengkaderannya. Para murid-murid yang telah selesai dikaderkan di dayah PERTI ini membuka dayah-dayah baru ketika pulang ke kampung halamannya. Dayah-dayah model PERTI ini tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan di seluruh Aceh pada generasi berikutnya. Hal inilah yang membentuk wajah Islam dan struktur sosial baru di Aceh pada saat ini, dari Islamisme ke Sekularisme yang sangat bermanfaat dalam melanggengkan pemerintah Indonesia di Aceh hingga saat ini.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Integrasi Nasional Indonesia di Aceh, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, budaya, paradigma, dan aspek ideologis rakyat Aceh sebelum terjadinya proses integrasi nasional Indonesia terbentuk dari sejarah panjang kehidupan Aceh sebagai masyarakat yang memiliki identitas dan tradisi politiknya sendiri. Sebelum masuknya pengaruh kolonial, masyarakat Aceh berkembang dalam lingkungan sosial dan budaya yang sangat erat dengan Islam, perdagangan, serta kehidupan maritim. Agama Islam tidak hanya mengatur hal-hal ritual dan spiritual masyarakat, tetapi juga menjadi dasar hukum, kebudayaan, dan penyelenggaraan kekuasaan.

Pengalaman Aceh sebagai wilayah yang memiliki kesultanan-kesultanan Islam dan kemudian dipersatukan dalam Kesultanan Aceh Darussalam membentuk kesadaran identitas keacehan yang kuat. Karena itu, ketika kolonialisme Belanda masuk dan berusaha menguasai Aceh, perlawanan terhadap kolonialisme tidak hanya dipahami sebagai perjuangan politik, tetapi juga berkaitan dengan pembelaan terhadap agama, adat, dan identitas masyarakat Aceh. Setelah kekalahan militer Kesultanan Aceh pada awal abad ke-20, struktur sosial dan politik Aceh mengalami perubahan. Belanda membangun pemerintahan kolonial, mengubah kedudukan uleebalang, membatasi pengaruh ulama, serta memperkenalkan pendidikan modern yang sekuler. Pada awalnya, sebagian besar masyarakat Aceh menolak pendidikan kolonial karena dipandang membawa paradigma yang memisahkan agama dari negara dan kehidupan publik. Namun, secara perlahan muncul generasi baru yang memperoleh pendidikan modern dan mulai mengalami perubahan cara berpikir.

Organisasi-organisasi modern, pembaruan pendidikan Islam, serta berkembangnya jaringan ulama dan kaum terpelajar kemudian melahirkan kelompok sosial baru yang mulai menerima gagasan nasionalisme Indonesia. Dengan demikian, menjelang tahun 1930-an, masyarakat Aceh tidak lagi berada dalam satu paradigma yang seragam. Di satu sisi masih terdapat pandangan yang menempatkan Islam dan identitas keacehan sebagai dasar kehidupan politik, sedangkan di sisi lain mulai berkembang paradigma kebangsaan Indonesia di

kalangan guru, ulama, pemuda, dan elite terpelajar. Perubahan tersebut juga menciptakan polarisasi antara kelompok uleebalang yang memperoleh legitimasi dari pemerintah kolonial dan kelompok nasionalis yang berkembang melalui pendidikan, organisasi modern, serta gerakan pembaruan Islam.

Konsep Integrasi Nasional Indonesia dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah serta pembentukan identitas nasional bersama. Integrasi nasional bukan semata-mata penyatuan administratif, tetapi juga proses terbentuknya kohesi sosial, komunikasi, kerja sama, dan kesediaan berbagai kelompok untuk hidup dalam satu sistem politik. Dalam konteks Indonesia, proses tersebut telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda dan tidak baru dimulai setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Berdasarkan perspektif Karl W. Deutsch, integrasi dapat berkembang melalui peningkatan komunikasi, interaksi, dan kerjasama antar kelompok sehingga terbentuk kesadaran mengenai kepentingan dan kehidupan bersama. Perspektif Benedict Anderson memperlihatkan bahwa bangsa merupakan suatu komunitas politik yang diimajinasikan, yang terbentuk melalui pengalaman bersama, penggunaan bahasa, pendidikan, media cetak, serta struktur administrasi yang memungkinkan orang-orang yang tidak saling mengenal membayangkan dirinya sebagai bagian dari komunitas yang sama. Dalam konteks Indonesia, proses tersebut berkembang melalui pengalaman bersama sebagai masyarakat yang berada di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Oleh karena itu, integrasi nasional Indonesia dalam penelitian ini dipahami sebagai proses historis yang secara bertahap membentuk kesadaran kebangsaan melalui pendidikan, komunikasi, organisasi, jaringan sosial, dan pengalaman politik bersama. Di Aceh, proses tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari struktur kolonial yang sebelumnya telah mengintegrasikan Aceh ke dalam sistem pemerintahan Hindia Belanda. Struktur administratif, batas wilayah, pendidikan, dan jaringan komunikasi kolonial kemudian menjadi salah satu kondisi yang memungkinkan munculnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, integrasi nasional Indonesia merupakan proses pengalihan loyalitas dan orientasi politik dari unit-unit sosial dan politik

yang sebelumnya memiliki identitas sendiri menuju suatu pusat kekuasaan dan identitas nasional yang lebih luas.

Proses Integrasi Nasional Indonesia di Aceh berlangsung secara bertahap dan tidak terjadi secara tiba-tiba pada tahun 1945. Proses tersebut telah memperoleh dasar sejak awal abad ke-20 melalui perubahan struktur sosial-politik akibat konsolidasi pemerintahan kolonial, perkembangan pendidikan modern, munculnya generasi terpelajar, serta masuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, PNI, PSII, dan organisasi pembaruan Islam lainnya memperkenalkan gagasan persatuan dan nasionalisme Indonesia melalui pendidikan, ceramah, media cetak, serta jaringan organisasi. Di Aceh, gagasan tersebut kemudian berinteraksi dengan tradisi Islam dan identitas keacehan yang telah lebih dahulu kuat. Gerakan ulama modernis dan organisasi seperti PUSA turut memainkan peranan penting dalam membentuk kelompok sosial baru yang mampu menghubungkan gagasan keagamaan dengan perjuangan nasional. Pada periode 1930–1942, perubahan paradigma semakin terlihat dengan lahirnya generasi yang memperoleh pendidikan modern dan mulai memandang penyelenggaraan negara tidak selalu identik dengan penyelenggaraan agama. Pada saat yang sama, terjadi persaingan antara uleebalang sebagai elite yang memperoleh legitimasi dari pemerintahan kolonial dan kelompok nasionalis yang terdiri atas ulama, guru, pemuda, serta kaum terpelajar. Persaingan tersebut membentuk polarisasi sosial-politik sekaligus memperluas ruang bagi tumbuhnya nasionalisme Indonesia di Aceh.

Ketika Jepang menduduki Aceh pada tahun 1942, proses tersebut memasuki tahap baru. Berakhirnya kekuasaan Belanda sempat menumbuhkan harapan di kalangan sebagian elite Aceh. Namun, perubahan kekuasaan tersebut juga memperuncing persaingan pengaruh antara uleebalang dan kelompok PUSA. Selama pendudukan Jepang, persaingan tersebut turut membentuk dan memperkuat posisi politik kedua kelompok dalam menghadapi perubahan kekuasaan menjelang akhir Perang Dunia II. Ketika Jepang kalah dengan sekutu dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tahun 1945, kondisi sosial-politik Aceh telah mengalami transformasi yang cukup besar. Generasi nasionalis

Indonesia telah terbentuk, pendidikan modern telah berkembang, organisasi-organisasi pergerakan telah memiliki jaringan, dan sejumlah tokoh Aceh telah terhubung dengan politik nasional Indonesia. Oleh karena itu, bergabungnya Aceh ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1945 merupakan hasil dari proses historis yang telah berlangsung sebelumnya, bukan suatu keputusan yang muncul secara spontan. Proses tersebut merupakan hasil interaksi antara perubahan struktur pemerintahan oleh kolonial, perkembangan pendidikan, pertumbuhan organisasi modern, perubahan paradigma, persaingan elite sosial, serta keterlibatan tokoh-tokoh Aceh dalam gerakan nasional Indonesia. Pada akhirnya, para elite sosial Aceh yang terbentuk dari dinamika masa kolonial dan perebutan pengaruh pada masa pendudukan Jepang telah menjadi bagian dari persatuan Indonesia pada tahun 1945.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, T. B. (1980). *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Abdurahman, Dudung. (2019). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1978). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ABIM.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1993). *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).

Alfian, T. Ibrahim. (1987). *Politik Perang dan Integrasi Aceh dalam NKRI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Alfian, T. Ibrahim. (1987). *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873–1912*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Alfian, T. Ibrahim, Zakaria Ahmad, Muhammad Ibrahim, Rusdi Sufi, Nasruddin Sulaiman, & M. Isa Sulaiman. (1982). *Revolusi Kemerdekaan Indonesia di Aceh (1945–1949)*. Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Andaya, Barbara Watson, & Leonard Y. Andaya. (2001). *A History of Malaysia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Andaya, Leonard Y. (2001). *The Kingdom of Aceh*. Ithaca: Cornell University Press.

Andaya, Leonard Y. (2007). *The Kingdom of Aceh: Conflict and Diplomacy under the Sultan Iskandar Muda, 1607–1636*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project.

Anderson, Benedict. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Aspinall, Edward. (2009). *Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford: Stanford University Press.

Azra, Azyumardi. (2004). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.

Benda, Harry J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*. Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya.

Beaulieu, Augustin de. (1903). *Mémoires d'un voyage aux Indes orientales 1619–1622*. Dalam Charles Schefer (Ed.), *Relations et mémoires inédits pour servir à l'histoire de la France dans les pays d'outre-mer*. Paris: Ernest Leroux.

Berger, Peter L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books.

Borschberg, Peter. (2010). *The Singapore and Melaka Straits: Violence, Security and Diplomacy in the 17th Century*. Singapore: NUS Press.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). *Aceh dalam Angka 2023*. Banda Aceh:

Badan Pusat Statistik.

Couto, Diogo do. (1788). *Decadas da Ásia*, Vol. III. Lisboa: Regia Officina Typografica.

Fearon, James D. (2008). "Social Capital, Social Cohesion, and Integration." Dalam *Measuring Social Cohesion*, ed. Bertelsmann Stiftung, hlm. 31–48. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.

Fernández-Armesto, Felipe. (2006). *Pathfinders: A Global History of Exploration*. New York: W. W. Norton.

Foucault, Michel. (2007). *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France 1977–1978*. Ed. Michel Senellart. New York: Palgrave Macmillan.

Frankopan, Peter. (2015). *The Silk Roads: A New History of the World*. London: Bloomsbury.

Friend, Theodore. (2003). *Indonesian Destinies*. Cambridge: Harvard University Press.

Gaharu, Syamaun. (1995). *Cuplikan Perjuangan Daerah Modal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Gottschalk, Louis. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.

Gottschalk, Louis. (2008). *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

Gramsci, Antonio. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publishers.

Gunawan, Restu, dkk. (2015). *Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hall, Stuart. (1990). "Cultural Identity and Diaspora." Dalam Jonathan Rutherford (Ed.), *Identity: Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.

Hasjmy, A. (1977). *59 Tahun Aceh Merdeka di bawah Pemerintahan Ratu*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hasjmy, A. (1981). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif.

Hasjmy, A. (1983). *Naskah Tentang Adat Aceh dan Perkembangannya*. Banda Aceh: BPPD.

Hasjmy, A. (1985). *Semangat Merdeka: 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Hatta, Mohammad. (1969). *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas.

Hatta, Mohammad. (1982). *Memoir*. Jakarta: Tintamas.

Hidayah, Zulyani. (2000). *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Hurgronje, C. Snouck. (1893). *De Atjehers*. Leiden: Brill.

Hurgronje, C. Snouck. (1906). *The Achehnese*. Terj. A. W. S. O'Sullivan. Leiden: Brill.

Hurgronje, C. Snouck. (1915). *Nederland en de Islam*. Leiden: E. J. Brill.

Ibrahim, M., dkk. (1982). *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ibrahim, M. Nur El. (1982). *Peranan Tgk. Muhammad Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*. Jakarta: Media Dakwah.

Kahin, George McTurnan. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Kanahele, George S. (1967). *The Japanese Occupation of Indonesia: Prelude to Independence*. Ithaca: Cornell University Press.

Kartodirdjo, Sartono. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.

Kern, R. A. (1939). *Catalogus van de Boeken en Geschriften over de Indische Talen*. Leiden: E. J. Brill.

Kell, Tim. (1995). *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989–1992*. Ithaca: Cornell University Press.

Khan, Sher Banu A. L. (2017). *Sovereign Women in a Muslim Kingdom: The Sultanahs of Aceh, 1641–1699*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kurasawa, Aiko. (2024). *Giyūgun: Tentara Sukarela pada Pendudukan Jepang di Jawa dan Sumatra*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Lapian, A. B., & P. J. Drooglever. (1992). *Menelusuri Jalur Linggarjati: Diplomasi dan Perang di Indonesia, 1945–1949*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Lebra, Joyce C. (2010). *Japanese-Trained Armies in Southeast Asia: Independence and Volunteer Forces in World War II*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Lee Kam Hing. (1972). “The Sultanate of Aceh: Relations with the British, 1760–1820.” *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 45(1).

Lombard, Denys. (1967). *Le Sultanat d’Atjeh au temps d’Iskandar Muda*. Paris: École Française d’Extrême-Orient.

Lombard, Denys. (2006). *Kerajaan Aceh: Zaman Sultan Iskandar Muda*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Marsden, William. (1783). *The History of Sumatra*. London: Thomas Payne.

McVey, Ruth T. (1965). *The Rise of Indonesian Communism*. Ithaca: Cornell University Press.

Meilink-Roelofs, M. A. P. (1962). *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. The Hague: Martinus Nijhoff.

Mundy, Peter. (1919). *The Travels of Peter Mundy in Asia, 1608–1667*, Vol. II. London: Hakluyt Society.

Niel, Robert van. (1960). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. The Hague: W. van Hoeve.

Noer, Deliar. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.

Noer, Deliar. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.

Notosusanto, Nugroho. (1971). *Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik*. Jakarta: Yayasan Proklamasi.

Poerwanto. (1991). *Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.

Ricklefs, M. C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004*. Terj. Satrio Wahono dkk. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Reid, Anthony. (1969). *The Contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain, 1858–1898*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Reid, Anthony. (1974). *The Indonesian National Revolution, 1945–1950*. Melbourne: Longman.

Reid, Anthony. (1979). *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Reid, Anthony. (1986). *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Sinar Harapan.

Reid, Anthony. (1988). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680*. New Haven: Yale University Press.

Reid, Anthony. (2005). *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*. Singapore: Singapore University Press.

Reid, Anthony. (2007). *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*. Terj. Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Reid, Anthony. (2011). *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Terj. Masri Maris. Jakarta: KITLV-Jakarta & Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Reid, Anthony. (2012). *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Reid, Anthony. (2014). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450–1680, Jilid I: Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rusli, R., & F. Muhtadi. (2021). “Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Minangkabau pada Awal Abad XX.” *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(1), 74–83.

Said, H. Mohammad. (1981). *Aceh Sepanjang Abad, Jilid I*. Medan: PT Waspada.

Said, Muhammad. (1961). *Aceh Sepanjang Abad*. Jakarta: Bulan Bintang.

Safwan, Mardanas. (1975). *Teuku Nyak Arif*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Shiraishi, Takashi. (1990). *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926*. Ithaca: Cornell University Press.

Shiraishi, Takashi. (1997). *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926*. Jakarta: Grafiti Pers.

Sidwell, Paul. (2003). “Dating the Chamic Diaspora: A Proposal Based on Lexical Borrowing and Morphological Innovation.” *Mon-Khmer Studies*, 33, 125–126.

Sidwell, Paul. (2004). “The Austroasiatic and Austronesian Contact in the Chamic Lexicon.” *Mon-Khmer Studies*, 34, 63–65.

Sjamsuddin, Helius. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Steenbrink, Karel A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.

Subrahmanyam, Sanjay. (1993). *The Portuguese Empire in Asia, 1500–1700: A Political and Economic History*. London: Longman.

Supomo, B. R. O. (1977). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Talsya, T. A. (1990). *Perjuangan Kemerdekaan di Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Sejarah Aceh.

van 't Veer, Paul. (1985). *Perang Aceh*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

van Aken, A. Ph. (1936). *Memorie van Overgave van den Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden*. Kutaradja.

van der Wal, S. L. (Ed.). (1963). *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch-Indië 1900–1940*. Groningen: J. B. Wolters.

Vogel, A. (1919). *Verslag betreffende het Volksonderwijs in het Gewest Atjeh en Onderhoorigheden*. Batavia: Landsdrukkerij.

Wheatley, Paul. (1961). *The Golden Khersonese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula before A.D. 1500*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Wolters, O. W. (1999). *History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspectives*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.

Yamin, Mohammad. (1959). *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I. Jakarta: Yayasan Prapantja.

Zainuddin. (1961). *Tarich Atjeh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar Muda.

Zentgraaf, H. C. (1983). *Atjeh*. Terj. Aboe Bakar. Jakarta: Beuna.

SUMBER INTERNET

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). *Aceh dalam Angka 2023*. Banda Aceh: Badan Pusat Statistik. Tersedia secara daring melalui <https://aceh.bps.go.id/>. Diakses 26 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). "Integrasi." *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Tersedia melalui <https://kbbi.web.id/integrasi>. Diakses 26 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). "Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Tersedia melalui <https://kbbi.web.id/indonesia>. Diakses 26 Desember 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). “Nasionalisme.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Tersedia melalui <https://kbbi.web.id/nasionalisme>. Diakses 26 Desember 2023.

Alfian, T. I. H. (2001). “Penyelesaian Masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Konsepsi Prinsipil dan Bijaksana.” *Jurnal Ketahanan Nasional*. Tersedia melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22059/14719>.

Melalatoa, J. (2005). “Sejarah Islam dan Identitas Sosial Masyarakat Aceh.” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 27(1), 44–54. Tersedia melalui <https://e-journal.unair.ac.id>.

Taufiq, D. (2009). *Kemerdekaan Negara Kosovo Ditinjau dari Hukum Internasional* (Skripsi S1, Universitas Indonesia). Tersedia melalui <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old9/123644>.



LAMPIRAN

Lampiran 1.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY Banda Aceh
NOMOR: 2611/Un.08/FAH/KP 004/12/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY Banda Aceh**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi/karya ilmiah/tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh di pandang perlu menunjuk pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing skripsi/karya ilmiah/tugas akhir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2023 tentang Panduan Akademik bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 200 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY Banda Aceh TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI/KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY Banda Aceh.**

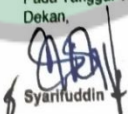
Kesatu : Menunjuk saudara :
1). Dra. Munawiah, M.Hum. (Pembimbing Pertama)
2). Asmanidar, M.A. (Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi mahasiswa
Nama : **Muhammad Azwar**
Nim : **180501123**
Prodi : **Sejarah dan Kebudayaan Islam**
Judul : **Integrasi Nasional Indonesia di Aceh Tahun 1930 - 1945**

Masa Bimbingan : Enam Bulan TMT 22 Desember 2024 s/d 22 Juni 2025)

Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka skripsi/karya ilmiah/tugas akhir tersebut dengan sepengetahuan fakultas.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 18 Desember 2024
Dekan,

Syarifuddin

Tembusan:

1. Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry;
2. Pembimbing skripsi karya ilmiah tugas akhir;
3. Dosen Penasihat Akademik yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Azwar
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjong, 6 Februari 1997
NIM : 180501123
Program Studi : Sejarah Keudayaan Islam
Alamat : Meunasah Tanjong, Karieng, Aceh Utara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wartawan
Email : azwarsalem@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Muhammad Salem
Pekerjaan : Pejuang GAM
Ibu : Nurul Aini Nurdin
Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan

1. 2003-2009 : SDN 1 Meurah Mulia
2. 2009-2012 : SMPN 2 Meurah Mulia
3. 2012-2015 : SMAN 1 Syamtalira Bayu
4. 2015-2018 : S1 Program Studi Arsitektur - UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Tidak Selesai)
5. 2018-2025 : S1 Program Studi Sejarah Keudayaan Islam - UIN Ar-Raniry Banda Aceh

